



Sunarso, M.Si.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNTUK SMP KELAS IX



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya buku model Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat dapat diselesaikan.

Buku model Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun berdasarkan Standar Isi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang penggunaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006. Standar isi yang disusun BSNP berisi pokok-pokok pembelajaran yang harus dikembangkan oleh sekolah masing-masing.

Pola dan sistem penyajian buku model ini dirancang agar mudah dipahami oleh siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi dalam buku ini disajikan dalam bahasa yang lugas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Tata letak dan gambar yang menarik diharapkan dapat mempermudah siswa memahami berbagai hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Kreativitas dan penalaran siswa juga kami harapkan dapat berkembang melalui latihan-latihan yang disajikan dalam berbagai bentuk aktivitas.

Kepada Kepala Pusat Perbukuan Nasional, seluruh staf dan karyawannya saya ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis. Kepada narasumber Dr. Widodo Suryandono, M.Hum. penulis sampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Banyak saran dan masukan yang penulis terima dari beliau sebagai nara sumber, untuk penulisan buku ini. Kepada rekan-rekan sesama penulis buku model tak lupa juga saya sampaikan terima kasih atas masukan dan motivasinya. Semoga amal baik Bpk/Ibu mendapat pahala dari Allah SWT.

Akhirnya segala kritik dan saran demi kesempurnaan buku ini akan kami terima dengan senang hati. Penulis berharap meski hanya sekecil apapun, buku ini ada manfaatnya.

Jakarta, Desember 2008
Penulis

Sunarso, MSi.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Semester Pertama	
Bab 1. BELA NEGARA.....	5
Peta Konsep.....	5
A. Mengapa Bela Negara itu Penting.....	6
Rangkuman.....	20
Latihan.....	21
B. Bentuk-Bentuk Bela Negara.....	23
Rangkuman.....	41
Latihan.....	42
C. Berpartisipasi dalam Usaha Bela Negara.....	43
Rangkuman.....	53
Latihan.....	54
D. Glosarium.....	56
E. Evaluasi.....	59
Bab 2. PELAKSANAAN OTONOMIDAERAH.....	65
Peta Konsep.....	66
A. Hakikat Otonomi Daerah.....	68
Rangkuman.....	82
Latihan.....	83
B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik.....	85
Rangkuman.....	98
Latihan.....	99
C. Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	100
Rangkuman.....	111
Latihan.....	112
D. Glosarium.....	114
E. Evaluasi.....	113
Semester Kedua	
Bab 3. DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA.....	119
Peta Konsep.....	119
A. Pengertian dan Arti Penting Globalisasi bagi Indonesia.....	120
Rangkuman.....	128
Latihan.....	129
B. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia.....	130
Rangkuman.....	143
Latihan.....	144
C. Dampak Globalisasi bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.....	145
Rangkuman.....	160
Latihan.....	161
D. Menyikapi Dampak Globalisasi.....	162
Rangkuman.....	179
Latihan.....	180
E. Glosarium.....	182
F. Evaluasi.....	183
Bab 4. BERPRESTASI UNTUK KEUNGGULAN BANGSA.....	189

Peta Konsep.....	189
A. Mengembangkan Prestasi Diri untuk Kejayaan Bangsa.....	191
Rangkuman.....	209
Latihan.....	210
B. Mengenal Potensi Diri untuk Berprestasi.....	211
Rangkuman.....	217
Latihan.....	218
C. Berprestasi untuk Keunggulan Bangsa.....	219
Rangkuman.....	241
Latihan.....	242
D. Glosarium.....	243
E. Evaluasi.....	244
DAFTAR PUSTAKA.....	247
INDEKS.....	249

BAB I

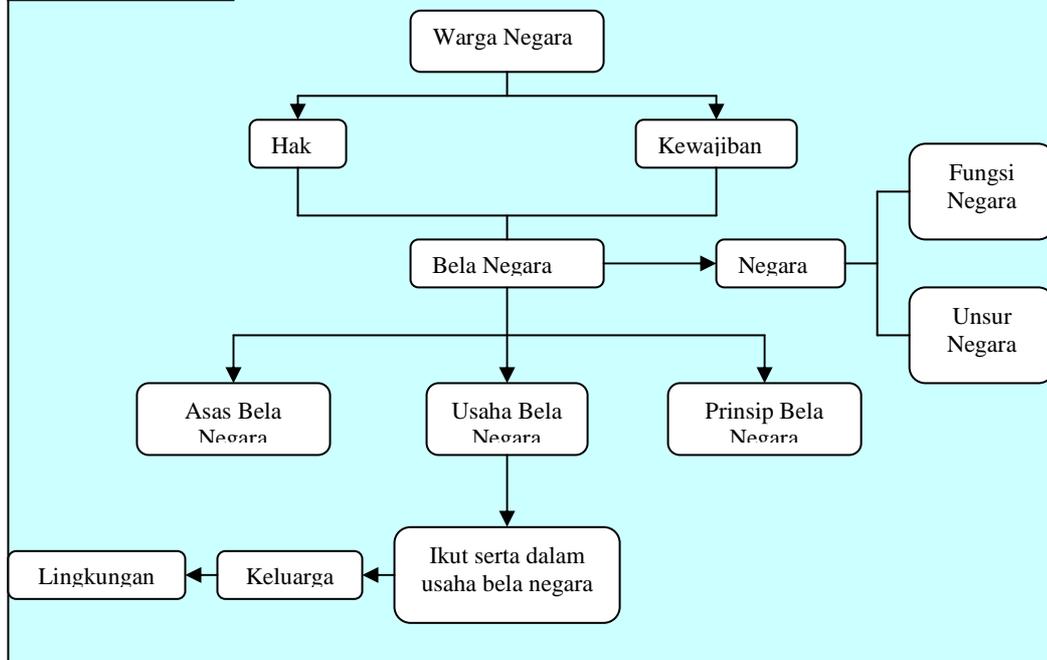
BELA NEGARA

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa:

1. Memahami hakikat dan bentuk-bentuk pembelaan negara.
2. Menyadari pentingnya usaha pembelaan negara.
3. Mampu berperan serta membela negara melalui tindakan nyata sehari-hari.

Peta Konsep



Kata Kunci:

negara, bela negara, kewajiban bela negara, sishankamrata

Para pahlawan dan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, harta dan bahkan apa saja yang dimikinya. Perjuangan tersebut dapat berhasil atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.

Upaya mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, serta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas bersama seluruh rakyat. Oleh karena itu setiap warga negara harus bersedia untuk melakukan bela negara.

A. Mengapa Bela Negara itu Penting?

1. Pengertian Bela Negara

Membela negara adalah “hak sekaligus kewajiban” bagi setiap warga negara. Apa sebenarnya yang dimaksud bela negara itu?. “Bela negara” adalah, tekad dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air, untuk menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negaranya.

2. Alasan Perlunya Bela Negara

Di Indonesia kita dilahirkan, di Indonesia kita bertempat tinggal dan dibesarkan, serta di Indonesia pula kita mencari penghidupan.

Ada tiga alasan mengapa harus kita bela Indonesia. Tiga alasan tersebut adalah: alasan historis, geografis, dan alasan demografis.

a. Alasan Historis

1. Sejak dulu banyak negara yang ingin menguasai Indonesia;
2. Indonesia pernah dijajah lebih dari tiga ratus tahun;
3. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bukan hadiah dari penjajah;
4. Sejarah membuktikan setiap ada ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara RI baik dari luar maupun dari dalam, rakyat akan bangkit membela negaranya. Tidak mungkin bangsa Indonesia meminta bantuan kepada bangsa lain untuk membela negaranya sendiri.

b. Alasan Geografis

1. Wilayah Indonesia sangat luas;
2. Kekayaan alamnya melimpah;
3. Letak Indonesia strategis;
4. Jumlah pulaunya lebih dari 17 ribu;
5. Tanahnya amat subur.

c. Alasan Demografis

1. Jumlah penduduk nomor empat dunia, sekitar 220 juta jiwa;
2. Persebaran penduduknya tidak merata, sekitar 60% ada di Jawa;
3. Kualitas penduduknya relatif masih tertinggal dibandingkan negara maju;
4. Pendapatan perkapita penduduk juga relatif rendah dibanding negara maju;
5. Pemerataan pendapatan juga relatif kurang baik.
6. Pengangguran relatif tinggi.

Berdasarkan kondisi obyektif seperti itu, maka diperlukan peran serta dari seluruh anak bangsa untuk turut serta dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Setiap warga negara diharapkan dapat berbuat sesuatu demi kemajuan dan kejayaan bangsanya. Tentu saja sesuai kapasitas, dan profesinya masing-masing. Jika saja setiap anak bangsa berpartisipasi dalam bela negara, tentulah Indonesia akan segera bisa mengejar ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain kita akan segera bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain.

Sebaiknya Kamu Tahu

Membela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, apapun kedudukannya, apapun situasinya dan dimanapun ia tinggal.

3. Pengertian Negara

Beraneka ragam pengertian tentang negara diungkapkan oleh beberapa tokoh ilmu negara, sejak jaman Yunani kuno sampai abad modern. Diantara para pemikir modern tersebut adalah Kranenburg. Beliau mengatakan bahwa "negara"

adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut “bangsa”. Menurut Kranenburg sebelum terbentuknya negara terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang biasa disebut “bangsa”.

Secara umum negara didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Negara juga mempunyai hak-hak istimewa, yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Hak-hak tersebut antara lain: hak memaksa, hak monopoli dan hak mencakup semua. Negara diberi hak istimewa dengan tujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tercapainya tujuan bersama.

Masih banyak pendapat lain yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut lebih menyangkut pada asal-usul, hakekat negara, serta tujuan negara. Perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh perkembangan zaman, keadaan maupun tempat.

Dalam Konferensi Pan-Amerika di Montevideo pada tahun 1933 telah menghasilkan “*Montivideo Convention of the Rights and Duties of States,*” yang selanjutnya lebih dikenal dengan Konvensi Montevideo. Konvensi ini menetapkan unsur-unsur pokok negara yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Dilihat dari bentuknya, negara bisa dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan (*unitary state*) dan negara serikat (*federation state*). Dalam negara kesatuan tidak dikenal adanya negara bagian (tidak ada negara dalam negara), yang ada adalah daerah otonom dan wilayah administratif seperti “*propinsi*” dan “*kabupaten atau kota*”.

Dalam negara serikat, dikenal adanya “*negara bagian*” (terdapat negara dalam negara). Dengan demikian ada pemerintah negara bagian ada pula pemerintah federal (pemerintah pusat) yang membawahi semua negara bagian. Pemerintah federal biasanya memegang kekuasaan bidang pertahanan dan keamanan, moneter, politik luar negeri, serta peradilan. Urusan lain di luar keempat bidang tersebut biasanya menjadi wewenang pemerintah negara bagian.



*Peta wilayah Indonesia
Sabang sampai Merauke terdiri lebih dari 17.000 pulau
32 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten/kota
Sumber: santospalanti.files.wordpress.com/2008/08/pet.*

4. Fungsi Negara

Harold Laski menyatakan bahwa fungsi negara adalah menciptakan keadaan supaya rakyat dapat tercapai keinginannya secara maksimal. Terlepas dari ideologi yang dianutnya, menurut Harold Laski setiap negara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. *Penertiban*. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan sesama warga negara.
- b. *Kesejahteraan*. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- c. *Pertahanan*. Menjaga kemungkinan serangan dari luar bagi negaranya.
- d. *Keadilan*. Menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Menurut Charles E. Merriam fungsi negara ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. *Keamanan ekstern*. Keamanan ekstern, untuk mencegah ancaman dari luar.
- b. *Ketertiban intern*. Ketertiban intern, untuk ketertiban dalam negeri
- c. *Keadilan*. Keadilan bagi seluruh warga negara.

- d. *Kesejahteraan umum*. Kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
- e. *Jaminan kebebasan*. Menjamin kebebasan tiap warga negara berdasar hak asasi manusia.

5. Sifat Negara

a. Sifat memaksa

Sifat memaksa harus dimiliki oleh negara agar peraturan perundang-undangan ditaati dan ketertiban masyarakat tercapai, serta timbulnya *anarkhi* dapat dicegah. Sarana yang digunakan antara lain adalah polisi, tentara, jaksa dan hakim.

b. Sifat mencakup semua

Sifat mencakup semua, dibutuhkan agar semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Tentu saja dalam batas wilayah kekuasaan suatu negara. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

c. Sifat monopoli

Sifat monopoli ini terkait dengan kewenangan negara untuk menentukan arah serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Tujuan negara biasanya untuk kemakmuran bagi seluruh warga negaranya. Adapun cara-cara untuk mencapainya biasanya ditetapkan dan dimonopoli oleh negara.



Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk mengunjungi Markas Komando (Mako) Koarmatim yang terletak diutara Kota Surabaya.

Sumber: kabarin.files.wordpress.com/.../tni-armatim.jpg



Sejumlah penerbang dari TNI AU berbaris saat upacara peringatan HUT ke-62 TNI AU

Sumber: www.hinamagazine.com/.../2008/04/tni-au.jpg



*Parade kekuatan TNI AD pada peringatan hari TNI
Sumber: www.hinamagazine.com/.../2008/04/tni-au.jpg*

6. Unsur-Unsur Negara

a. Wilayah

Setiap negara menduduki wilayah tertentu di muka bumi dan memiliki batas-batas wilayah yang jelas pula. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Oleh karena itu berdasar hukum internasional yang berlaku untuk negara kepulauan, wilayah laut selebar 12 mil diukur dari titik terluar, serta zona ekonomi eksklusif 200 mil.

b. Penduduk

Setiap negara pasti memiliki penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dari penduduk negara lain. Perbedaan ini nampak misalnya dalam kebudayaannya, dalam identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang mendorong kearah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat.

Sebaiknya Kamu Tahu

Menurut filsuf Perancis Ernest Renan: “Bahwa pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan suku, ataupun kesamaan ras. Akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama di masa depan”.

c. Pemerintahan

Setiap negara memiliki organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan berbagai peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Negara bersifat lebih permanen, sedangkan pemerintah biasanya silih berganti.

d. Pengakuan dari Negara Lain

Unsur penting yang keempat dari negara, yakni adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini penting karena negara perlu kerjasama dengan negara lain. Di era sekarang ini sulit bagi suatu negara untuk bisa mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Tidak mungkin kerjasama dilakukan tanpa adanya pengakuan.



Gambar Istana Merdeka Jakarta pusat pemerintahan RI dari sinilah pemerintahan Republik Indonesia dikendalikan
Sumber: img99.imageshack.us/.../1002javabali006vw1.jpg

7. Prinsip dalam Bela Negara

Dalam kehidupan suatu negara, unsur pertahanan merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Jika sebuah negara tidak memiliki ketahanan nasional maupun pertahanan nasional yang kokoh, maka akan sulit untuk melangsungkan kehidupannya. Sikap bangsa Indonesia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuhnya adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidaksesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

4. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pesan konstitusi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
2. Tidak seorangpun dari warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang.
3. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan.
4. Penyelesaian pertikaian antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai.
5. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil.
6. Bangsa Indonesia menentang semua bentuk penjajahan.
7. Pertahanan Indonesia bersifat defensif aktif, artinya tidak agresif sejauh kepentingan nasional Indonesia tidak terancam.
8. Indonesia tidak terikat oleh pakta pertahanan dengan negara manapun.
9. Sistem pertahanan negara bersifat semesta. Dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
10. Pertahanan negara disusun berdasar prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.
11. Pertahanan negara didasarkan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial.

Sebaiknya Kamu Tahu

Usaha bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya: mengikuti pendidikan kewarganegaraan, mengikuti latihan dasar militer, mengabdikan diri sebagai prajurit TNI dan POLRI, mengabdikan diri sesuai dengan profesi.

8. Ancaman yang Dihadapi Indonesia

a. Ancaman yang bersifat umum

Dalam mencapai tujuan nasionalnya, suatu negara selalu akan menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dari dalam adalah, adanya kerawanan-kerawanan di dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri. Misalnya kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan, pengangguran, korupsi yang merajalela, mahalannya harga kebutuhan pokok dan sebagainya.. Ancaman yang datang dari luar negeri antara lain berupa:

- a. Keinginan negara besar untuk menguasai Indonesia, karena posisi Indonesia yang sangat strategis.
- b. Keinginan negara industri untuk menguasai Indonesia, karena kekayaan alam yang sangat melimpah dimiliki Indonesia.
- c. Arus globalisasi yang banyak menimbulkan kerawanan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, yang perlu kita waspadai dan kita antisipasi.



*Gambar Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta
lewat bandara penyelundupan narkoba dan psykotropika biasa dilakukan
dampaknya merusak anak bangsa*

b. Ancaman yang bersifat khusus

Subversi

Subversi adalah setiap tindakan yang bertujuan untuk mengganti falsafah negara, mengganggu keselamatan negara, serta merongrong kewibawaan negara.

Sasaran subversi mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, bisa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan dengan maksud merongrong pemerintah yang sah. Subversi bisa datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Infiltrasi

Infiltrasi adalah kegiatan penyusupan dari luar Indonesia untuk membuat kekacauan. Penyusupan dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Garis pantainya terbuka ke segala penjuru, sangat rawan untuk penyusupan.

Pemberontakan

Pemberontakan adalah usaha yang terorganisir dan bersenjata untuk memisahkan diri dari suatu negara karena ketidakpuasan. Misalnya dulu ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Pemberontakan biasanya dimulai dengan subversi dan bila berhasil menggalang kekuatan di dalam negeri sehingga dapat menimbulkan pemberontakan yang mengancam kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara.



Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

*Dulu GAM adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI
Sekarang Aceh telah kembali ke pangkuan NKRI*

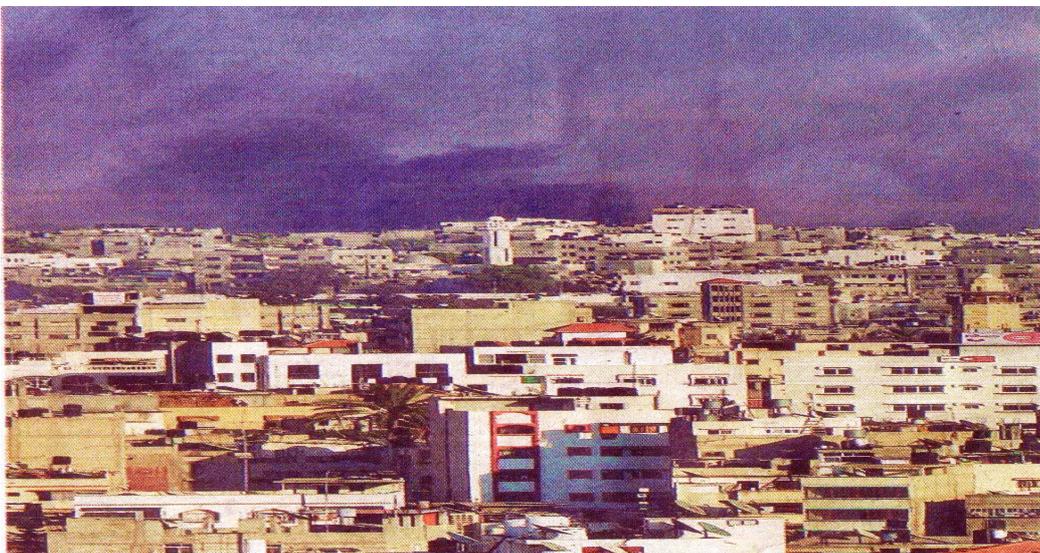
www.indonesia-1.com/gambar/news/gamAntaraa.jpg

Intervensi

Intervensi adalah campur tangan negara lain terhadap urusan dalam negeri suatu negara. Ini biasa dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang, negara kaya terhadap negara miskin.

Invasi

Invasi adalah serangan bersenjata terhadap wilayah suatu negara, dengan tujuan untuk menguasai wilayah. Invasi akan dilaksanakan bila subversi dan infiltrasi ke wilayah suatu negara telah berhasil.



*Serangan militer AS terhadap Irak
contoh invasi terhadap suatu negara tanpa mandat PBB
Sumber: swaramuslim.net/.../war/War-20041219-7.jpg*



*Korban Invasi Amerika Serikat di Irak
Sumber: swaramuslim.net/.../war/War-20041219-7.jpg*



*Korban serangan Israel di jalur Gaza
Banyak warga sipil meninggal dunia
Sumber: <http://albertjoko.files.wordpress.com>*

Rangkuman

- Menurut Kranenburg, negara pada hakekatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.
- Bela negara adalah, tekad dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri yang dapat membahayakan kelangsungan NKRI.
- Dalam kehidupan suatu negara, unsur pertahanan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidupnya.
- Untuk mencapai tujuan nasionalnya, suatu negara selalu akan menghadapi berbagai rintangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, bersifat langsung maupun tidak langsung.
- Rintangan dan ancaman tersebut harus dihadapi oleh seluruh rakyatnya, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.
- Setiap bangsa yang telah membentuk negara, dimana saja dan kapan saja mempunyai keinginan dan kepentingan untuk melangsungkan hidupnya serta mencapai tujuan nasionalnya.
- Untuk keperluan itu, setiap bangsa mendambakan partisipasi aktif dari seluruh warga negaranya, partisipasi inilah yang disebut dengan bela negara.

Latihan

a. Tugas Mandiri

Kerjakan di Buku Tulismu

1. Jelaskan pengertian negara dengan kalimatmu sendiri!
2. Sebutkan syarat-syarat berdirinya negara!
3. Jelaskan sifat-sifat negara!
4. Jelaskan fungsi negara!
5. Jelaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia!
6. Mengapa negara perlu dibela?
7. Jelaskan ancaman dari luar yang dihadapi Indonesia saat ini!
8. Jelaskan ancaman dari dalam yang dihadapi Indonesia saat ini!
9. Mengapa separatisme (gerakan memisahkan diri dari NKRI) marak terjadi di Indonesia?
10. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri hal-hal berikut ini:
 - a.subversi
 - b.infiltrasi
 - c.pemberontakan
 - d.intervensi
 - e.invasi

b. Tugas Kelompok untuk Diskusi

Bagilah kelasmu menjadi 3 kelompok, selanjutnya setiap kelompok membuat makalah, dan dipresentasikan secara bergantian di kelas dengan bimbingan Bapak/Ibu guru.

Adapun topik diskusinya sebagai berikut:

1. Fungsi negara dan unsur-unsur negara.
2. Arti penting usaha pembelaan negara.
3. Partisipasi dalam usaha bela negara.

B. Bentuk-Bentuk Bela Negara

Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempersatukan seluruh wilayah Nusantara telah dimulai sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Puncak perjuangan itu adalah Proklamasi Kemerdekaan

Sejarah pembelaan negara Indonesia, sejak zaman penjajahan hingga saat ini, telah banyak memberikan pengalaman. Pengalaman tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.



*Unjuk rasa untuk mengusut kasus KKN
Bentuk bela negara yang konkrit.
Sumber: JAWA POS - RADAR BROMO*

1. Bela Negara untuk Mengusir Penjajah

- a. Perlawanan rakyat di Palembang (1816).

- b. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Pattimura di Ambon (1819).
- c. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Imam Bonjol (1821-1837).
- d. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro (1825-1830).
- e. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Teuku Umar (1873-1904).
- f. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja (1905).

Lebih konkrit lagi, bela negara pada era penjajahan tersebut dapat didiskripsikan sebagai berikut:

a. Perang Banten

Perlawanan rakyat Banten tahun 1506 terhadap Belanda terjadi karena sikap Belanda yang kasar dan tidak sopan, rakyat juga diwajibkan menyerahkan lada secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam perang ini Belanda berhasil diusir dari Banten.

b. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa (Raja Banten 1651-1682)

Perang ini dimaksudkan untuk membebaskan Jayakarta dari tangan Belanda. Namun usaha ini gagal dan Jayakarta masih tetap di tangan Belanda.

c. Perang Makasar

Perang ini terjadi pada tahun 1666-1669 dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin untuk mengusir Belanda dari bumi Makasar. Namun perang ini tetap dimenangkan oleh Belanda, sehingga Belanda tetap menduduki Makasar.

d. Perang Suropati

Perlawanan Suropati terjadi tahun 1686-1703 di bawah pimpinan Untung Suropati untuk membebaskan Jawa Timur dari cengkeraman Belanda. Namun usaha ini gagal dan Belanda dapat mematahkan perlawanan ini berkat politik adu domba.

e. Perang Maluku

Perang ini terjadi tahun 1817. Rakyat Maluku dibawah pimpinan Thomas Matulesy yang lebih populer dengan nama Pattimura berperang melawan Belanda untuk membebaskan Maluku dari penjajahan Belanda. Akan tetapi usaha ini juga mengalami kegagalan.

f. Perang Paderi

Terjadi tahun 1821-1837 dalam rangka mengusir penjajah Belanda di Minangkabau Sumatera Barat. Perang ini terjadi antara kaum Paderi di bawah

pimpinan Imam Bonjol dengan Belanda. Perang ini sempat membuat Belanda kewalahan, meskipun akhirnya Belanda yang menang.

g. Perang Diponegoro

Terjadi tahun 1825-1830 di Jawa Tengah. Perang ini terjadi antara rakyat Jawa Tengah di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Perang ini sempat menguras kas keuangan Belanda. Perang di menangkan oleh Belanda setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan di buang ke Makasar hingga wafat.

h. Perang Bali

Perang Bali terjadi tahun 1846, rakyat Bali di bawah pimpinan raja Buleleng dan patih Gusti Jelantik berperang melawan Belanda. Demikian juga raja Karangasem melancarkan perang *Puputan*, yaitu perang sampai keluarga dan pengikutnya gugur demi mengusir penjajah Belanda dari bumi Bali. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda.

i. Perang Banjar

Terjadi tahun 1859-1863 di Banjar, Kalimantan Selatan. Perang terjadi antara rakyat Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah melawan Belanda. Belanda keluar sebagai pemenang meskipun sempat mengalami kesulitan.

j. Perang Aceh

Terjadi tahun 1873-1904. Perang ini dipimpin oleh Teuku Cik Di Tiro, Panglima Polem, Teuku Umar dan isterinya Cut Nya' Dhien. Perang ini adalah perang yang amat melelahkan bagi Belanda dan merupakan perang terakhir dalam rangka mewujudkan cita-citanya.

k. Perang Tapanuli

Terjadi tahun 1878-1907 di Tapanuli. Perang ini terjadi antara kerajaan Batak di bawah pimpinan raja Sisingamangaraja XII dengan Belanda. Perang ini berakhir setelah raja Sisingamangaraja gugur di medan perang pada tanggal 17 juni 1907.

Sebaiknya Kamu tahu

Perjanjian bersejarah bagi Indonesia.

(Perjanjian ini erat kaitannya dengan kronologis sejarah perjuangan bangsa Indonesia)

1. Perjanjian Bongaya tahun 1666

Isi Perjanjian: Raja Hasanuddin dari Makasar menyerah pada VOC.

2. Perjanjian Jepara tahun 1676

Isi Perjanjian: Sultan Amangkurat II Raja Mataram harus menyerahkan pesisir Utara Jawa.

3. Perjanjian Gianti tahun 1755

Isi Perjanjian: Mataram dibagi menjadi dua bagian yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

4. Perjanjian Salatiga tahun 1757

Isi Perjanjian: Surakarta di bagi menjadi dua bagian Kasunanan dan Mangkunegaran.

5. Perjanjian Kalijati tahun 1942

Isi Perjanjian: Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

6. Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947

Isi Perjanjian:

- Belanda mengakui kedaulatan RI atas Sumatera, Jawa dan Madura.
- Belanda dan RI bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat.

7. Perjanjian Renville tanggal 7 Januari 1948

Isi Perjanjian: RI mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada Agresi I menjadi daerah Belanda.

8. Perjanjian KMB tanggal 23 Agustus 1949.

Isi Perjanjian: Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

9. Perjanjian New York tanggal 5 Agustus 1962

Isi Perjanjian: Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB. Akan diadakan penentuan pendapat masyarakat Irija.

10. Perjanjian Bangkok tanggal 11 Agustus 1966

Isi Perjanjian: RI menghentikan konfrontasi dengan Malaysia

2. Bela Negara Setelah Proklamasi Menegakkan NKRI

Sejak tahun-tahun pertama sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah terjadi pemberontakan secara berturut-turut. Pemberontakan tersebut bertujuan menggulingkan Negara Kesatuan RI, mengganti Pancasila dengan ideologi lain, serta separatisme (mendirikan negara tersendiri lepas dari Negara Kesatuan RI).

Adapun secara rinci berbagai pemberontakan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung.
- b. Republik Maluku Selatan (RMS).
- c. Pemberontakan PKI Madiun.
- d. Pemberontakan DI/TII
- e. Pemberontakan PRRI/Permesta.
- f. Pemberontakan G 30 S-PKI.
- g. Pemberontakan Andi Azis.
- h. Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
- i. Gerakan separatis Papua Merdeka.

Berbagai pemberontakan baik yang datang dari luar maupun dari dalam tersebut dapat diatasi oleh bangsa Indonesia. meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar baik nyawa maupun harta. Terbukti sampai hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdiri tegak.



*Petani yang tekun dengan profesinya sehingga membuat Indonesia swasembada pangan, adalah bentuk bela negara yang nyata.
Sumber: Saifularif.com/blog/images/stories/petani.jpg*

3. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

Berdasarkan pengalaman sejarah bela negara seperti di atas maka disusunlah suatu sistem bela negara yang dikenal dengan “*Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta*” (Sishankamrata).

Secara kronologis lahirnya Sishankamrata dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Pada tanggal itu juga berarti telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya mewarisi jajahan Belanda membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan jiwa patriotis rakyat membentuk Laskar Perjuangan dan Barisan Keamanan Rakyat.

Ketika pada bulan September 1945 tentara *Sekutu* datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda, maka seluruh rakyat melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indonesia walaupun kalah dalam bidang persenjataan, tetapi unggul dalam bidang moril dan semangat perjuangan, yang secara sadar dan rela bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan tanah airnya.

Kesadaran untuk mempertahankan negara dan bangsanya itu sesungguhnya telah dimiliki oleh seluruh rakyat, terbukti dengan:

1. Kerelaan rakyat untuk meninggalkan keluarga, kedudukan dan hartanya untuk bergabung dalam suatu kekuatan menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar.
2. Rakyat yang tidak ikut bertempur di garis depan menyediakan pangan dan tempat perlindungan untuk kepentingan mereka yang berjuang di garis depan.
3. Setelah Belanda dan Inggris berhasil menguasai kota-kota, rakyat yang terdiri dari para orang tua, para wanita dan anak-anak, mengungsi keluar kota sebagai pertanda bahwa mereka lebih baik menderita daripada dijajah kembali. Keikutsertaan seluruh rakyat untuk membela bangsa dan negaranya sesuai kemampuan masing-masing inilah yang dimaksud dengan Sishankamrata.

Sebaiknya Kamu Tahu

Jenderal Sudirman, sebagai bapak TNI

Lahir 24 Januari 1916 di Purbalingga. Beliau tercatat sebagai panglima sekaligus jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat bangsa di atas kepentingan pribadi. Beliau yang dalam keadaan sakit dan lemah tetap memimpin gerilya, walaupun harus ditandu. Panglima besar ini meninggal di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pemerintah RI menganugerahkan gelar pahlawan nasional.



*Siskamling
adalah bentuk sishankamrata yang konkrit*
Sumber: <http://desa-kamalan.blogspot.com/2008/01/pos-siskamling-patrolan>

4. Bentuk-Bentuk Peraturan Bela Negara di Indonesia

a. Peraturan Bela Negara dalam UUD 1945 Setelah Amandemen IV

- a. *Pasal 27 Ayat 3.* Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- b. *Pasal 30 Ayat 1.* Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- c. *Pasal 30 Ayat 2.* Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara), dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- d. *Pasal 30 Ayat 3.* TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- e. *Pasal 30 Ayat 4.* Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
- f. *Pasal 30 Ayat 5.* Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebaiknya Kamu tahu

Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan RI

Pokok-pokok Hankam tertuang di dalam Bab XII tentang pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 UUD 1945 yang telah diamandemen yang terdiri dari 5 ayat yaitu:

- a) Susunan, kedudukan, hubungan kewenangan antara TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara, serta hal-hal lain yang terkait dengan Hankam diatur dengan undang-undang.
- b) Tugas TNI sebagai alat negara mempertahankan, melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI.
- c) Tugas Polri sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- d) Hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- e) Sistem yang dipakai adalah Sishankamrata, yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.

b. Peraturan Bela Negara dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000

Berdasar UUD 1945 yang telah diamandemen, maka ABRI telah dipisah, yaitu menjadi TNI dan Polri (berdasar TAP MPR No. VI/MPR/2000) yang intinya sebagai berikut:

- a) TNI memegang fungsi pertahanan;
- b) Polri bertugas dalam bidang keamanan dalam negeri;
- c) Bila Polri merasa perlu untuk mendapat bantuan, maka dapat, meminta bantuan pada TNI.

Sejak reformasi bergulir, TNI dan Polri mulai mengadakan pembenahan diri melalui redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi. Salah satu contohnya adalah penempatan personil TNI untuk jabatan di lembaga non-TNI akan didasarkan

pada kemampuan individu yang bersangkutan sebagai putra bangsa terpilih melalui proses pemilihan sesuai prosedur yang berlaku umum dan bersifat transparan. Personil yang menjabat di lembaga non-TNI tersebut harus pensiun dini dari dinas aktif TNI. Contoh lainnya adalah dihapuskannya fraksi TNI di DPR dan DPRD.

Tujuan Hankam di era reformasi adalah terwujudnya pertahanan dan keamanan yang efektif, tanggap terhadap ancaman dari luar dan dalam, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terbentuknya TNI dan Polri yang profesional, memiliki personil yang berdedikasi tinggi.

Sebaiknya Kamu Tahu	
Semboyan TNI dan Polri	
1. TNI Angkatan Darat Semboyan: <i>Kartika Eka Paksi</i> Artinya: Kekuatan, Kesatuan, Kesetiaan	3. TNI Angkatan Udara Semboyan: <i>Swa Bhuwana Paksa</i> Artinya: Sayap Tanah Air
2. TNI Angkatan Laut Semboyan: <i>Jalesveva Jayamahe</i> Artinya: di Laut Kita Jaya	4. Kepolisian RI Semboyan: <i>Rastra Sewakotama</i> Artinya: Abdi Utama bagi Nusa Bangsa

d. Peraturan Bela Negara dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 68:

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bela Negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

- a. *Pasal 9 ayat (1):* Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- b. *Pasal 9 ayat (2):* Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- 1) pendidikan kewarganegaraan
- 2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
- 3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib
- 4) pengabdian sesuai profesi

Perlu diketahui hingga saat ini undang-undang yang mengatur bela negara lewat 4 hal di atas belum ada.

- c. *Pasal 9 ayat (3)*: Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.
- d. *Pasal 2*: Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
- e. *Pasal 4*: Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

5. Bela Negara untuk Mengisi Kemerdekaan

Agar kalian dapat berpartisipasi untuk melakukan bela negara secara konkrit sesuai kapasitas kalian, berikut ini diberikan beberapa contoh:

a. Upaya Bela Negara terhadap Ancaman Penyalahgunaan Narkotika

Jauhi Narkotika, belajarlah yang rajin dan bersungguh-sungguh itu sudah merupakan bentuk nyata bela negara yang bisa kalian lakukan. Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika sungguh sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika ini, sangat merusak masyarakat. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa harus diselamatkan dari ancaman ini. Sebab, merekalah harapan bangsa, yang akan menggantikan generasi tua memimpin dan membawa bangsa ini kearah kemajuan. Jika generasi muda hancur, maka hancur pulalah bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan para pejuang dengan berbagai pengorbanan yang luar biasa ini. Kita tidak ingin negara kita hancur. Oleh karena itu, kita bela negara kita dari ancaman narkotika. Upaya bela negara yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika ini, antara lain:

- 1) Terus menerus secara gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan masyarakat tentang bahaya narkoba;
- 2) Terus menerus secara gencar melakukan kampanye anti narkoba;
- 3) Tindakan yang tegas dari Pemerintah terhadap setiap pelaku yang membawa, memakai, terlebih yang mengedarkan narkoba;
- 4) Masyarakat mendukung penuh terhadap sikap tegas Pemerintah dalam memberantas setiap tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba, antara lain dengan memberikan informasi kepada aparat keamanan;
- 5) Pemerintah, segenap aparatur negara, pemimpin dan tokoh masyarakat, guru dan dosen, orang tua dan setiap orang yang dituakan, harus memberi contoh dan teladan yang baik melalui setiap tutur kata, sikap, dan perlakunya;
- 6) Perhatian, kepedulian, dan kasih sayang yang penuh dari orang tua terhadap anaknya, dari pemimpin terhadap yang dipimpin, dan juga dari sesama anggota masyarakat.

b. Upaya Bela Negara terhadap Ancaman KKN

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga merupakan ancaman bagi bangsa dan negara, bukan saja dapat merusak perekonomian negara, tetapi juga merusak moral dan mental bangsa. Oleh sebab itu, KKN juga harus diberantas. Pemerintah juga harus tegas terhadap orang-orang yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Demikian juga masyarakat, baik melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ORMAS (Organisasi Masyarakat), Partai Politik, Lembaga perwakilan Rakyat, Lembaga Pendidikan, perorangan, maupun kelompok-kelompok masyarakat yang lain, harus terus aktif menanamkan semangat anti KKN pada masyarakat, memberi informasi adanya praktik KKN yang diketahuinya pada aparat penegak hukum, dan terus menerus mendorong serta mengawal pemerintah untuk melakukan upaya pemberantasan KKN secara terus menerus. Kalimat terlalu panjang

c. Upaya Bela Negara terhadap Ancaman Perusakan Lingkungan

Antara manusia dengan lingkungan merupakan dua hal yang saling berhubungan, berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi. Jika manusia menjaga dan merawat lingkungannya dengan baik, maka lingkungan tersebut akan

memberikan pengaruh dan manfaat yang positif bagi manusia. Tetapi sebaliknya, apabila manusia tidak menjaga dan bahkan merusaknya, maka lingkungan tersebut akan mendatangkan bencana bagi manusia. lingkungan yang rusak juga merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya pembelaan negara. Sebab, dengan lingkungan hidup yang baik, akan berakibat kepada kualitas hidup warga negaranya menjadi lebih baik.

d. Upaya Bela Negara terhadap Ancaman Kemiskinan

Salah satu tujuan negara kita adalah memajukan kesejahteraan umum, itulah sebabnya pemerintah harus berusaha sekuat tenaga untuk memberantas kemiskinan di negeri kita. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh semua pihak, baik oleh pelaku ekonomi (pengusaha) maupun oleh masyarakat, harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Pemerintah membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai fasilitas, memberikan arahan dan bimbingan, menciptakan iklim usaha yang baik, dan lain-lain sesuai kewenangannya. Pengusaha bekerja keras agar dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Sedangkan masyarakat bekerja keras untuk terus meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.

e. Upaya Bela Negara terhadap Ancaman Kebodohan

Bangsa yang bodoh akan mudah dipermainkan dan diombang-ambingkan oleh bangsa yang pintar (maju). Oleh karena itu, kita juga harus memberantas kebodohan. Untuk itu, pemerintah harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi rakyatnya. Negara yang sekarang ini berhasil menjadi negara yang maju, ternyata pada umumnya disebabkan oleh pendidikan mereka yang baik. Oleh sebab itu tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau kita ingin memberantas kebodohan maka kita harus memperbaiki kualitas pendidikan di negara kita sendiri. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut diimbangi dengan upaya yang keras pula dari semua pelaku pendidikan, termasuk pendidik dan pelajarnya, untuk terus meningkatkan kualitas belajar mengajarnya.

f. Upaya Bela Negara terhadap Lunturnya Persatuan Bangsa

Lunturnya persatuan dan kesatuan jelas akan mengancam keutuhan dan keselamatan bangsa dan Negara kesatuan republik Indonesia. Masih ingatkah kalian, sejarah perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah persatuan dan kesatuan. Jadi, apabila semangat persatuan dan kesatuan bangsa luntur, maka akan mengancam keutuhan dan keselamatan bangsa. Terlebih bangsa kita merupakan bangsa yang majemuk (heterogen), yakni bangsa yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Oleh karena itu, semua pihak harus menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini, dengan cara tidak menonjolkan dan memperuncing perbedaan, tetapi kita tonjolkan dan perkuat persamaan diantara kita. Sehingga dengan demikian akan terwujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis, rukun, bersatu, dan damai.

g. Upaya Bela Negara terhadap ancaman Budaya Asing yang Negatif

Salah satu dampak dari adanya globalisasi adalah masuknya budaya asing ke Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti pola hidup individualis dan hedonis yang dapat merusak dan mengancam keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa.

Pola hidup individualistis, hanya mementingkan diri sendiri, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung kebersamaan, dan gotong royong. Kehidupan yang bebas sebebas-bebasnya jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang memandang bahwa kebebasan manusia selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Demikian pula dengan pola hidup hedonis, yang mengutamakan kehidupan keduniawian dan kebendaan, juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rokhani.

h. Upaya Bela Negara untuk Mengharumkan Nama Bangsa di Mata Dunia

Di samping upaya bela negara untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di atas, upaya pembelaan negar juga dapat dilakukan dalam rangka mengharumkan nama bangsa di mata internasional.

Di bidang olah raga misalnya, perjuangan tim bulu tangkis Indonesia untuk merebut dan mempertahankan piala Thomas dan Uber merupakan uapaya bela negara untuk mengharumkan nama bangsa di bidang olah raga.

Demikian juga di bidang seni budaya, keikutsertaan beberapa penyanyi Indonesia dalam festifal tingkatn dunia misalnya, merupakan wujud upaya bela negara. begitu pula halnya dalam festifal film, baik di tingkat Asia maupun dunia, semua itu merupakan wujud bela negara di bidang seni budaya.

Selain itu, upaya bela negara demi mengharumkan nama bangsa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dapat dilihat dari kegigihan pelajar-pelajar Indonesia dalam olympiade matematika atau fisika tingkat dunia. mereka semua merupakan pejuang-pejuang yang membela keharuman nama bangsa dan negara.

Upaya membela negara warga negara sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan upaya mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dan serangan musuh, melainkan merupakan upaya warga negara untuk mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia di segala bidang. Contoh tindakan yang menunjukkan upaya membela negara dapat dilihat dari perjuangan putra dan putrid Indonesia, baik di bidang pertahanan keamanan maupun di bidang lain

1. Sejarah, telah banyak memberikan pengalaman untuk menyusun suatu sistem pembelaan negara yang mampu menanggulangi setiap ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Pengalaman tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bela negara terhadap ancaman dari luar dan bela negara terhadap ancaman dari dalam.
3. Berdasarkan pengalaman sejarah bela negara seperti di atas maka disusunlah suatu sistem bela negara yang dikenal dengan “Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta” (Sishankamrata).
4. Ketentuan bela negara dalam UUD 1945 Amandemen IV:
 - a. Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - b. Pasal 30 Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Pasal 30 Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara), dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
 - d. Pasal 30 Ayat 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
 - e. Pasal 30 Ayat 4. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
5. Ketentuan bela negara dalam UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara:
 6. Pasal 9 ayat (1): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
 7. Silih bergantinya berbagai pemberontakan dan cobaan baik yang datang dari luar maupun dari dalam tersebut dapat diatasi oleh bangsa Indonesia meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar baik nyawa harta maupun tenaga, sehingga sampai hari ini negara kesatuan Republik Indonesia masih berdiri tegak

a. Tugas Mandiri

1. Berikan contoh bela negara yang pernah dilakukan bangsa Indonesia terhadap ancaman dari luar!
2. Berikan contoh bela negara yang pernah dilakukan bangsa Indonesia terhadap ancaman dari dalam !
3. Apa yang kamu ketahui tentang Sishankamrata?
4. Sebutkan ketentuan bela negara menurut UUD 1945 sebelum amandemen!
5. Sebutkan ketentuan bela negara menurut UUD 1945 setelah amandemen!
6. Jelaskan ketentuan bela negara berdasar UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia!

Jelaskan ketentuan bela negara berdasar UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan!

b. Tugas Kelompok

Kerjakan bersama dengan teman-temanmu latihan berikut ini:

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan RI sebagai satu kesatuan pertahanan. Komponen dalam pertahanan negara ada 3, yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Berikan penjelasan secukupnya mengenai:

Komponen Utama terdiri dari:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Komponen Cadangan terdiri dari:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Komponen Pendukung terdiri dari:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

C. Berpartisipasi dalam Usaha Bela Negara

1. Bela Negara di Lingkungannya Masing-Masing

Upaya pembelaan negara bukan hanya berkaitan dengan mempertahankan negara saja, melainkan upaya memajukan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, maka segala bentuk partisipasi yang memberi dampak positif bagi keutuhan, kemajuan, kejayaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, merupakan wujud bela negara dari warganya.

a. Bela Negara dalam Keluarga

Upaya dari setiap anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menolong dan saling mengasihi satu terhadap yang lain, merupakan sikap yang dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin bagi keluarga tersebut. Kondisi keluarga yang rukun dan bahagia ini merupakan wujud partisipasi mereka dalam menciptakan ketentraman dan kedamaian keluarga. Upaya menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga ini sudah merupakan bentuk partisipasi dalam upaya pembelaan negara di lingkungannya.

b. Bela Negara di Sekolah

Apabila seorang pelajar belajar dengan tekun dan penuh semangat untuk memperdalam keimanan dan ketaqwaannya serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai minatnya masing-masing maka sudah merupakan upaya pembelaan negara yang nyata. Sebab kesungguhan dalam belajar tersebut kelak akan menghasilkan generasi yang taqwa, cerdas dan terampil guna membangun bangsa dan negara.

c. Bela Negara dalam Masyarakat

Saling membantu, tolong menolong, tenggang rasa dan menjaga keharmonisan antar warga merupakan hal-hal yang dapat mewujudkan ketentraman masyarakat. Kondisi tenteram ini akan dapat menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Hal seperti ini sudah merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara di lingkungannya.

d. Bela Negara di Bidang Lain

Perjuangan putra-putri Indonesia di bidang olah raga, seni budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi adalah bentuk nyata dari bela negara. Keberhasilan para pelajar Indonesia untuk memenangkan olimpiade fisika adalah contoh bela negara. Begitu juga perjuangan tim bulutangkis untuk memboyong pila Thomas Cup. Serta keberhasilan penyanyi Indonesia untuk memenangkan festival internasional.



*Inilah pahlawan bulu tangkis kita
Pasangan pebulu tangkis Markis Kido/Hendra Setiawan mempersembahkan medali
emasSumber: <http://www.badmintonottawa.com/WC-2007-pic>*

Sebaiknya Kamu Tahu

Patriotisme adalah sikap cinta tanah air dengan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara guna menjaga persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa

2. Berpartisipasi dalam Sishankamrata

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia, mengundang seluruh warga negara untuk berpartisipasi lewat berbagai jalur sebagai berikut:

a. Komponen Utama

Terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Prajurit TNI terdiri dari:

- a) Prajurit sukarela yang berdinasi jangka panjang sebagai prajurit karier;
- b) Prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai prajurit sukarela dinas pendek;
- c) Prajurit sukarela yang berdinasi secara penggal waktu sebagai prajurit cadangan sukarela;
- d) Prajurit wajib yang berdinasi selama 2 tahun penuh sebagai prajurit wajib;
- e) Prajurit wajib yang berdinasi secara penggal waktu paling lama 5 tahun, sebagai prajurit cadangan wajib;

Prajurit Polri terdiri atas:

- a) Prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka panjang sebagai prajurit karier;
- b) Prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka waktu paling lama 5 tahun sebagai prajurit sukarela dinas pendek.

b. Komponen Cadangan

Terdiri atas warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Yang dimaksud dengan

mobilisasi adalah tindakan pengerahan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

c. Komponen Pendukung

Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Selain bergabung menjadi bagian prajurit TNI dan Polri, keikutsertaan warga negara sebagai bagian dari Sishankamrata dapat pula dilakukan melalui keikutsertaan sebagai rakyat terlatih. Dalam hal ini rakyat terlatih berfungsi sebagai penjaga ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat. Yang termasuk dalam kategori rakyat terlatih adalah:

- a) Pertahanan Sipil (Hansip);
- b) Perlawanan Rakyat (Wanra);
- c) Keamanan Rakyat (Kamra);
- d) Resimen Mahasiswa (Menwa);
- e) Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah, Palang Merah Remaja, Palang Merah Indonesia, Tim SAR dan sebagainya.

Sebaiknya Kamu Tahu

Paham Bangsa Indonesia terhadap Perang

- Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam pembukaannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaannya. Oleh sebab itu bangsa Indonesia ingin hidup bersahabat dengan semua bangsa di dunia dan tidak menghendaki peperangan. Bangsa Indonesia memahami sepenuhnya bahwa penggunaan kekerasan senjata dalam usaha menyelesaikan persengketaan akan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia, baik bagi si pemenang, apalagi yang kalah. Oleh sebab itu dalam usaha memelihara perdamaian dunia serta mewujudkan aspirasi dan cita-cita kemerdekaannya, bangsa Indonesia ingin menyelesaikan setiap persengketaan secara damai, atas dasar saling menghormati dan saling pengertian akan martabat kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing bangsa.
- Bagi bangsa Indonesia perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh, setelah sejauh mungkin diusahakan untuk mencegahnya, dalam usaha mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan dan martabat bangsa Indonesia.



*Kapal perang milik Angkatan Laut RI,
Indonesia adalah negara maritim perlu armada laut yang tangguh
Sumber: <http://masbagus.wordpress.com/tentang-tni/tni-al/armada-kapal/nama-kri>*

3. Angkatan Perang RI sebagai Salah Satu Komponen Bela Negara

Pada sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan antara lain untuk membentuk tentara. Tetapi keputusan ini kemudian diubah dalam sidang PPKI ke-3 tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagai bagian dari Badan

Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Penggunaan nama tentara dihindari untuk menunjukkan politik damai Republik Indonesia terhadap pihak Sekutu yang menang perang. BKR bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di daerah-daerah. BKR tumbuh secara spontan dari bawah ,di daerah-daerah didorong oleh panggilan jiwa para pemuda, banyak diantaranya bekas Peta, Heiho, KNIL dan lain-lain. Mereka itu didorong untuk berbakti dan mengabdikan kepada bangsa dan negara yang kedaulatannya menghadapi ancaman pihak penjajah. BKR mempersenjatai, melengkapi, dan membekali diri sendiri serta di susun secara kedaerahan dan sedikit banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.

Baru pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk memperkuat peranan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bekas Mayor KNIL Urip Sumohardjo disertai tugas untuk membentuknya, dan diangkat sebagai kepala staf umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Pada tanggal 1 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), yang dapat diartikan memperluas dan memperdalam tugas tentara dari keamanan menjadi keselamatan dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya dalam rangka menjadikan Tentara Keselamatan Rakyat sebagai alat negara yang patuh kepada pemerintah, maka pada tanggal 25 Januari 1946 dikeluarkanlah maklumat yang mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Ditetapkan bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi militer di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan disusun atas dasar militer internasional.

Adanya dua macam tentara yaitu TRI sebagai tentara resmi di bawah Panglima Besar dan brigade-brigade kelaskaran di bawah Biro Perjuangan sangat merugikan perjuangan bangsa menghadapi ancaman Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkanlah Dekrit Presiden agar dalam waktu sesingkat-singkatnya mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi satu tentara. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam TNI ini tergabung TRI, kesatuan-kesatuan dan Biro Perjuangan, serta pasukan-pasukan bersenjata.

Sebaiknya Kamu Tahu

Perlunya Setiap Bangsa Memiliki Angkatan Perang

Sejarah telah membuktikan bahwa apabila, suatu negara ingin hidup damai, maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang. Apabila suatu negara hanya memperhatikan kesejahteraan saja, tetapi mengabaikan kepentingan pertahanan dan keamanannya, maka negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan oleh suatu negara kecil lainnya, yang sudah siap untuk mengadakan perang. Kesiapan untuk berperang dapat merupakan faktor pencegah terhadap usaha perang dari musuh, yang berkeinginan untuk menyerang Indonesia.



*Pesawat tempur milik Angkatan Udara RI
Indonesia negara kepulauan dengan jumlah pulau yang amat banyak
Kekuatan udara sangat diperlukan.
Sumber: www.usafnukes.com/images*

4. Menyelesaikan Sengketa antar Negara sebagai Bentuk dari Bela Negara

Cobalah kalian identifikasikan beberapa peristiwa di dunia internasional yang menyangkut hubungan antar negara. Kalian masih ingat Perang Teluk dimana Irak menyerbu Kuwait, Perang Afghanistan, Perang di Bosnia, Keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah Malaysia, masalah Blok Ambalat, dan lain-lain. Mengapa semua itu terjadi? Tidak lain karena timbulnya sengketa. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah mengapa persengketaan itu terjadi?

Sengketa, timbul karena adanya tuntutan salah satu pihak yang ditolak, diingkari atau dituntut balik oleh pihak lainnya, baik tuntutan itu berkenaan dengan fakta, berkenaan dengan masalah politik maupun berkenaan dengan

masalah hukum. Jika ini terjadi, maka timbullah sengketa antarnegara. Sumber sengketa dapat berupa masalah teritorial, kehormatan nasional, atau sumber-sumber yang lain.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antar negara, yang jika dikelompokkan ada dua kelompok besar, yaitu *penyelesaian secara damai* dan *penyelesaian dengan jalan kekerasan*. Penyelesaian secara damai dapat ditempuh secara politik (misalnya perundingan, perantara, jasa-jasa baik, lewat campur tangan PBB), dan dapat ditempuh secara hukum, yaitu lewat Mahkamah Arbitasi atau lewat Mahkamah Internasional atau Pengadilan Internasional. Sedangkan penyelesaian dengan jalan kekerasan misalnya ditempuh jalan perang.

Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ungkapan di atas sangat populer di Indonesia pada masa Pemerintahan Bung Karno. Prinsip di atas menandakan bahwa dalam pergaulan internasional, Indonesia akan menerapkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain, namun jika kemerdekaan bangsa terancam maka kemerdekaan itu akan dipertahankan hingga titik darah penghabisan.

Prinsip hidup berdampingan secara damai ini bermakna juga bahwa jika terjadi sengketa antara negara-negara, hendaknya penyelesaiannya dilakukan secara damai. Prinsip Penyelesaian sengketa internasional secara damai ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum. Prinsip ini diatur di dalam dua buah deklarasi, yaitu Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antarnegara tanggal 24 Oktober 1970 dan Deklarasi Manila tanggal 15 Oktober 1982 mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai. Prinsip-prinsip yang diatur di dalam deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a). Prinsip bahwa negara *tidak akan menggunakan kekerasan* yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
- b). *Prinsip nonintervensi* dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
- c). *Prinsip persamaan hak* dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
- d). Prinsip persamaan kedaulatan negara.

- e). *Prinsip hukum internasional* mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara
- f). *Prinsip itikad baik* dalam hubungan internasional.
- g). *Prinsip keadilan* dan hukum internasional.

Sebaiknya Kamu Tahu

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif

Rangkuman

1. Upaya pembelaan negara bukan hanya berkaitan dengan mempertahankan negara saja, melainkan upaya memajukan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, maka segala bentuk partisipasi yang memberi dampak positif bagi keutuhan, kemajuan, kejayaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, merupakan wujud bela negara dari warganya.
2. Perjuangan putra-putri Indonesia di bidang olah raga, seni budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi adalah bentuk nyata dari bela negara. Keberhasilan para pelajar Indonesia untuk memenangkan olimpiade fisika adalah contoh bela negara. Begitu juga perjuangan tim bulutangkis untuk memboyong pila Thomas Cup. Serta keberhasilan penyanyi Indonesia untuk memenangkan festival internasional.
3. Sejarah telah membuktikan bahwa apabila, suatu negara ingin hidup damai, maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang. Apabila suatu negara hanya memperhatikan kesejahteraan saja, tetapi mengabaikan kepentingan pertahanan dan keamanannya, maka negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan oleh suatu negara kecil lainnya, yang sudah siap untuk mengadakan perang. Kesiapan untuk berperang dapat merupakan faktor pencegah terhadap usaha perang dari musuh, yang berkeinginan untuk menyerang Indonesia.
3. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia, mengundang seluruh warga negara untuk berpartisipasi lewat berbagai jalur sebagai berikut:
 - **Komponen Utama**
Terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara

➤ **Komponen Cadangan**

Terdiri atas warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Yang dimaksud dengan mobilisasi adalah tindakan pengerahan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

➤ **Komponen Pendukung**

Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Latihan

a. Tugas Individu

1. Jelaskan paham bangsa Indonesia tentang perang!
2. Mengapa setiap bangsa dan negara harus memiliki angkatan perang/ angkatan bersenjata?

Uraikan sejarah terbentuknya serta perkembangan angkatan perang/ angkatan bersenjata Republik Indonesia!

b. Tugas Kelompok

1. Cari penyebab sumber-sumber sengketa antar negara!
2. Cari dan temukan Keputusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, mengenai: (a) Isi keputusannya, (b) Dasar pertimbangannya.
3. Dalam rangka menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Lingitan, kedua negara sepakat untuk menyelesaikannya lewat Mahkamah Internasional. Singkat kata, dalam penyelesaian lewat Mahkamah tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. (a) Diskusikan bagaimana pendapat kelompok kalian terhadap putusan itu? (b) Ungkapkan bagaimana sikap kalian terhadap keputusan itu?

D. Glosarium

<i>De facto</i>	: yang sesungguhnya. Pemerintahan de facto: adalah pemerintahan yang berkuasa atas rakyat dan diakui oleh rakyat itu, apakah sah menurut hokum ataupun tidak.
<i>De Jure</i>	: menurut hukum
<i>Demografis, demografi</i>	: ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk
<i>Eksplorasi</i>	: pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.
<i>Ekstern</i>	: bersangkutan paut dengan hal-hal luar.
<i>Geografi</i>	: ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna serta hasil yang diperoleh dari bumi.
<i>Geografis</i>	: bersangkutan paut dengan geografi.
<i>Historis</i>	: berkenaan dengan sejarah
<i>Intern</i>	: bersangkutan paut dengan hal-hal dari dalam, kalangan sendiri.
<i>Intervensi</i>	: campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak.
<i>Invasi</i>	: Hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud mernguasai negara tersebut
<i>Infiltrasi</i>	: penyusupan, campur tangan negara luar, tidak biperbolehkan oleh PBB
<i>Monopoli</i>	: mempunyai hak tunggal untuk mengusahakan sesuatu.
<i>Personal rights</i>	: hak-hak asasi pribadi.
<i>Property rights</i>	: hak-hak asasi ekonomi.
<i>Political rights</i>	: hak-hak asasi politik
<i>Sishankamrata</i>	: Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
<i>Social and cultural rights</i>	: hak-hak asasi sosial dan budaya
<i>Subversi</i>	: usaha menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara di luar UU.

E. Evaluasi

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara menyilang huruf di depannya

1. Diantara sifat-sifat negara adalah seperti berikut, kecuali.....
 - a. memaksa
 - b. monopoli
 - c. mengayomi
 - d. mencakup semua

2. Orang yang berada di wilayah suatu negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal sebagai penduduk sesuai peraturan yang ada, disebut....
 - a. rakyat
 - b. warga negara
 - c. warga negara pribumi
 - d. orang asing

3. Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat adalah ...
 - a. pemerintah yang sedang berkuasa
 - b. pemerintah yang otoriter
 - c. pemerintah sah
 - d. pemerintah tegas

4. Prinsip pertahanan yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah....
 - a. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan
 - b. Bangsa Indonesia cinta damai dari pada kemerdekaan
 - c. Bangsa Indonesia tidak cinta damai tapi cinta kemerdekaan
 - d. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi tidak cinta kemerdekaan

5. Kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah.....
 - a. TNI
 - b. Polri
 - c. TNI dan Polri
 - d. Seluruh rakyat Indonesia

6. Bela negara tidak hanya menyangkut pertahanan negara dari ancaman maupun serangan musuh melainkan termasuk upaya warga negara untuk....
 - a. memajukan bangsa dari segala bidang

- b. mempertahankan dari agresi negara lain
 - c. mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia dari segala bidang
 - d. memberikan pelatihan kemiliteran kepada semua warga negara khususnya generasi muda
7. Contoh partisipasi pelajar dalam bela negara adalah....
- a. belajar dengan tekun agar berhasil dalam mengikuti lomba olimpiade matematika sebagai duta bangsa Indonesia
 - b. berjuang melawan penjajah
 - c. menguasai ilmu kemiliteran
 - d. setiap saat siap untuk berjuang melawan musuh
8. Pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang bela negara adalah....
- a. 27 dan 28
 - b. 28 dan 30
 - c. 27 dan 30
 - d. 28, 30 dan 31
9. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah....
- a. Polisi
 - b. Tentara Nasional Indonesia
 - c. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
 - d. Seluruh rakyat Indonesia
10. Undang-undang yang mengatur tentang Pertahanan Negara adalah....
- a. UU Nomor: 2 tahun 2000
 - b. UU Nomor: 2 tahun 2002
 - c. UU Nomor: 3 tahun 2002
 - d. UU Nomor: 3 tahun 2003
11. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui seperti tersebut di bawah ini, kecuali....
- a. pendidikan kewarganegaraan
 - b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

- c. pengabdian sesuai dengan profesi
 - d. menggerakkan komponen pertahanan yang ada di masyarakat secara maksimal
12. Menurut Undang-undang Pertahanan Negara upaya bela negara selain kewajiban dasar manusia juga merupakan....
- a. hak yang dimiliki warga negara
 - b. kehormatan bagi setiap warga negara
 - c. tanggungjawab moral terhadap negaranya
 - d. kewajiban bagi setiap warga negara
13. Kewajiban warga negara terhadap bela negara sebagai wujud....
- a. pelaksanaan hak dan kewajiban
 - b. tanggung jawab pada bangsa dan negara
 - c. partisipasi warga negara pada bangsa dan negaranya
 - d. kewajiban bagi setiap warga negara
14. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip seperti berikut, kecuali....
- a. demokrasi
 - b. hak asasi manusia
 - c. kebersamaan
 - d. ketentuan hukum nasional
15. Perbuatan siswa yang tidak mencerminkan upaya bela negara antara lain....
- a. mengkonsumsi obat-obatan terlarang
 - b. belajar dengan sungguh-sungguh
 - c. menjadi atlet nasional
 - d. siap mengikuti lomba atletik internasional
16. Sekelompok manusia yang menjadi penghuni negara dan taat pada peraturan yang berlaku di negara tersebut disebut....
- a. negara
 - b. rakyat
 - c. wilayah
 - d. penduduk
17. Indonesia diakui sebagai negara secara hukum pada tanggal....
- a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 1 Juni 1945

- d. 5 Juli 1945
18. Bangsa Indonesia memilih bentuk negara....
- a. republik
 - b. sosialis
 - c. kesatuan
 - d. liberalis
19. Daerah kekuasaan suatu negara baik darat, laut maupun udara disebut....
- a. negara
 - b. wilayah
 - c. tempat
 - d. lahan
20. Dipandang dari segi asosiasi manusia, bahwa tujuan akhir setiap negara adalah....
- a. mencerdaskan rakyat
 - b. melindungi rakyat
 - c. terjaminnya hak-hak asasi manusia
 - d. menciptakan kebahagiaan rakyat
21. Fungsi negara merupakan tugas atau kegiatan yang harus dijalankan negara untuk....
- a. mencapai tujuan negara
 - b. terwujudnya masyarakat adil dan makmur
 - c. meraih misi dan misi
 - d. kemerdekaan yang mendasar
22. Suatu tugas atau kegiatan yang harus dijalankan negara untuk mencapai tujuan negara disebut....
- a. arah visi
 - b. asas negara
 - c. fungsi negara
 - d. kegiatan negara
23. Menurut Montesqui fungsi negara meliputi fungsi eksekutif, yaitu....
- a. membuat UU
 - b. memahami UU
 - c. melaksanakan UU

- d. mengawasi jalannya UU
24. Yang dimaksud pemerintahan daulat adalah....
- a. mempunyai UU
 - b. mempunyai tujuan
 - c. bersih dan berwibawa
 - d. mempunyai kekuasaan
25. Bangsa Indonesia dapat berdiri kokoh sampai saat ini tidak mungkin terjadi tanpa....
- a. ketahanan nasional
 - b. bantuan dari negara lain
 - c. pembangunan di segala bidang
 - d. pengorbanan dari para pahlawan
26. Tugas membela negara tidak hanya tugas para penjaga negara yaitu TNI tetapi tugas....
- a. HANSIP dan WANRA
 - b. pegawai pemerintahan saja
 - c. masyarakat dan aparat kepolisian
 - d. seluruh warga sesuai dengan profesinya masing-masing
27. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh....
- a. tata nilai sosial budaya, kondisi geografi, sejarah terbentuknya peristiwa politik
 - b. masyarakat yang dijadikan obyeknya
 - c. siapa yang menjadi presidennya
 - d. kekuatan dari TNI
28. Pemerintah Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil, presiden adalah....
- a. penguasa sentral
 - b. penguasa pemerintahan
 - c. penguasa di segala bidang
 - d. penyelenggara negar tertinggi
29. Sikap rela berkorban membela negara harus dilandasi dengan....
- a. kebencian
 - b. kekerasan
 - c. kesadaran

- d. kenikmatan
30. Tujuan negara Indonesia dijelaskan dalam....
- a. Pembukaan UUD 1945
 - b. UUD 1945
 - c. Pancasila
 - d. GBHN
31. Menguasai IPTEK dan peningkatan Sumber Daya Manusia seiring dengan tujuan negara yaitu....
- a. sejahtera lahir dan batin
 - b. melindungi segenap bangsa
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - d. menjadi bangsa yang kuat dan mandiri
32. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ir. Soekarno atas nama....
- a. rakyat Indonesia
 - b. bangsa Indonesia
 - c. pemerintahan Indonesia
 - d. warga negara Indonesia
33. Tentang kewajiban membela negara diatur dalam....
- a. UUD 1945
 - b. Peraturan presiden
 - c. Keputusan presiden
 - d. Peraturan pemerintah
34. Membela negara merupakan....
- a. hak warga negara
 - b. kewajiban setiap penduduk
 - c. hak dan kewajiban warga negara
 - d. hak dan kewajiban penduduk sebagai tuntutan negara
35. Setiap warga negara harus melindungi tanah air yaitu dengan....
- a. bertingkah laku yang baik
 - b. mempertahankan kemerdekaan
 - c. melestarikan berbagai macam budaya

- d. menyelamatkan negara dari bahaya yang mengancam
36. Kita harus menunaikan kewajiban terhadap negara karena....
- a. merupakan tuntutan negara
 - b. negara dalam keadaan bahaya
 - c. sebagai warga negara Indonesia
 - d. kita mendapat beberapa hak dari negara
37. Keselamatan bangsa dan negara menjadi tanggung jawab....
- a. TNI
 - b. Pemerintah
 - c. Semua warga negara
 - d. Warga negara yang memenuhi syarat
38. Apabila negara menghadapi bahaya, warga negara tanpa dipaksa wajib ikut serta dalam usaha membela negara, hal ini berarti memerlukan suatu....
- a. kesadaran
 - b. pengertian
 - c. keinsyafan
 - d. pemahaman



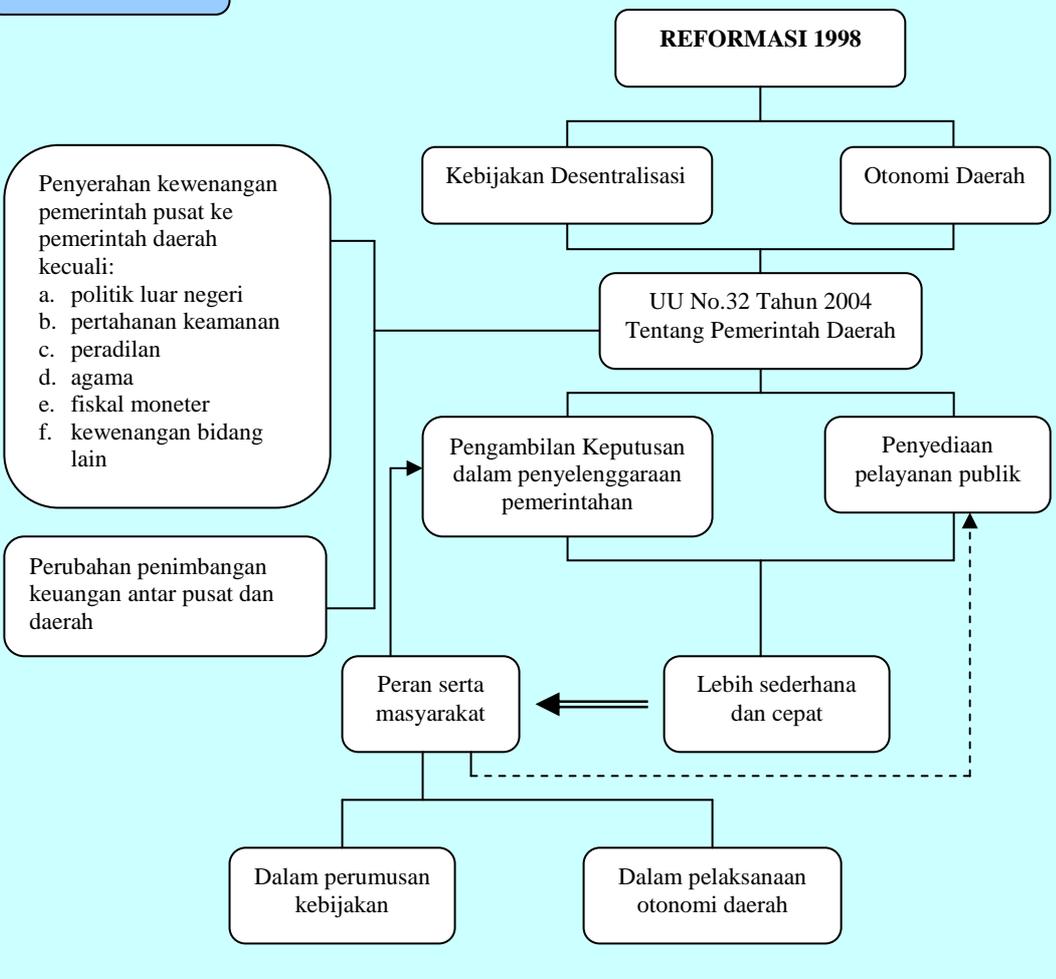
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa:

1. Memahami hakikat otonomi daerah.
2. Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.
3. Mampu berpartisipasi secara konkret dalam usaha mewujudkan cita-citacita otonomi daerah.

Peta Konsep



Kata kunci:

desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi daerah, partisipasi masyarakat, kebijakan publik, perumusan kebijakan publik.

Wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Kondisi yang demikian ini berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan serta kelancaran pelayanan negara terhadap rakyat. Daerah-daerah di Indonesia sebagian besar masih terbelakang karena wilayahnya belum dikelola dengan baik. Padahal di daerah banyak kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu perlu dibentuk daerah otonom, yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Dalam mengatur dan mengurus daerahnya pemerintah daerah harus melibatkan warga masyarakat.

Sebaiknya Kamu Tahu**Nama Provinsi di Indonesia**

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Aceh | 12. Jawa Barat | 23. Kalimantan Timur |
| 2. Sumatera Utara | 13. Banten | 24. Sulawesi Utara |
| 3. Sumatera Barat | 14. Jawa Tengah | 25. Gorontalo |
| 4. Riau | 15. D.I Yogyakarta | 26. Sulawesi Tengah |
| 5. Riau Kepulauan | 16. Jawa Timur | 27. Sulawesi Selatan |
| 6. Jambi | 17. Bali | 28. Sulawesi Tenggara |
| 7. Sumatera Selatan | 18. Nusa Tenggara Barat | 29. Sulawesi Barat |
| 8. Bangka Belitung | 19. Nusa Tenggara Timur | 30. Maluku |
| 9. Bengkulu | 20. Kalimantan Barat | 31. Maluku Utara |
| 10. Lampung | 21. Kalimantan Tengah | 32. Papua Barat |
| 11. DKI Jakarta | 22. Kalimantan Selatan | 33. Papua |

A. Hakikat Otonomi Daerah

Hanya sebagian kecil urusan publik sebuah negara yang dapat dikerjakan dengan baik oleh otoritas pemerintah pusat (John Stuart Mill).

1. Pengertian Otonomi

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Setiap daerah provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Provinsi, kabupaten dan kota, masing-masing mempunyai pemerintah daerah sendiri-sendiri

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyatakan:

- a. **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. **Daerah otonom** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri. Kewenangan untuk mengatur harus berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. **Pemerintah daerah** adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- d. **DPRD** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebaiknya Kamu tahu

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos*. *autos* berarti sendiri. *nomos* berarti aturan.

Suatu daerah yang memiliki kelembagaan sosial dan budaya yang khas serta unik dapat dikembangkan sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh misalnya Aceh dan Papua. Di Aceh atau Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki *Wali Nanggroe* dan *Tuha Nanggroe*. Kedua lembaga tersebut berperan untuk melestarikan penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan mempersatu masyarakat NAD. Di NAD diberlakukan syari'at Islam dengan *Mahkamah Syar'iyah*-nya.

Oleh karena itu, di NAD zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di Provinsi Papua, dikenal adanya MRP (Majelis Rakyat Papua). MRP merupakan perwakilan (representasi) orang asli Papua. MRP dibentuk dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua.

Sebaiknya Kamu Tahu

Wali Nanggroe dan *Tuha Nanggroe* adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syari'ah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang berlaku untuk pemeluk Islam.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat. Otonomi juga bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing.



Kantor Gubernur Riau

Sumber: www.skyscrapercity.com

Sebaiknya Kamu Tahu

6 Urusan Pemerintah Pusat yang tidak Diserahkan pada Daerah:

- politik luar negeri;
- pertahanan;
- keamanan;
- yustisi;
- moneter dan fiskal nasional; dan
- agama.

2. Pembentukan Daerah Otonom

- a. Pembentukan daerah otonom ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang pembentukan daerah otonom biasanya berisi nama daerah yang dibentuk, cakupan wilayah, batas wilayah, serta ibu kota. Selain itu juga berisi: kewenangan pemerintahan daerah, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah.
- b. Pembentukan daerah otonom dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah otonom dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom ditetapkan dengan UU.
- c. Bentuk konkrit daerah otonom adalah provinsi, kabupaten atau kota.

Wilayah Indonesia amat luas dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Sebagai perbandingan luas wilayah Indonesia 1.919.400 km²; Thailand 514.000 km²; Vietnam 329.750 km²; Filipina 300.000 km²; Malaysia 329.750 km²; dan Singapura 684 km². Bisa dibayangkan betapa tidak mudah mengelola negara yang begitu besar. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di

Indonesia mengalami ketimpangan. Ketimpangan itu terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketimpangan juga terjadi antar daerah.

Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Otonomi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu di setiap daerah otonom dibentuk “Pemerintah Daerah”. Sampai saat ini jumlah pemerintah daerah di Indonesia sudah mencapai 33 provinsi dan kurang lebih 436 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk lebih kurang 210 juta jiwa.



Kantor DPRD Kota Payakumbuh

Sumber: www.payakumbuhkota.go.id/images/kt_dprd.jpg

Sebaiknya Kamu Tahu

Kita harus waspada agar semangat otonomi tidak menjurus pada semangat pembentukan daerah berdasarkan kesukuan. Sehingga menyuburkan gerakan separatime (memisahkan diri dari NKRI).

3. Pembagian Urusan Pemerintahan pada Daerah Otonom

- a. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Berikut ini adalah “urusan wajib” yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi:
 - perencanaan pembangunan;
 - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - penanganan bidang kesehatan;
 - penyelenggaraan pendidikan;
 - penanggulangan masalah sosial;
 - pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - pengendalian lingkungan hidup;
 - pelayanan pertanahan;
 - pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - pelayanan administrasi penanaman modal;
 - pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
 - urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh UU.
- c. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota:
 - perencanaan pembangunan;
 - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - penanganan bidang kesehatan;
 - penyelenggaraan pendidikan;
 - penanggulangan masalah sosial;
 - pelayanan bidang ketenagakerjaan;

- fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- pengendalian lingkungan hidup;
- pelayanan pertanahan;
- pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- pelayanan administrasi penanaman modal;
- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh UU.



Kantor Bupati Kediri

Sumber: www.kedirikab.go.id/pustaka/100_1776.jpg

4. Hak dan Kewajiban Daerah Otonom

a. Hak Daerah Otonom:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola kekayaan daerah;
- d. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang berada di daerahnya;
- f. mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebaiknya Kamu Tahu

Sumber Penerimaan Daerah Otonom:

1. Pendapatan Asli Daerah :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah;
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan Daerah (dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam) terdiri dari:
 - a. dana alokasi umum;
 - b. dana alokasi khusus.

b. Kewajiban Daerah Otonom:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan tata ruang daerah;

- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. menerapkan peraturan perundangan di daerahnya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan.

5. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan DPRD

a. Tugas Kepala Daerah:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas DPRD:

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- e. memilih kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

- f. memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.



Gedung DPRD Kabupaten Kediri

Sumber: www.kedirikab.go.id/pustaka/100_1774.jpg

6. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- c. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.
- d. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dibentuk “Panitia Pengawas Pilkada”. Kenggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
- e. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah WNI yang memenuhi syarat:
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan NKRI serta pemerintah;
 - berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
 - berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

- tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan isteri;
- belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Sebaiknya Kamu tahu

Jumlah Kabupaten /Kota pada Masing-Masing Provinsi

1. Aceh: 1 kota, 19 kabupaten.
2. Sumatera Utara: 6 kota, 14 kabupaten.
3. Sumatera Barat: 6 kota, 9 kabupaten.
4. Riau: 1 kota, 10 kabupaten.
5. Riau Kepulauan: 1 kota, 4 kabupaten.
6. Jambi: 2 kota, 9 kabupaten.
7. Sumatera Selatan: 1 kota, 6 kabupaten.
8. Bangka Belitung: 1 kota, 2 kabupaten.
9. Bengkulu: 1 kota, 3 kabupaten.
10. Lampung: 1 kota, 10 kabupaten.
11. DKI Jakarta: 5 kota.
12. Jawa Barat: 8 kota, 21 kabupaten.
13. Banten: 2 kota, 4 kabupaten.
14. Jawa Tengah: 6 kota, 29 kabupaten.
15. D.I Yogyakarta: 1 kota, 4 kabupaten.
16. Jawa Timur: 10 kota, 28 kabupaten.
17. Bali: 1 kota, 8 kabupaten.
18. Nusa Tenggara Barat: 1 kota, 6 kabupaten.
19. Nusa Tenggara Timur: 1 kota, 13 kabupaten.
20. Kalimantan Barat: 2 kota, 9 kabupaten.
21. Kalimantan Tengah: 1 kota, 13 kabupaten.
22. Kalimantan Selatan: 1 kota, 10 kabupaten.
23. Kalimantan Timur: 4 kota, 8 kabupaten.
24. Sulawesi Utara: 1 kota, 5 kabupaten.
25. Gorontalo: 1 kota, 2 kabupaten.
26. Sulawesi Tengah: 1 kota, 7 kabupaten.
27. Sulawesi Selatan: 2 kota, 25 kabupaten.
28. Sulawesi Tenggara: 1 kota, 4 kabupaten.
29. Sulawesi Barat: 1 kota, 4 kabupaten.
30. Maluku: 1 kota, 4 kabupaten.
31. Maluku Utara: 2 kota, 6 kabupaten.
32. Papua Barat: 1 kota, 3 kabupaten.
33. Papua: 1 kota, 9 kabupaten.

*Sumber: Buku Himpunan Pengetahuan Umum (Buku Pintar)

7. Undang-Undang Otonomi Daerah

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini sudah ada tujuh UU tentang Otonomi Daerah. Selengkapnya UU tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No.1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah;
2. UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. UU No. 18 Tahun 1966 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
5. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di Daerah;
6. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No.1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957 dan UU No. 18 Tahun 1966 menganut otonomi luas.

Sedangkan UU No. 5 tahun 1974 menganut otonomi sangat terbatas. UU ini masa berlakunya juga sangat lama, yakni 25 tahun. Dibuat dan berlaku pada era Orde Baru.

Setelah Orde Baru runtuh lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dibuat dengan harapan dapat meredam gejolak yang ada di daerah-daerah. UU ini memberikan kewenangan sangat besar bagi daerah-daerah otonom untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri.

Pemerintah juga mengeluarkan UU Otonomi Khusus bagi Aceh dan Papua. UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, dan UU Otonomi Khusus bagi Papua memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Aceh dan Papua. Sampai muncul ungkapan, “apapun yang diinginkan oleh Aceh dan Papua akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, asalkan jangan minta merdeka.” Buktinya Papua yang minta hasil tambang 80% untuk daerah dan 20% sisanya untuk pemerintah pusat tidak ditolak lagi oleh DPR RI. DPR melihat kuatnya tuntutan pemisahan diri dari kedua daerah tersebut.

Sejak tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang di dalamnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.



Suasana Pemilihan Kepala Daerah
Sumber: farm2.static.flickr.com/1216/1045772052_f92c8...

8. Beberapa Dampak Negatif Otonomi Daerah

a. Konflik Antar Daerah Otonom

Otonomi luas ternyata melahirkan ketimpangan baru bagi daerah surplus dan daerah minus. yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah dan tinggi. Ketimpangan tersebut sangat terasa bagi masyarakat di daerah-daerah yang berbatasan, misalnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur yang surplus dapat memberikan subsidi yang besar bagi desa-desa di wilayahnya. Tetapi tetangga mereka Kalimantan Tengah misalnya, justru kesulitan dana untuk memenuhi anggaran rutin mereka.

b. Pemekaran Wilayah pada Era Otonomi Daerah

Begitu Orde Baru tumbang, semangat otonomi marak. Pemekaran wilayah merebak dari Sabang sampai Merauke. Pertambahan jumlah kabupaten atau kota menjadi sangat dinamis. Perubahannya dalam hitungan bulan. Sejak tahun 1976 sampai 1998 peta Indonesia tak berubah dari 27 provinsi. Perubahan kecil terjadi di tingkat kabupaten/kota dari 300 menjadi 314. Dalam era reformasi ini komposisi jumlah provinsi dan kabupaten mengalami perubahan yang cepat.

Pemekaran wilayah dimungkinkan oleh UU No. 22 tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kurun tahun 1999 hingga april 2002 terdapat 57 kabupaten dan 25 kota baru sebagai hasil pembentukan yang terjadi di 58 kabupaten induk dari 20 provinsi. Pembentukan daerah baru paling banyak terjadi dalam tahun 1999. Ini diperlihatkan dengan disahkannya 19 undang-undang yang mengatur pembentukan 34 kabupaten dan sembilan kota.

Motif di balik pemekaran daerah ini bermacam-macam. Selain untuk menyejahterakan rakyat, beberapa daerah dimekarkan karena tuntutan sejarah. Pemekaran wilayah di Bangka dan Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau menuntut pemekaran karena merasa pembangunan di daerahnya terhambat.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR
Sumber: [Www.Dpr.Go.Id/Ast/Img/Pic/1770310148.Dsc_0040.Jpg](http://www.Dpr.Go.Id/Ast/Img/Pic/1770310148.Dsc_0040.Jpg)

Rangkuman

1. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri, dan *nomos* berarti aturan.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Terdapat enam urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan pada daerah, di luar enam hal ini semua diserahkan pada daerah
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi
 - e. moneter; dan
 - f. agama
7. Untuk mendukung jalannya pemerintahan di daerah diperlukan dana, namun tidak semua daerah mampu mendanai sendiri jalannya roda pemerintahan. Oleh karenanya Pemerintah harus mampu membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Sumber penerimaan daerah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah :
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah;
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan Daerah (dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam) terdiri dari:
 - 1) dana alokasi umum
 - 2) dana alokasi khusus
8. Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, berarti sampai saat ini telah ada tujuh UU yang mengatur pemerintahan daerah. Ketujuh UU tersebut adalah:
 - a. UU No.1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional daerah.
 - b. UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan daerah
 - c. UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
 - d. UU No. 18 Tahun 1966 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah.
 - e. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di daerah.
 - f. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - g. UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Latihan

a. Tugas Individu

1. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri pengertian otonomi daerah!
2. Jelaskan pengertian daerah otonom!
3. Berikan contoh daerah otonom di Indonesia!
4. Siapa yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu?
5. Sebutkan enam urusan yang tidak diserahkan pada daerah, dan tetap menjadi urusan pemerintah pusat ?
6. Apa saja yang menjadi urusan wajib dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi?
7. Apa saja yang menjadi urusan wajib dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota?
8. Apa saja yang menjadi urusan pilihan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota?
9. Jelaskan apa saja yang menjadi hak daerah otonom?
10. Apa saja yang menjadi kewajiban daerah otonom?
11. Jelaskan tugas dan wewenang kepala daerah!
12. Jelaskan tugas dan wewenang DPRD!
13. Uraikan garis besar tata cara pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat!
14. Sebutkan tujuh UU tentang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku di Indonesia, sejak merdeka hingga saat ini!
15. Diantara tujuh UU tentang Pemerintahan Daerah itu mana yang berlakunya paling lama dan paling sentralistis?

b. Tugas Kelompok

Bagilah siswa di kelasmu menjadi 3 kelompok, setiap kelompok membuat makalah sederhana untuk presentasi secara bergiliran di depan kelas. Tema diskusi sebagai berikut:

1. Diskusikan, kenapa enam urusan yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal, serta agama tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi tetap diurus oleh pemerintah pusat.
2. Diskusikan, garis besar tata cara pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat!
3. Diskusikan, kelebihan dan kekurangan UU No. 32 Tahun 2004 dibandingkan dengan UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap warga masyarakat. Kebijakan publik merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan publik misalnya bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, lingkungan hidup dan sebagainya.

Sebuah kebijakan publik, lahir sebagai akibat dari dua hal. *Pertama* adanya aspirasi dari masyarakat. *Kedua* berangkat dari niat baik pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam perumusan kebijakan publik pemerintah memegang peran sentral yang sangat menentukan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah harus bermanfaat bagi seluruh rakyat, atau minimal sebagian besar dari rakyat.

Ada beberapa faktor yang menentukan kualitas sebuah kebijakan publik. *Pertama*, apakah kebijakan publik itu bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.

Kedua, apakah proses perumusannya melibatkan masyarakat serta wakil-wakilnya. *Ketiga*, apakah pelaksanaannya menjamin rasa keadilan. *Keempat*, apakah dalam implementasinya tidak diselewengkan. *Kelima*, apakah kebijakan publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. *Keenam*, apakah tidak melanggar hukum-hukum agama. *Ketujuh*, apakah secara moral, pantas bagi masyarakat setempat.

Pada era otonomi daerah dewasa ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan kebijakan publik di daerahnya. Hal ini agak berbeda dengan era sebelumnya (orde baru) ketika pemerintah pusat mendominasi hampir seluruh perumusan kebijakan publik di daerah.

Disisi lain pada era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebaiknya Kamu Tahu

PBB mengeluarkan sebuah kriteria pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang didalamnya terdapat partisipasi rakyat, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang berdasar atas hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab pemerintahan yang efisien dan pemerintahan yang memihak pada rakyat.



Unjuk rasa untuk menentang kenaikan tarif dasar listrik

Sumber: www.seasite.niu.edu/.../010601.jpg

2. Perda Sebagai Kebijakan Publik

Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda baru berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Materi Perda harus mengandung asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; ke-bhineka tunggal ika-an; dan keadilan. Disamping itu materi perda juga harus menjamin kesamaan dalam hukum; kepastian hukum.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan “Rancangan Perda”. Persiapan, pembahasan,

dan pengesahan Rancangan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, gubernur, atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Perda diundangkan dalam “Lembaran Daerah” dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam “Berita Daerah”. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman masyarakat dibentuk “Satuan Polisi Pamong Praja.”

Sebaiknya Kamu Tahu

Kebijakan publik demokratis adalah kebijakan publik yang dibuat dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap pembuatannya.

3. Beberapa Contoh Kebijakan Publik

a. Kebijakan untuk Tidak Menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)

Jakarta Kompas- Pemerintah mengisyaratkan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kekurangan subsidi listrik akan diupayakan untuk ditutup dengan penambahan alokasi dari pemerintah dan upaya efisiensi PT Perusahaan Listrik Negara. Isyarat itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla se usai berkunjung ke Kantor Pusat PLN. Jumat 17 Maret 2006 di Jakarta. Pemerintah belum pernah memutuskan menaikkan TDL kata Kalla.

Menurut Kalla, dari hasil pertemuan dengan PLN, badan usaha milik negara itu menyatakan siap bekerja dengan subsidi yang diputuskan pemerintah dan DPR. “Kami sudah negosiasi dengan DPR untuk menambah subsidi, sisanya akan dijalankan dengan efisiensi PLN, ujar Kalla”. Pemerintah akan menggunakan skenario tim teknis TDL, yang mematok kekurangan subsidi listrik Rp11,2 triliun. Sebanyak Rp 6,7 triliun ditambah dari pemerintah, sisanya Rp 4,5 triliun diusahakan oleh PLN. Direktur utama PT PLN Eddie Widiono mengatakan, direksi siap melakukan apapun keputusan pemerintah mengenai TDL (dikutip dari *Harian Kompas*)

b. Kebijakan Impor Beras

Jakarta Kompas- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemenuhan kebutuhan stok beras berasal dari dalam negeri. Dalam kaitan itu, ia menginstruksikan agar sekuat tenaga dilakukan mobilisasi beras dari petani. Jika terpaksa baru dilakukan impor. Presiden memerintahkan agar tidak ada impor ilegal yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri. Presiden mengatakan hal itu dalam jumpa pers se usai kunjungan ke Kantor Perum Bulog di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 2 Januari 2006.

Rencananya impor beras akan dilakukan sebanyak 130.000 ton. Akan tetapi, jumlah ini bisa berkurang jika mobilisasi beras dari petani itu menghasilkan beras dalam jumlah yang sangat besar. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian mengatakan, Deptan berharap kebutuhan sebanyak itu bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga tidak perlu impor (dikutip dari *Harian Kompas*)



Unjuk rasa menentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
Sumber: <http://images.google.co.id/images>

c. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Menolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Denpasar Kompas- Provinsi Bali menolak RUU Antipornografi dan Pornoaksi, melalui Surat Keputusan Gubernur Bali dan Surat Keputusan DPRD Bali. Keputusan itu dihasilkan dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Rabu 15 Maret 2006. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD, IB. Putu Wesnawa, didampingi Wakil Ketua DPRD dan Gubernur Bali Dewa Beratha. Surat keputusan yang menjadi sarana mengungkapkan aspirasi masyarakat Bali itu rencananya dikirim ke DPR. Dengan tembusan kepada Presiden RI serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mengakomodasi keinginan masyarakat Bali, akan dikirimkan surat keputusan penolakan terhadap RUU yang akan diserahkan sesegera mungkin. Hal

itu dikatakan Dewa Beratha saat membacakan SK itu. Hadir dalam rapat penentuan sikap itu, antara lain Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Klungkung, Wakil Bupati Jembrana dan Buleleng. Hadir pula perwakilan dari Kabupaten Karangasem, Gianyar, Bangli, dan Tabanan, serta berbagai komponen masyarakat Bali. Secara aklamasi, ratusan orang yang memenuhi ruang pertemuan menyatakan menolak RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP) sekalipun direvisi (disarikan dari Harian Kompas).

4. Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan Publik

Tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Tahap pertama

Penyusunan agenda. Tahap ini kegiatannya adalah menyeleksi masalah-masalah yang masuk ke para perumus kebijakan publik. Tidak semua masalah yang diajukan akan diusahakan pemecahannya melalui kebijakan publik. Ada yang ditunda, bahkan ada yang sama sekali tidak disentuh.

Tahap kedua

Perumusan kebijakan. Tahap ini merupakan pembahasan terhadap berbagai alternatif pemecahan yang diajukan untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah yang terbaik, tentu saja yang dipilih.

Tahap ketiga

Penetapan kebijakan. Pada tahap ini telah ditentukan pemecahan masalah sebagai kebijakan publik. Penetapan ini didasarkan pada dukungan mayoritas di lembaga legislatif, konsensus antara pimpinan lembaga atau keputusan peradilan.

Tahap keempat

Penerapan kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh unit-unit pemerintah di tingkat bawah.

Tahap kelima

Penilaian kebijakan. Pada tahap ini pelaksanaan kebijakan publik akan dinilai apakah telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau belum.

Dalam perumusan kebijakan publik dikenal ada dua jenis aktor yakni aktor resmi dan aktor tidak resmi. Keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik merupakan aktor tidak resmi. Yang termasuk aktor tidak resmi dalam perumusan kebijakan publik adalah: partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan warga negara atau individu. Sedangkan aktor resminya adalah: pemerintah, (eksekutif), dan parlemen (legislatif), serta yudikatif, baik pusat maupun daerah.

Aktor resmi dalam pembuatan kebijakan publik dapat digolongkan pada tingkat nasional dan lokal. Di tingkat nasional adalah: DPR, DPD, Pemerintah Pusat, dan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Adapun aktor di daerah adalah: DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Bentuk kebijakan publik pada tingkat pusat disebut Undang-undang (UU), dan Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan di tingkat daerah dinamakan Peraturan Daerah (Perda). Di tingkat desa disebut Peraturan Desa (Perdes). Kebijakan publik juga dibuat oleh unit-unit pemerintahan, seperti: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan sebagainya.

Sebaiknya Kamu Tahu

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam Peraturan Daerah (Perda) disebut Qanun.

Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah situasi proses perumusan kebijakan publik di lembaga-lembaga pemerintah berlangsung? Kalau kita mengamati proses pembuatan kebijakan publik secara cermat, kita akan melihat perdebatan dan berbagai upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingannya agar masuk dalam perumusan kebijakan publik.

Berbagai aktor tidak resmi (di luar pemerintah), seperti: pengusaha, pekerja, kelompok organisasi kemasyarakatan, dan warga negara, sering tampak ikut mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Pada umumnya partisipasi masyarakat dalam upaya mempengaruhi perumusan kebijakan publik dilakukan dengan cara datang ke lembaga pembuat kebijakan publik. Mereka menyampaikan aspirasinya, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Tertulis, misalnya dalam bentuk petisi, rekomendasi, hasil diskusi, hasil seminar. Dalam bentuk lisan, misalnya dengan dialog.

Bentuk lain partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik banyak dilakukan dalam bentuk aksi. Misalnya: mogok makan, pendudukan suatu tempat, unjuk rasa atau demonstrasi. Aksi-aksi tersebut mestinya dilakukan dengan cara damai, tetapi kadang-kadang dengan kekerasan, sehingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan.

Dalam masyarakat yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam upaya mempengaruhi perumusan kebijakan publik harus dilakukan dengan cara damai dan tertib. Sesuai aturan hukum yang berlaku, serta dilakukan atas dasar aspirasi sendiri bukan karena ditekan atau disuruh pihak lain. Bentuk partisipasi seperti itu, disebut partisipasi langsung.

Cara mempengaruhi juga bisa dilakukan secara tidak langsung, misalnya lewat mediator perorangan maupun organisasi. Mediator perorangan, misalnya tokoh masyarakat atau tokoh politik. Mediator organisasi misalnya: partai politik, organisasi sosial keagamaan, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Seharusnya aspirasi dari berbagai pihak mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan publik, sehingga memuaskan mereka. Akan tetapi, dalam kenyataan sering dijumpai kebijakan publik cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Terutama pihak yang memiliki pengaruh kuat, seperti: pengusaha besar, para pejabat pemerintah, dan para pimpinan partai politik. Padahal

ketentuan suatu kebijakan publik bersifat mengikat seluruh warga masyarakat, termasuk mereka yang tidak setuju atau dirugikan.

Setiap warga negara Indonesia tanpa memandang agama yang dianut, asal suku, dan asal daerah diharapkan ikut berperan aktif, secara langsung atau tidak langsung dalam perumusan kebijakan publik. Jika hal itu terjadi, maka isi kebijakan publik akan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sebaiknya Kamu Tahu

Jika hendak mempengaruhi perumusan peraturan desa, maka bisa berkunjung ke BPD baik secara individual atau kelompok; ke DPRD jika hendak memberikan masukan tentang perumusan peraturan daerah; ke DPR jika hendak memberikan masukan tentang perumusan undang-undang; ke DPD jika hendak memberikan masukan tentang pengaturan masalah-masalah otonomi daerah.

Apabila upaya mempengaruhi perumusan kebijakan publik di daerah bisa dilakukan oleh setiap warga negara, baik secara individual atau kelompok, maka otonomi daerah akan berkembang dengan baik. Sebab, otonomi daerah sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sangat membutuhkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, bisa diharapkan pembuatan kebijakan publik di daerah akan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Sudah saatnya model pembuatan kebijakan publik yang didominasi oleh pemerintah atau kelompok dihindari.



*Sidang DPRD Provinsi Jawa Barat
untuk membahas Peraturan Daerah (Perda)*
Sumber: www.jabarprov.go.id/jabar/files/1199782306892...

6. Dampak Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Dalam perumusan kebijakan publik aktivitasnya adalah memilih berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Masyarakat secara kelompok atau secara individual diberikan kesempatan untuk ikut serta memberikan masukan (*input*).

Jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, maka akan berakibat tidak adanya masukan (*input*) dari masyarakat. Akibatnya keputusan untuk memecahkan masalah sepenuhnya merupakan prakarsa pemerintah. Bila ini terjadi, maka otonomi menjadi kurang bermakna. Otonomi daerah memerlukan partisipasi masyarakat, agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Apa akibat yang bisa timbul dengan tidak aktifnya masyarakat untuk memberikan *input* dalam perumusan kebijakan publik? Secara teoritis bisa menimbulkan dua kemungkinan:

- a. Alternatif pertama. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik bertitik tolak untuk kepentingan rakyat, maka kebijakan publik yang dipilih adalah yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Hal ini akan terjadi pada pemerintah yang bekerja berdasarkan apa yang dikehendaki rakyat dan merasa di bawah kontrol rakyat. Pemerintah daerah yang demikian adalah pemerintah daerah yang bertanggungjawab.
- b. Alternatif kedua. Pemerintah hanya berorientasi kepada kepentingan sendiri, bukan kepentingan rakyat. Dalam perumusan kebijakan publik yang dipilih adalah alternatif pemecahan masalah yang menguntungkan diri mereka sendiri. Keuntungan itu bisa dalam bentuk keuntungan politik dan nonpolitik. Keuntungan politik, misalnya untuk memperkokoh kekuasaannya. Keuntungan nonpolitik, misalnya untuk memperoleh imbalan materi. Indikasinya, para pejabat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, tidak aktif berusaha menyerap aspirasi masyarakat.

Sebaiknya Kamu Tahu

Aktif dan tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah akan memberi konsekuensi tersendiri. Keaktifan akan membuat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Ketidakaktifan akan membuat pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat.

7. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Dalam perumusan kebijakan publik, peran politisi di legislatif dan eksekutif biasanya sangat dominan. Kebijakan publik merupakan proses politik yang sangat penting, dan hasilnya mengikat semua orang untuk mematuhi.

Sebagai proses politik, maka pada tahap perumusan akan terjadi kompetisi kepentingan. Di sini akan terjadi proses negoisasi, kompromi, bahkan kadang-kadang konflik. Oleh karena itu, para aktor tidak resmi, yakni masyarakat, partai

politik, kelompok-kelompok organisasi sosial, dan individu membutuhkan keuletan untuk memperjuangkan aspirasinya supaya dapat mewarnai kebijakan publik.

Lain halnya dalam pelaksanaan, sesungguhnya yang paling berperan untuk sukses tidaknya dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, terutama adalah aparat pemerintah. Karena memang tugas mereka adalah melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sehingga, aparat pemerintahlah yang memiliki posisi sebagai penanggung jawab utama terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Untuk itu, aparat pemerintah dalam menerapkan kebijakan publik dibekali berbagai fasilitas. Fasilitas itu antara lain: dana, sarana, dan prasarana. Selain fasilitas perlu juga mendapat dukungan dari alat penegak hukum, seperti: polisi, jaksa, dan hakim.

Masyarakat memiliki peran penting untuk keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Peran masyarakat adalah sebagai partisipan. Yakni memberikan dukungan supaya tujuan bersama dari kebijakan publik dapat tercapai. Oleh karena itu, kewajiban masyarakat adalah mematuhi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Tanpa adanya kepatuhan masyarakat, maka kebijakan publik tidak akan efektif.

Masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah akan timbul ketika pelaksanaan kebijakan publik di daerah tidak dijalankan dengan semestinya. Misalnya, terjadinya politik uang dalam suatu pemilihan gubernur, bupati/wali kota atau kepala desa dan para pejabat di daerah yang melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Rangkuman

- Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap warga masyarakat. Kebijakan publik merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, lingkungan hidup dan sebagainya.
- Pada dasarnya sebuah kebijakan publik, lahir sebagai akibat dari dua hal, yaitu pertama adanya aspirasi dari masyarakat, dan yang kedua berangkat dari niat baik pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.
- Pada era otonomi daerah dewasa ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan kebijakan publik di daerahnya, sepanjang yang menjadi kewenangannya. Hal ini agak berbeda dengan era sebelumnya (orde baru) ketika pemerintah pusat mendominasi hampir seluruh perumusan kebijakan publik di daerah.
- Tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut :
 - a. **Tahap pertama**
Yakni penyusunan agenda. Tahap ini kegiatannya adalah menyeleksi masalah-masalah yang masuk ke para perumus kebijakan publik.

Ini berarti tidak semua masalah yang diajukan akan diusahakan pemecahannya melalui kebijakan publik. Ada yang ditunda, bahkan ada yang sama sekali tidak disentuh.

b. Tahap kedua

Yakni perumusan kebijakan publik. Seperti telah dikemukakan, pada tahap ini merupakan pembahasan terhadap berbagai alternatif pemecahan atau pilihan-pilihan yang diajukan dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah yang terbaik, tentu saja yang dipilih.

c. Tahap ketiga

Penetapan kebijakan (adopsi kebijakan). Pada tahap ini telah ditentukan pemecahan masalah sebagai kebijakan publik. Penetapan ini didasarkan pada dukungan mayoritas di lembaga legislatif, konsensus antara pimpinan lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap keempat

Yakni penerapan (implementasi) kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan dilaksanakan oleh unit-unit pemerintah di tingkat bawah.

e. Tahap kelima

Yakni penilaian kebijakan. Pada tahap ini pelaksanaan kebijakan publik akan dinilai apakah telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau belum.

- Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik merupakan aktor tidak resmi. Yang termasuk aktor tidak resmi dalam perumusan kebijakan publik adalah: partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan warga negara atau individu. Sedangkan aktor resminya adalah: agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), parlemen (legislatif), dan yudikatif.
- Pada umumnya partisipasi masyarakat dalam upaya mempengaruhi perumusan kebijakan publik dilakukan dengan cara datang ke lembaga pembuat kebijakan publik untuk menyampaikan aspirasinya, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam bentuk tertulis, misalnya dalam bentuk petisi, rekomendasi/usulan dari hasil suatu pertemuan atau diskusi/seminar. Dalam bentuk lisan, misalnya dengan dialog.

Latihan

a. Tugas Individu

1. Jelaskan pengertian kebijakan publik dengan kalimatmu sendiri!
2. Siapa yang berhak menetapkan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota?
3. Sebutkan asas-asas dalam pembuatan Peraturan Daerah sebagai kebijakan publik!
4. Sebutkan asas-asas materi yang harus terkandung dalam Peraturan Daerah!
5. Dimana Peraturan Daerah harus diundangkan, serta oleh siapa?
6. Dimana Keputusan Kepala Daerah harus diundangkan, serta oleh siapa?
7. Berikan contoh kebijakan publik di daerah dan di pusat, masing-masing 2 contoh!
8. Jelaskan tahap-tahap perumusan kebijakan publik!
9. Mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik?
10. Apa akibatnya bila masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik?

b. Tugas Kelompok

1. Amati mengenai proses pembuatan peraturan di tingkat RT dan RW di tempat tinggalmu, selanjutnya buatlah laporan dan presentasikan di kelas.
2. Diskusikan dengan teman-temanmu apa manfaat partisipasi warga masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik? Selanjutnya buatlah laporan hasil diskusi dan presentasikan di kelas!

C. Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah kegiatan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Partisipasi terhadap suatu kegiatan

dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan status sosial.

Keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh partisipasi warga masyarakatnya.. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan

2. Otonomi Daerah

a. Pelaksana Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilaksanakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Di tingkat provinsi gubernur dan perangkat daerah provinsi adalah pelaksananya. Gubernur memiliki dua peran. Gubernur sebagai kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertanggung jawab kepada presiden.

Di tingkat kabupaten/kota, bupati dan walikota serta perangkat daerah kabupaten /kota adalah pelaksananya. Sebagai kepala daerah bupati/walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota.

Perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sebaiknya Kamu Tahu:

Lembaga teknis daerah contohnya adalah: Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Rumah Sakit.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, setiap kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah, dari pegawai negeri sipil yang

memenuhi syarat. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Kepala kelurahan disebut lurah, kelurahan tidak memiliki hak otonomi. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa memiliki hak otonomi.

b. Tugas Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

c. Tugas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan persetujuan DPRD provinsi. Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD.

Sekretaris DPRD bertugas: menyelenggarakan kesekretariatan; administrasi keuangan; mendukung pelaksanaan tugas DPRD. Sekretariat DPR menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

d. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

e. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah terdiri dari: Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kantor Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan lain-lain. BKD dipimpin oleh kepala BKD. Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh kepala kantor. Rumah sakit umum daerah dipimpin oleh kepala rumah sakit. Kepala badan, kepala kantor, dan

kepala rumah sakit diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

f. Kecamatan

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: memberdayakan masyarakat; menyelenggarakan ketentraman umum; menegakan peraturan perundang-undangan; memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan; membina pemerintahan desa/ kelurahan; melaksanakan pelayanan masyarakat.

Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Kelurahan

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah. Lurah mempunyai tugas: melaksanakan kegiatan pemerintahan; memberdayakan masyarakat; melayani masyarakat; menyelenggarakan ketenterman dan ketertiban umum; dan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan.

Perbedaan pokok antara desa dan kelurahan, adalah desa bersifat otonom, kelurahan bersifat administratif. Kepala desa dipilih oleh warganya, kepala kelurahan tidak dipilih tapi diangkat dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

3. Desa

a. Pengertian Desa

Desa bersifat otonom, dan berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan kelurahan hanya merupakan wilayah administratif. Kepala desa dipilih secara langsung oleh warganya. Masa jabatan kepala desa biasanya 5 tahun, ada yang 8 tahun, tergantung Perda yang mengaturnya. Karena desa bersifat otonom, maka desa memiliki badan permusyawaratan desa (BPD). Fungsi BPD sebagai lembaga legislatifnya desa.

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa harus memperhatikan asal-usulnya serta atas prakarsa masyarakat. Desa secara bertahap dapat diubah statusnya menjadi kelurahan atas usul pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.



Suasana pemungutan suara pemilihan kepala desa di Jombang, Jawa Timur

Sumber: <http://www.jombangkab.go.id/e-gov/posko/imgBerita/1777>

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Masa jabatan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD diatur dalam Peraturan Daerah dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan.

c. Otonomi Desa

Otonomi desa pada era Orde Baru memiliki corak seragam di seluruh Indonesia. Sejak era Reformasi corak otonomi desa menjadi beraneka ragam. Keanekaragaman itu, misalnya tampak dari sebutan desa, yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Istilah desa menjadi sangat beragam. Beberapa istilah untuk menyebut desa, yaitu: *nagari, kampung, gampong, huta, bori, dan marga*.

Keberagaman itu terjadi karena diakuinya otonomi asli, berdasarkan asal-usul desa. Status desa bersifat otonom. Karena otonom, maka desa tidak menjadi bawahan dari kecamatan. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan asli, sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Kewenangan yang merupakan “tugas pembantuan” dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kewenangan desa berdasarkan asal-usul desa merupakan otonomi asli, bukan pemberian pemerintah.

Kewenangan desa yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah merupakan kewenangan “sisa”. Kewenangan “sisa” ini sebagai konsekuensi desa sebagai sistem pemerintahan paling rendah.

Untuk tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, desa bisa menolak apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Otonomi desa dirancang untuk meningkatkan demokratisasi di desa. Badan permusyawaratan desa (BPD) berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Sumber pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan asli desa meliputi:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) hasil usaha desa; | 4) hasil gotong-royong; |
| 2) hasil kekayaan desa; | 5) lain-lain pendapatan asli desa |
| 3) hasil swadaya; | yang sah. |

b. Bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten/kota.

c. Bagian dari dana perimbangan.

d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

4. Sumber Pendapatan Daerah Otonom

Hak dan kewajiban pemerintah daerah telah diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pembiayaan Daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan yang dimaksud Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

Sebaiknya Kamu Tahu

Sumber pendapatan daerah berasal dari:

PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dana perimbangan adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri atas: dana bagi hasil, DAU (dana alokasi umum), dan DAK (dana alokasi khusus).

DAU merupakan dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Sedangkan DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

5. Berpartisipasi dalam Otonomi Daerah

Pada umumnya masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah berupa kemiskinan, langkanya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, transportasi yang tidak memadai, pencemaran lingkungan, belum ada penerangan listrik, masalah politik uang dalam pemilihan kepala daerah, maraknya KKN, dan lain-lain.

Masalah-masalah tersebut perlu dicarikan jalan keluarnya. Apabila tidak segera diatasi, maka akan menjadi kendala yang dapat mengurangi keberhasilan

atau bahkan menggagalkan pelaksanaan otonomi daerah. Ketidakberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan mengakibatkan persoalan yang rumit. Misalnya, kembali pada pemerintahan yang sentralistis dan tidak meratanya pembangunan. Hal ini merupakan langkah mundur, karena akan melemahkan upaya pengembangan kehidupan yang demokratis dan peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkataan lain tujuan otonomi daerah tidak terwujud.

Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah? Secara sederhana langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi masalah

Dalam langkah ini dilakukan penentuan masalah yang akan diangkat sebagai persoalan yang akan dicarikan pemecahannya. Dasar pertimbangannya, misalnya masalah tersebut oleh publik dinilai sebagai masalah yang dikehendaki segera dicarikan pemecahannya.

b. Mengumpulkan dan menyeleksi informasi berkaitan dengan masalah

Maksudnya harus dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tentang ada atau tidaknya kebenaran masalah itu. Sumber informasi bisa dari orang/pejabat/lembaga yang diduga melakukan penyimpangan, dari media massa, dan sumber lain yang dapat dipercaya. Dari sumber informasi, bisa diidentifikasi apakah masalah itu berkaitan dengan penyimpangan, kebijakan publik yang sudah tidak relevan lagi atau karena kurangnya partisipasi masyarakat. Juga dapat diidentifikasi apakah masalah itu merupakan masalah politik, hukum, atau administratif. Suatu masalah dapat digolongkan sebagai masalah politik ketika ada penyimpangan dalam proses politik, misalnya tidak ada kepekaan dari anggota DPRD atau pejabat daerah terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dikatakan masalah hukum, ketika penyimpangan itu berupa tindakan kriminal. Misalnya, tindakan korupsi, penganiayaan terhadap lawan politik, dan lain-lain. Sedangkan dikatakan masalah administratif, misalnya keputusan pejabat

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada atau peraturan yang lebih tinggi.

c. Menguji dan mengevaluasi pemecahan masalah

Setelah dikenali secara benar tentang adanya masalah, maka langkah berikutnya yakni mengajukan alternatif pemecahan masalah. Dalam langkah ini diajukan berbagai kemungkinan pemecahan dan penguji-annya. Pertimbangan yang paling penting dalam mengevaluasi pemecahan masalah adalah harus mengacu pada masalah yang hendak dipecahkan. Maksudnya kalau masalahnya berupa politik, pemecahannya adalah secara politik. Ada beberapa pemecahan politik yang bisa menjadi pilihan, misalnya tidak akan lagi memilih anggota DPRD yang tidak aspiratif, melakukan tekanan berupa demonstrasi agar anggota DPRD tersebut dipecat, dan lain-lain.

d. Menentukan pemecahan masalah

Dalam langkah ini dilakukan pemilihan salah satu pemecahan dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang diajukan. Pertimbangan yang penting adalah kesesuaian dan efektifitas pemecahan. Pemecahan itu mungkin sesuai, tetapi kalau tidak efektif, tentunya harus memilih yang sesuai dan lebih efektif. Misalnya, ketika usulan pemecatan seorang anggota DPRD merupakan sesuatu yang tidak mungkin, maka pilihan yang efektif adalah menghimbau kepada publik untuk tidak lagi memilih anggota DPRD dan partai politik yang tidak aspiratif tersebut pada pemilihan umum yang akan datang.

e. Mengembangkan rencana tindakan

Dalam langkah ini kegiatannya adalah membuat rencana tindakan dalam upaya untuk mempengaruhi pemerintah daerah atau perangkat otonomi daerah lainnya atau lembaga yang terkait dengan masalah itu untuk dapat menerima pemecahan masalah yang dipilih. Misalnya, mengusulkan kepada DPP suatu partai politik, untuk melakukan pemecatan terhadap anggota DPRD dari fraksinya yang telah terbukti melakukan politik uang.

f. Mengevaluasi rencana tindakan

Dalam tahap ini dilakukan penilaian apakah rencana tindakan yang telah dibuat dan diusulkan berhasil atau tidak. Dari hasil penilaian ini kemudian dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan.

Sebaiknya Kamu Tahu		
Nama Suku-Suku Daerah		
No	Provinsi	Suku
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh, Ulu Sungkil
2	Sumatera Utara	Karo, Batak, Nias
3	Sumatera Barat	Tanah Gadang
4	Riau	Sakai, Anak Dalam
5	Jambi	Bajau, Kubu
6	Sumatera Selatan	Ogan, Rejang
7	Bangka Belitung	Ogan
8	Bengkulu	Enggoro, Rejang
9	Lampung	Pasemah, Lampung
10	DKI Jakarta	Betawi
11	Jawa Barat	Sunda
12	Banten	Sunda
13	Jawa Tengah	Jawa, Samin
14	D.I. Yogyakarta	Jawa
15	Jawa Timur	Jawa, Madura
16	Kalimantan Barat	Ngayu, Dayak, Punan
17	Kalimantan Selatan	Banjar
18	Kalimantan Tengah	Dayak, Ngaju
19	Kalimantan Timur	Dayak, Kayan
20	Gorontalo	Gorontalo

Rangkuman

- Partisipasi adalah kegiatan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal.
- Partisipasi masyarakat atau seseorang terhadap suatu kegiatan akan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah latar belakang ekonomi, pendidikan, dan kedudukan dalam kegiatan yang diikutinya.
- Keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh partisipasi warga masyarakatnya. Kedudukan warga masyarakat selain sebagai obyek otonomi, sekaligus juga sebagai subyek otonomi.
- Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus selalu berupaya memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat agar termotivasi untuk terlibat aktif dalam usaha pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- Otonomi daerah dilaksanakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah otonomi lainnya. Gubernur dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah bertanggung jawab kepada presiden.
- Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bupati/wali kota dan perangkat daerah otonomi lainnya. Bupati/wali kota dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota.
- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah mencakup bidang yang luas dan bersifat kompleks. Pada umumnya masalah-masalah yang dihadapi berupa kemiskinan, langkanya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, transportasi yang tidak memadai, pencemaran lingkungan, belum ada penerangan listrik, masalah politik uang dalam pemilihan kepala daerah,

Latihan

a. Tugas Individu

1. Jelaskan pengertian partisipasi dengan kalimatmu sendiri!
2. Jelaskan yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah!
3. Mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah?
4. Apa akibatnya bila masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah?
5. Siapa saja yang menjadi perangkat daerah provinsi?
6. Siapa saja yang menjadi perangkat daerah kabupaten/kota?
7. Kepada siapa gubernur mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya?
8. Kepada siapa bupati/walikota mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya?
9. Apa saja tugas dan wewenang sekretariat daerah?
10. Apa saja tugas dan wewenang sekretariat DPRD?
11. Jelaskan yang kamu ketahui tentang dinas daerah?
12. Jelaskan yang kamu ketahui tentang lembaga teknis daerah?
13. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang camat?
14. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang lurah?
15. Apa saja perbedaan antara desa dan kelurahan?
16. Sebutkan sumber-sumber pendapatan asli daerah?
17. Sebutkan sumber-sumber pendapatan asli desa?
18. Sebutkan apa saja yang menjadi kewenangan daerah otonom?

b. Tugas Kelompok

Diskusikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi di daerahmu bisa kabupaten, kota atau bahkan tingkat desa saja.

1. Temukan serta indentifikasi permasalahan mendesak yang ada di kabupaten, kota, atau desa tempat tinggalmu.
2. Coba kamu kaji kebijakan apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Usulkan kebijakan publik serta rencana tindakan konkrit untuk mengatasi masalah.

D. Glosarium

Akuntabilitas	: Pertanggungjawaban
Aparatur	: Alat negara, pegawai negeri
Arogansi	: Kesombongan
Aspirasi	: Harapan
Demokrasi	: Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
Desentralisasi	: Penyerahan sebagian wewenang
Eksekutif	: Pelaksana pemerintahan
Fiskal	: Berkaitan dengan pendapatan negara, pajak
Hibah	: Pemberian secara sukarela
Infrastruktur	: Prasarana
Instansi vertikal	: Perangkat pemerintah pusat di daerah
Kebijakan Publik	: Kebijakan untuk kepentingan umum
Legislatif	: Badan pembuat undang-undang
Legislasi	: Pembuatan undang-undang
Moneter	: berhubungan dengan keuangan
Otonomi	: Hak untuk mengurus rumahtangganya sendiri
Potensi	: Kemampuan
Proporsional	: Seimbang
Polecy	: Kebijakan
Transparansi	: Keterbukaan
Yustisi	: Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan

E. Evaluasi

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Kekuasaan untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri serta kemandirian suatu daerah untuk membuat keputusan sendiri disebut.....
 - a. tugas pemerintah daerah

- b. daerah otonom
 - c. otonom
 - d. otonomi
2. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah asas.....
- a. sentralisasi
 - b. desentralisasi
 - c. dekonsentrasi
 - d. tugas pembantuan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan otonomi daerah berkedudukan sebagai badan.....
- a. legislatif daerah
 - b. eksekutif daerah
 - c. yudikatif daerah
 - d. federatif daerah
4. Kerjasama antara DPRD dan bupati/walikota dalam kekuasaan legislatif yaitu.....
- a. membuat undang-undang
 - b. membuat peraturan daerah
 - c. membuat keputusan bupati
 - d. membuat keputusan walikota
5. Dengan diberlakukannya UU otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan yang luas dalam hal.....
- a. politik luar negeri
 - b. membuat kebijakan moneter dan fiskal
 - c. membuat kebijakan hankam
 - d. mengelola daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki

6. Berikut ini merupakan wewenang pemerintah daerah, kecuali
 - a. politik luar negeri, hankam, moneter dan agama
 - b. membuat peraturan daerah
 - c. memilih kepala daerah
 - d. menetapkan APBD

7. Lembaga penyalur aspirasi masyarakat di tingkat desa adalah.....
 - a. LMD
 - b. BPD
 - c. LKMD
 - d. BKD

8. Kepala daerah mempunyai masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya.....
 - a. sekali masa jabatan
 - b. dua kali masa jabatan
 - c. tiga kali masa jabatan
 - d. empat kali masa jabatan

9. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksud dari pembuatan kebijakan publik adalah.....
 - a. membatasi partisipasi masyarakat
 - b. melindungi hak-hak masyarakat
 - c. membatasi kesejahteraan masyarakat
 - d. membatasi gejolak dalam masyarakat

10. Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan dan memantau pelaksanaan kebijakan publik akan berdampak sebagai berikut, kecuali.....
 - a. kebijakan publik tidak sesuai dengan hak-hak rakyat
 - b. kebijakan publik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat
 - c. kebijakan publik bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat

- d. kebijakan publik dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
11. Berikut ini adalah dampak positif dari otonomi daerah, kecuali.....
- a. masyarakat diperlakukan lebih demokratis
 - b. masyarakat bisa lebih mandiri
 - c. timbul persaingan sehat antar daerah untuk memajukan daerahnya
 - d. timbul kesenjangan sosial dalam masyarakat
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh DPRD setiap.....
- a. satu tahun
 - b. dua tahun
 - c. tiga tahun
 - d. lima tahun
13. Dengan berlakunya otonomi daerah, menjadikan masing-masing daerah otonom....
- a. merdeka sendiri-sendiri
 - b. tidak ada lagi hubungan dengan pemerintah pusat
 - c. tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. memiliki konstitusi sendiri-sendiri.
14. Otonomi daerah dimaksudkan untuk
- a. pemberdayaan masyarakat
 - b. memiliki kelembagaan sosial dari budaya yang khas
 - c. memiliki badan usaha milik daerah/desa
 - d. peningkatan masyarakat desa
15. Contoh hal yang diprogramkan dalam kebijakan publik adalah ...
- a. kepentingan umum
 - b. urusan keluarga

- c. urusan pribadi
 - d. kepentingan kelompok
16. Para pemeran (aktor) dalam perumusan kebijakan publik yang resmi adalah...
- a. warga negara secara individu
 - b. partai politik
 - c. kelompok-kelompok kepentingan
 - d. DPRD
17. Seleksi masalah yang akan dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan publik dibicarakan dalam tahap
- a. penyusunan agenda
 - b. perumusan kebijakan
 - c. penetapan kebijakan
 - d. pelaksanaan kebijakan
18. Bentuk kebijakan publik di daerah adalah
- a. UU
 - b. PP
 - c. Perda
 - d. Perdes
19. Cara partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik bisa dalam bentuk tertulis, lisan, dan aksi, yaitu
- a. dialog dan diskusi
 - b. rekomendasi dan mogok makan
 - c. petisi, dialog, dan demonstrasi
 - d. demonstrasi, mogok makan, dan dialog

20. Penyeleksian masalah, apakah sesuatu akan dimasukkan dalam kebijakan publik (Perda) atau tidak berada pada tahap
- a. penyusunan agenda
 - b. perumusan kebijakan
 - c. penetapan kebijakan
 - d. pelaksanaan kebijakan
21. Apabila warga negar masyarakat hendak berpartisipasi pada pembuatan kebijakan publik di daerah, akan efektif apabila aspirasi disampaikan saat
- a. penyusunan agenda kebijakan
 - b. penetapan kebijakan
 - c. pelaksanaan kebijakan
 - d. penilaian kebijakan
22. Para pemeran tidak resmi dalam perumusan kebijakan publik adalah
- a. warga negara atau individu
 - b. DPD
 - c. DPRD
 - d. BPD

BAB 3

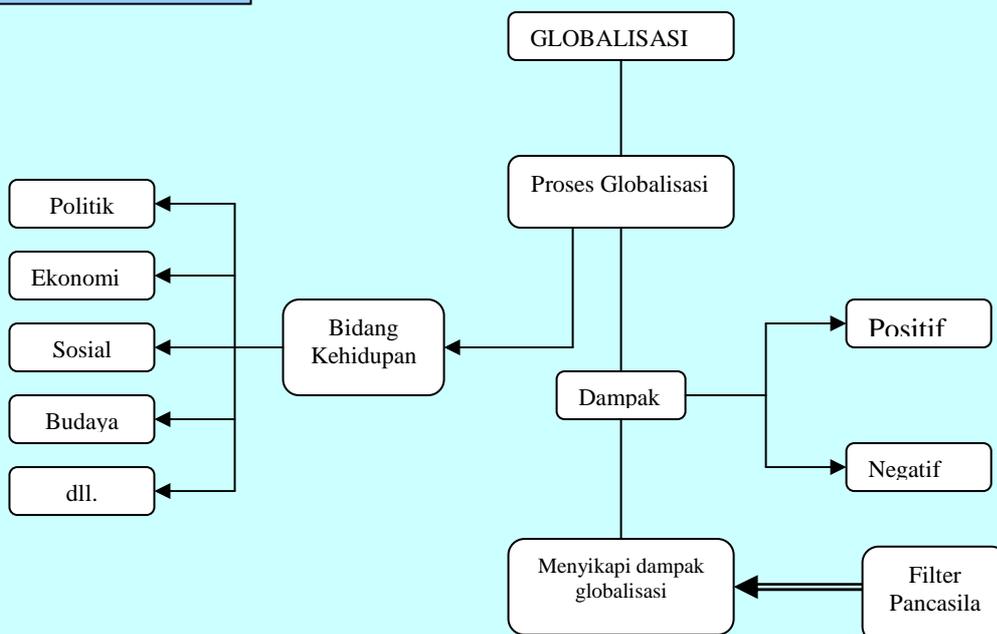
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa:

1. Memahami hakikat dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia.
2. Memahami politik luar negeri Indonesia dalam hubungan Internasional di era global.
3. Menyadari dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Mampu menentukan sikap terhadap tantangan dan peluang globalisasi dalam kehidupan sehari-hari

PETA KONSEP



Kata Kunci

Globalisasi, komunikasi, informasi, teknologi, diplomasi, politik luar negeri, bebas aktif.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, membuat dunia ini seakan-akan menjadi semakin sempit. Jarak antar negara yang dulu terasa sangat jauh kini menjadi terasa semakin dekat.

Lingkungan tempat kita hidup, tidak bisa dielakkan dari pengaruh globalisasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling bergantung dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dari satu pojok ke pojok lain dunia ini saling berhubungan. Semua dimungkinkan karena perkembangan pesat teknologi telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Ada pesawat Air Bus, ada Boeing, yang kapasitasnya besar serta kecepatannya amat tinggi untuk mengangkut manusia. Ada kapal kontainer yang kapasitasnya amat besar untuk mengangkut barang antar negara bahkan antar benua.

Itu semua memudahkan perpindahan manusia dan barang ke seluruh penjuru dunia. Ada pula sistem komunikasi satelit, yang memudahkan orang saling berkomunikasi dengan mudah, murah dan cepat. Kondisi semacam itulah yang disebut dengan Era Globalisasi.

Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai peluang dan yang kedua sebagai ancaman. Sebagai peluang globalisasi membawa dampak positif. Dampak positif itu antara lain tumbuhnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, serta egalitarianisme. Globalisasi juga memperkenalkan budaya kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan dan sebagainya.

Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif. Dampak negatif itu antara lain budaya konsumerisme, materialisme, hedonisme, dan sekularisme. Globalisasi juga membuat manusia cenderung mengagungkan

ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya.

A. Pengertian dan Arti penting Globalisasi bagi Indonesia

1. Pengertian Globalisasi

Untuk memahami globalisasi baca baik-baik kutipan berikut:

“Seorang puteri tersohor dari Inggris, menjalin kasih dengan seorang pria anak jutawan berkebangsaan Mesir. Mereka mengalami kecelakaan mobil di sebuah terowongan di Perancis. Mobil yang dikendarainya adalah Mercedes buatan Jerman yang mesinnya dibuat di Belanda. Pengemudi mobil yang naas itu kebetulan berkebangsaan Belgia. Konon pengemudi mobil sedang mabuk karena minum whiskey buatan Skotlandia. Mereka dibuntuti Paparazzi dari Italia, yang mengendarai motor buatan Jepang. Korban kecelakaan itu dirawat oleh dokter dari Amerika Serikat. Pesan yang kalian baca ini diakses dari internet dengan menggunakan komputer. Komputernya merk IBM buatan Amerika Serikat, yang monitornya di buat di Korea dan di rakit oleh pekerja Indonesia” (Disarikan dari sumber Mary Ann Penman & Stepen Kingsman, <http://www.Wednesday>).

Istilah globalisasi berasal dari kata “*globe*” (peta dunia yang berbentuk bola). Dari kata “*globe*” ini selanjutnya lahir istilah “*global*” (yang artinya *meliputi seluruh dunia*). Dari kata “*global*” ini lahirlah istilah “*globalisasi*”, yang bermakna sebuah proses mendunia. Globalisasi adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi mengaburkan batas-batas wilayah negara. Globalisasi bisa berlaku di semua bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.



Suasana Kota Tokyo, Jepang dengan kehidupannya yang sibuk
Sumber: <http://www.tau.ac.il/~alextsuk/photo/tokyo.jpg>

Sebaiknya Kamu Tahu

“Pernahkah kalian ke supermarket. Cobalah amati buah-buahan yang dijual! Jangan kaget disitu dijual nanas dari Hawaii, jeruk berukuran besar dari Israel. Bahkan juga tersedia apel dari Afrika Selatan, alpukat dari Spanyol, serta durian produksi Thailand.

Di dalam supermarket itu juga ada restoran *Thai food*, *Chinese food*, masakan Jepang, Filipina maupun Malaysia. Kalian juga bisa menemukan *California Fried Chicken (CFC)*, *Mc Donald's*. Di situ juga dijual kopi dari Kenya, daging domba dari Selandia Baru, serta anggur buatan Chile”. Banyak makanan yang di dalam bungkusnya ditulis dalam sepuluh bahasa yang berbeda. Itulah globalisasi.

2. Proses Globalisasi

Sebagai sebuah proses globalisasi sudah berlangsung sejak lama. Gagasan tentang globalisasi di bidang hak asasi manusia misalnya telah ada sejak Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia Sedunia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Gagasan globalisasi dalam bidang demokrasi juga telah ada sejak abad 18 di Eropa dan Amerika Serikat. Abad 19 dan 20 demokrasi berkembang ke seluruh penjuru dunia.

Globalisasi di bidang perdagangan dan ekonomi, dimulai sejak perdagangan antar negara mulai dilakukan. Saat ini bukan hanya barang yang menjadi komoditasnya, melainkan juga meliputi jasa, modal dan Iptek.

Globalisasi di bidang sosial budaya dimulai ketika kunjungan orang ke berbagai negara di dunia ini dilakukan. Arus kunjungan itu terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring semakin majunya transportasi.

Globalisasi digambarkan sebagai “sebuah proses menyatunya seluruh warga dunia menjadi satu. Merupakan sesuatu yang ideal apabila penyatuan warga dunia tersebut bisa menjadi kenyataan. Namun pada kenyataannya, penyatuan tersebut

hanyalah bersifat semu. Karena ternyata nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya, didominasi oleh nilai-nilai dari negara maju, yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia.

Didukung teknologi komunikasi dan transportasi modern yang serba cepat, globalisasi menjadi sebuah kenyataan. Manusia begitu mudah untuk berkomunikasi dengan manusia lain di manapun di dunia ini. Berbagai barang dan jasa dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia modern menjadi banyak berubah. Akibatnya terjadi pula perubahan pola hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, serta kebangsaan.

Disinilah diharapkan peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus mampu membentuk insan yang cendekia, mandiri dan bernurani. Manusia yang mampu berfikir global tetapi berkarakter nasional. Manusia yang unggul secara intelektual dan anggun secara moral.

Sebaiknya Kamu tahu

1. Beberapa Dampak Positif Globalisasi

Budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme, kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan dan sebagainya.

2. Beberapa Dampak Negatif Globalisasi

Merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme, sekularisme, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya.



Globalisasi membuat dunia seolah-olah menjadi satu
Sumber: <http://www.indiana.edu/~ssdc/worldmap.gif>

3. Arti Penting Globalisasi bagi Indonesia

Abad 21 sering dijuluki sebagai era globalisasi yang sesungguhnya. Era globalisasi bukan hanya melahirkan tantangan, tetapi juga sekaligus menghasilkan peluang. Tantangan globalisasi antara lain memudarnya batas-batas politik, ekonomi, antarbangsa. Globalisasi melahirkan tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Globalisasi juga menghasilkan banyak peluang, seperti masuknya investasi asing, alih teknologi, masuknya barang dan jasa yang murah dan sebagainya.

Dewasa ini sesungguhnya Indonesia telah memasuki perdagangan bebas barang dan jasa. Pilihan yang kita hadapi cukup sulit. Jika tidak ikut dalam perdagangan bebas, maka Indonesia akan dikucilkan oleh negara-negara lain. Pada hal kita terlanjur tergantung dengan barang-barang impor, investasi, dan utang dari luar negeri. Di sisi lain pilihan untuk ikut dalam liberalisasi, sesungguhnya dilakukan dengan kondisi yang belum siap. Sementara negara maju dalam hal SDM, Iptek dan permodalan sangat siap.

Bagi Indonesia globalisasi tentulah mendatangkan manfaat, akan tetapi sesungguhnya juga mengandung banyak resiko.



Globalisasi ekonomi membuat Indonesia kebanjiran barang-barang produksi luar negeri
Sumber: http://www.tatamulia.co.id/Data%20Project%20List/all/PIM_2.jpg

4. Beberapa dampak Globalisasi bagi Indonesia

Globalisasi bagi bangsa Indonesia akan melahirkan tekanan-tekanan yang cukup berat di bidang ekonomi, politik maupun budaya. Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara maju semakin tinggi. Di bidang politik kita sering mendapat tekanan dari negara maju. Lewat media masa budaya Barat semakin menggeser budaya Indonesia.

Selanjutnya secara lebih rinci dampak globalisasi bagi Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Dampak positif:

- (1) Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.
- (2) Demokratisasi dan kesadaran akan hak asasi manusia akan semakin berkembang di Indonesia.

Dampak negatif:

- (1) Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta lebih, menjadi pasar empuk bagi negara lain.
- (2) Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia. Yang harus kita waspadai tentu saja yang bersifat negatif.

Globalisasi memang suatu proses dan bukan sebuah produk akhir. Karena globalisasi sebagai suatu proses, maka harus disikapi secara bijak, agar kita bisa mengambil manfaatnya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mengupayakan hal-hal berikut:

- (1) Bangsa Indonesia harus dapat mempertahankan jati dirinya, kepribadiannya di tengah-tengah derasnya arus globalisasi saat ini.
- (2) Harus dicegah agar tidak terjadi dominasi informasi oleh negara maju.
- (3) Harus diupayakan agar globalisasi informasi tidak mematikan nilai-nilai budaya asli.
- (4) Harus diusahakan agar globalisasi tidak memperlebar kesenjangan antara masyarakat kota dengan desa.



*Globalisasi membuat pasar tradisional di kota-kota besar semakin tergusur.
Sumber: www.tembi.org/.../images/beringharjo2.jpg*

Rangkuman

1. Istilah globalisasi berasal dari kata “*globe*” (peta dunia yang berbentuk bola). Dari kata “*globe*” ini selanjutnya lahir istilah “*global*” (yang artinya meliputi seluruh dunia). Dari kata “*global*” ini lahirlah istilah “globalisasi”, yang bermakna sebuah proses mendunia. Globalisasi adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia
2. Gagasan tentang globalisasi di bidang hak asasi manusia telah ada sejak ditandatanganinya Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia Sedunia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
3. Gagasan tentang globalisasi dalam bidang demokrasi mulai berkembang pada abad 18 di Eropa dan Amerika Serikat serta abad 19 dan 20 di Asia dan Afrika.
4. Abad 21 ditandai sebagai era globalisasi. Era globalisasi bukan hanya tantangan , tetapi juga sekaligus mempunyai peluang. Globalisasi memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan
5. Menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif dan negatif, dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkannya.
6. Globalisasi bagi bangsa Indonesia dimana masyarakatnya memiliki multi etnis dengan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Latihan

a. Tugas Individu:

1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi itu jelaskan dengan kalimatmu sendiri?
2. Jelaskan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita dewasa ini!
3. Jelaskan proses terjadinya globalisasi!
4. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong terjadinya globalisasi!
5. Carilah beberapa contoh budaya Barat yang telah masuk dan mempengaruhi kebudayaan kita! Apakah konser musik Barat yang ada sekarang ini juga akibat dampak globalisasi?
6. Apa pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya terhadap kepribadian Indonesia?
7. Siapa sesungguhnya yang lebih beruntung dengan sistem perdagangan pasar bebas seperti sekarang ini?
8. Jelaskan sisi positif dan negatif dari internet!

b. Tugas Kelompok:

Diskusikan dengan temanmu jika kesulitan bertanyalah pada Bapak/Ibu guru dan hasilnya presentasikan di depan kelas!

1. Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi bagi Indonesia.
2. Apa saja yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi globalisasi tersebut.
3. Globalisasi itu merupakan tantangan tetapi sesungguhnya juga merupakan peluang bagi bangsa Indonesia.

B. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia

1. Perlunya Hubungan Internasional bagi Suatu Negara

Didorong oleh keinginan serta kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, maka manusia membentuk kelompok-kelompok sosial demi kelangsungan hidupnya. Mereka dapat merasakan banyak manfaat serta keuntungan yang dapat diperoleh dari kerja sama itu. Pengalaman hidup dalam kelompok itu kemudian menumbuhkan berbagai kepentingan kelompok. Berangkat dari kepentingan kelompok inilah yang kemudian mendorong terjadinya hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya.

Hubungan yang terjadi antarnegara inilah yang dimaksud dengan hubungan internasional. Adapun alasan perlunya kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

- a. Setiap bangsa tidak hidup sendiri, tetapi dikelilingi oleh masyarakat bangsa-bangsa.
- b. Pada hakekatnya setiap bangsa ada saling ketergantungan dengan bangsa lain.
- c. Di era yang disebut globalisasi ini negara yang tidak menjalin hubungan dengan negara lain akan tertinggal, dan bisa terkucil.
- d. Setiap negara memiliki sumber-sumber kekayaan yang berbeda dengan negara lain.
- e. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.
- f. Untuk menciptakan saling pengertian antar bangsa.



Gedung Markas Besar PBB di New York
Sumber: www.bbc.co.uk/.../08/070830_unchemicalau.shtml

2. Tujuan Kerja Sama Internasional

Betapapun majunya suatu negara, pasti tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia tetap memerlukan kerja sama dengan negara lain. Negara-negara yang ada di dunia ini hidupnya akan saling membutuhkan. Karena itu kerja sama internasional mempunyai sejumlah tujuan:

- a. Memacu pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara.
- b. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
- c. Menciptakan saling pengertian antarbangsa/negara.
- d. Mempererat hubungan persahabatan antarbangsa
- e. Membina dan menegakkan perdamaian dunia.



*Presiden SBY mengisi buku tamu sebelum pembukaan ASEAN Forum 2007 di Sekretariat ASEAN Foundation Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan
Sumber: www.presidensby.info/imageD.php/2098.jpg*



*Para pemimpin negara-negara ASEAN foto bersama pada pembukaan KTT ke 13 ASEAN di Hotel Shangri-La, Singapura
Sumber: foto: anung/presidensby.info*

3. AFTA sebagai Contoh Kerja Sama Internasional ASEAN

Kerja sama antarnegara dapat terjadi antara dua negara saja, juga dapat terjadi antar lebih dari dua negara. Kerja sama yang diadakan hanya oleh dua negara ini dapat dikatakan sebagai kerja sama bilateral, sedangkan yang melibatkan lebih dalam dua negara adalah kerja sama multilateral. ASEAN (Asosiasi South East Asia Nation) adalah suatu kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu anggota dan menjadi salah satu pendirinya.

AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang artinya pasar bebas di kawasan Asean telah disepakati mulai berjalan sejak tahun 2003. Dengan AFTA ini, negara-negara anggota ASEAN akan mempraktekkan perdagangan (pasar bebas) antar sesama anggota. Artinya produk salah satu negara anggota ASEAN bisa dijual dengan leluasa di negara anggota lainnya, tanpa bea masuk sebagaimana yang selama ini terjadi. Tanpa bea masuk ini berarti merupakan penghematan luar biasa terhadap biaya dari produk luar negeri tersebut. Ini akan berbeda dengan praktek selama ini: yaitu biaya sangat banyak dikeluarkan untuk bea masuk. Lebih-lebih untuk barang-barang tertentu, yang karena ada proteksi dari pemerintah, maka harus dengan bea masuk yang sangat tinggi. Dengan tanpa bea masuk ini berarti bahwa produk luar negeri mampu menekan biaya sampai semurah-murahnya. Akibat dengan harga yang sangat murah, barang impor ini akan mudah bersaing dengan produk dalam negeri. Jika barang impor ini sama, apa lagi lebih bagus, kualitasnya dibandingkan dengan produk dalam negeri, maka mau tidak mau konsumen kita akan memilih barang impor.

AFTA di satu sisi akan menguntungkan konsumen, karena dapat memperoleh barang bagus dengan harga yang murah. Jika dampak AFTA bagi konsumen sangat positif dan menguntungkan, akan tetapi bagi produsen tidak mustahil jika berdampak negatif. Bisa jadi produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri di negeri sendiri.

4. Politik Luar Negeri Indonesia

Apakah politik luar negeri itu? Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain yang berpijak kepada kepentingan nasional negara yang bersangkutan.

Bagi Indonesia, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasionalnya guna mencapai tujuan nasional. Jadi politik luar negeri Indonesia tidak lain adalah bagian dari politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional negara Indonesia.



*Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington, DC
Sumber: photobucket.com/.../nationalmonument.jpg*

5. Landasan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Politik luar negeri Indonesia berpijak pada landasan-landasan sebagai berikut:

1) Landasan Idiil

Landasan idiil adalah Pancasila, bahwa bangsa Indonesia mengakui semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal-usul keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia

atau penghisapan oleh bangsa lain, menempatkan persatuan dan kesatuan, menunjukkan bangsa Indonesia yang memiliki sifat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan menunjukkan pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial.

2) Landasan Konstitusional (UUD 1945)

- (a) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan bahwa :
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- (b) Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan bahwa:
“...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Pasal-pasal UUD 1945:

Pasal 11 ayat 1 : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 13 ayat 1 : Presiden mengangkat duta dan konsul.

Pasal 13 ayat 2 : Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13 ayat 3 : Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Landasan Operasional

Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kebijakan presiden dalam bentuk keputusan presiden.

Kebijakan menteri luar negeri yang membentuk peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.

6. Asas Politik Luar Negeri Indonesia

Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia. Aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional melainkan aktif menjalankan kebijakan luar negeri. Aktif dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

7. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia, (a) mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, (b) memperjuangkan perdamaian yang abadi, (c) memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan.

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan antara lain: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...”. Rumusan ini merupakan sumber utama bagi politik luar negeri Republik Indonesia.

Sejak bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan belenggu penjajahan dari Belanda, cita-cita Bangsa Indonesia tidak terlepas kepada pencapaian kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional dengan tegas menyatakan: Indonesia merdeka dan berdaulat hanyalah merupakan sarana, suatu alat untuk mencapai susunan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh Rakyat Indonesia. Untuk mengejar serta melaksanakan cita-cita nasional itu perlu adanya kerja sama dan hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia. Hal-hal inilah yang merupakan titik tolak politik luar negeri Indonesia.



*Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag Belanda
Sumber: photobucket.com/.../nationalmonument.jpg*

8. Perkembangan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Perang Dunia II telah membawa perubahan-perubahan yang besar pengaruhnya terhadap politik bebas aktif. Perubahan tersebut antara lain berpusatnya kekuasaan dunia ke Amerika Serikat, dan Uni Soviet, yang kemudian menjadi dua kekuatan raksasa dunia. Yang disebut dengan Blok Barat (Amerika Serikat dengan sekutunya), dan Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya). Perubahan lain yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap politik bebas aktif adalah lahirnya semangat nasionalisme dan anti penjajahan terutama di kalangan bangsa-bangsa Asia Afrika.

a. Perang Dingin

Berhubung kedua kekuatan raksasa tersebut mempunyai sistem dan kepentingan yang sangat berbeda, maka dengan sendirinya terdapat perselisihan pendapat antara keduanya. Perselisihan itu sebenarnya telah mulai tampak ketika Perang Dunia II memasuki babak terakhir, terutama dalam menentukan nasib negara-negara yang kalah perang. Tetapi perselisihan tersebut baru memuncak dengan hebat setelah berakhirnya perang. Perkembangan hubungan kedua negara raksasa itu dalam masa pasca perang dikenal dengan nama Perang Dingin yang penuh dengan serba aneka ketegangan.

Dalam suasana Perang Dingin tersebut kekuatan raksasa itu berlomba-lomba menyusun dan mengembangkan kemampuannya di semua bidang, baik politik, ekonomi, militer budaya maupun propaganda. Kedua kekuatan itu membagi dunia dalam dua blok yang bersaing satu sama lain dalam menanamkan pengaruh masing-masing terhadap negara lain di dunia.

Pembagian dunia dalam dua kutub seperti diuraikan di atas dikenal pula dengan sebutan “*bipolaritas*”, di mana masing-masing menuntut supaya semua negara di dunia ini menjatuhkan pilihannya kepada salah satu blok. Pilihan itu demikian ketatnya, sehingga sikap tidak “pro” sudah dianggap “anti”, sedangkan sikap netral dikutuk.

b. Lahirnya Politik Bebas Aktif

Perang Dunia II tidak saja menciptakan “*bipolaritas*” dalam hubungan internasional tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam proses penghapusan penjajahan. Sebagai akibatnya semangat kebangsaan secara merata meluap-luap dan meledak dalam bentuk perjuangan kemerdekaan terhadap penjajahan. Wilayah jajahan Belanda, Hindia Timur, yang diduduki Jepang selama Perang Pasifik tidak terkecuali. Dua hari sesudah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945, jajahan Belanda itu menyatakan kemerdekaannya ke seluruh penjuru dunia.

Dengan proklamasi tersebut munculah Indonesia sebagai negara merdeka di peta dunia. Lahirnya “politik bebas aktif” yakni saat pidato Wakil Presiden Muhammad Hatta di PBB beberapa tahun setelah Indonesia merdeka.



Suasana Sidang Konferensi Asia Afrika 1955
Sumber: www.deplujunior.org/assets/images/20061226



Suasana Konferensi Asia Afrika di Bandung
lewat konferensi ini solidaritas negara-negara berkembang semakin solid
Sumber: <http://indonesian.cri.cn/mmsource/images/2005/04/13/zl2.jpg>

c. *Wujud Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif*

Wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah sebagai berikut:

1) Ikut serta dalam ASEAN

Indonesia bukan hanya anggota ASEAN, akan tetapi juga sebagai pendiri. Sekjen pertama ASEAN dipercayakan kepada HR. Dharsono dari Indonesia. Indonesia menyediakan tempat dan gedung untuk sekretariat ASEAN di Jakarta.

2) Peran Kontingen Garuda Indonesia

Sumbangan RI dalam mewujudkan perdamaian dunia dibuktikan dengan mengirimkan kontingen Garuda sampai empat belas kali ke luar negeri. Kontingen ini dikirim ke negara yang sedang mengalami konflik. Kontingen Garuda berada di bawah komando PBB.

3) Peran dalam KTT Non-Blok

Republik Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok tidak pernah absen setiap diselenggarakan KTT yang sudah dua belas kali, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Non Blok kesepuluh pada tahun 1992.

4) Peranan dalam Organisasi Konferensi Islam

Walaupun RI bukan Negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dapat diterima menjadi anggota OKI dan banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan umat Islam.

Rangkuman

- Hubungan internasional adalah hubungan yang terjadi antarnegara. Adapun alasan perlunya kerjasama internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap bangsa tidak hidup sendiri, tetapi dikelilingi oleh masyarakat bangsa-bangsa.
 - b. Pada hakekatnya setiap bangsa ada saling ketergantungan dengan bangsa lain.
 - c. Di era yang disebut globalisasi ini negara yang tidak menjalin hubungan dengan negara lain akan tertinggal, dan bisa terkucil.
 - d. Setiap negara memiliki sumber-sumber kekayaan yang berbeda dengan negara lain.
 - e. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.
 - f. Untuk menciptakan saling pengertian antar bangsa.
- Kerja sama antarnegara dapat terjadi antara dua negara saja, juga dapat terjadi antar lebih dari dua negara. Kerja sama yang diadakan hanya oleh dua negara ini dapat dikatakan sebagai kerja sama bilateral, sedangkan yang melibatkan lebih dalam dua negara adalah kerja sama multilateral.
- Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain yang berpijak kepada kepentingan nasional negara yang bersangkutan.
- Bagi Indonesia, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasionalnya guna mencapai tujuan nasional.
- Jadi politik luar negeri Indonesia tidak lain adalah bagian dari politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional negara Indonesia.

- Wujud Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
 - 1) Ikut serta dalam ASEAN
 - 2) Mewujudkan perdamaian Dunia dengan mengirimkan kontingen Garuda sampai empat belas kali.
 - 3) Berperan aktif dalam gerakan Non Blok.
 - 4) Berperan aktif dalam Organisasi Konferensi Islam
 - 5) Berperan aktif di PBB.

Latihan

a. Tugas Individu:

1. Jelaskan pengertian hubungan internasional dengan kalimatmu sendiri!
2. Mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan internasional?
3. Apa tujuan dilakukannya kerjasama internasional?
4. Apa yang kamu ketahui tentang AFTA?
5. Sebutkan 3 macam saja bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia!
6. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri itu?
7. Sebutkan landasan politik luar negeri Indonesia?
8. Jelaskan asas politik luar negeri Indonesia?
9. Uraikan ciri-ciri politik bebas aktif?
10. Terangkan tujuan politik luar negeri Indonesia?
11. Jelaskan perkembangan politik luar negeri Indonesia!
12. Tunjukkan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif!

b. Tugas Kelompok:

Bentuklah empat kelompok di kelasmu, buatlah makalah sederhana dengan topik di bawah ini, selanjutnya presentasikan di depan kelas.

1. Perlunya setiap negara untuk menjalin hubungan internasional.
2. ASEAN kerjasama internasional di kawasan Asia Tenggara.
3. Perkembangan politik luar negeri Indonesia.
4. Wujud nyata dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

C. Dampak Globalisasi bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Akhir abad 20 memasuki awal abad 21 ditandai oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi komunikasi elektronik dan teknologi komputer. Televisi yang merupakan barang mewah pada tahun 1960-an, kini telah dapat dilihat oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Indonesia juga memiliki semakin banyak stasiun televisi. Siaran-siaran televisi dari luar negeri juga makin mudah dijangkau.

Jaringan telepon tampak mulai makin masuk ke pelosok-pelosok. Telepon seluler dan faksimile makin merupakan hal biasa. Begitu pula *PC (personal computer)* pun berkembang dalam format makin kecil dan makin canggih, dan dalam waktu dekat akan dapat menjadi bagian sebuah jaringan komunikasi global.

Paduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi akan semakin terasa dampaknya di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini akan memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari mana pun dalam waktu yang amat singkat. Interaksi antar individu juga akan makin meningkat dan melampaui batas-batas negara.

Ada dua hal yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi itu. *Pertama*, adalah globalisasi informasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemicunya adalah luas dan cepatnya jaringan komunikasi bekerja. *Kedua*, makin menonjolnya peranan individu. Penyebabnya adalah, makin mudahnya individu memperoleh informasi lengkap yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan bagi diri sendiri.

Globalisasi informasi memang menambah pengetahuan kita dan memperkaya kita dengan bahan-bahan pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, informasi tersebut tentu memuat pula kepentingan-kepentingan, dari pembuatnya. Kepentingan-kepentingan tersebut tentunya tidak seluruhnya sejalan dengan kepentingan nasional kita.

Disamping itu, perlu diperhatikan bahwa globalisasi pada dasarnya membentuk jaringan ekonomi global. Jaringan tersebut menjangkau pelosok-pelosok dunia dengan kendali yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa. Bangsa yang memiliki daya saing tinggi akan mendapatkan peluang yang

baik untuk bermain dalam jaringan ekonomi global itu. Sehingga mendapatkan keuntungan dan memainkan peran yang berarti. Namun, bagi bangsa yang tidak memiliki daya saing yang memadai, hal itu dapat mendatangkan masalah baru. Karena menjadi bangsa yang makin tergantung pada bangsa lain.

Tanpa daya saing, ketergantungan sebuah bangsa akan menjadi semakin nyata. Sebab kekuatan ekonomi yang mengendalikan jaringan global tersebut bukanlah pihak yang ingin mewujudkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan global. Melainkan mencari keuntungan di pasar global dan mengambil keuntungan dimanapun mereka berada. Dengan demikian, terbuka kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial di antara bangsa-bangsa industri maju yang makin kaya dengan bangsa-bangsa terbelakang yang makin miskin.

Sebaiknya Kamu tahu

Tidak selamanya globalisasi membawa pengaruh positif. Globalisasi juga bisa membawa pengaruh negatif. Dengan kata lain, globalisasi memiliki dua pengaruh sekaligus, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Ideologi dan Politik Indonesia

a. Ideologi

Globalisasi mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Di tengah keterpurukan Indonesia, banyak orang mulai tertarik pada ideologi tersebut. Apalagi mereka menghadapi kesulitan hidup yang berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan mereka berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan.

b. Politik

Globalisasi dengan “jargonnya” seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Apalagi ketika bangsa dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan maka rakyat

di mana-mana menuntut diadakannya perbaikan-perbaikan di berbagai bidang kehidupan khususnya di bidang politik.

Dampak positif globalisasi di bidang politik antara lain pemerintahan dijalankan secara transparan, demokratis dan bertanggungjawab. Dengan transparansi akan dapat dicegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih. Semakin berkembangnya demokrasi akan membuat partisipasi rakyat dalam politik semakin meningkat. Legitimasi pemerintahan yang sedang berkuasa akan semakin meningkat, sehingga kebijakan yang diambil akan mendapat dukungan dari rakyat. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk bisa melakukan kontrol pada pemerintah, sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa diperkecil. Akhirnya pemerintahan yang baik dan bersih dapat diwujudkan.



*[Demonstrasi mahasiswa](http://pinikampus.files.wordpress.com/.../demo-bbm.jpg), menolak kenaikan harga BBM
Sumber: pinikampus.files.wordpress.com/.../demo-bbm.jpg*



Globalisasi membuat demokrasi dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat berkembang subur di berbagai negara

Sumber: opinikampus.files.wordpress.com/.../demo-bbm.jpg

2. Pengaruh Globalisasi terhadap Ekonomi Indonesia

Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan *transnasional* yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas.

Menguatnya kapitalisme menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, akumulasi modal, keuntungan, serta manajemen yang rasional. Pertimbangan biaya dan harga serta kualitas produk menjadi dasar keputusan untuk memproduksi suatu barang di suatu lokasi atau suatu negara tertentu. Sedangkan pertimbangan kemampuan menyalurkan secara cepat barang-barang yang produknya sedang digemari mulai dituntut. Sehubungan dengan ini tenaga kerja yang murah, berlimpahnya bahan baku tidak dapat diandalkan lagi. Akan tetapi yang penting ialah kecepatan proses produksi pada

kualitas yang prima. Standar internasional serta kemampuan menyalurkan pesanan barang dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen penting sekali.

Sebaiknya Kamu Tahu				
Restoran Asing yang Membuka Cabang di Indonesia				
Nama	Jenis Usaha	Perusahaan	Asal	Jumlah
KFC	Ayam Goreng	Fastfood Indonesia	AS	237
Mc Donald's	Burger & Ayam	Ramaco Gerbang M	AS	110
Pizza Hut	Kedai Pizza	Sarimelati Kencana	AS	95
Dunkin Donuts	Kedai Donat	Dunkindo Lestari	AS	100
Hard Rock Kafe	Kafe	Plenet Dwimas	AS	2
Bread Talk	Roti	Selaksa Anugerah	Singapura	19

a. Kapitalisme Global

Kapitalisme global adalah upaya meraih keuntungan dan mengakumulasi modal tanpa sekat yang berupa negara. Dalam perkembangannya, kapitalisme global ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian orang di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seseorang akan merasa ada sesuatu yang hilang bila dalam satu hari tidak melihat TV, membaca koran, ataupun membaca email. Dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, dengan mudahnya seseorang dapat memindahkan ribuan maupun jutaan dollar melintasi batas negara dalam hitungan detik dengan hanya menekan-nekan tombol *Personal Computer* (PC) di rumah atau menggunakan *telepon seluler*.

Kapitalisme global ini juga mengubah cara pandang orang terhadap berbagai hal. Cara pandang tentang uang misalnya, bukan lagi hanya sebagai alat tukar.

Uang juga sebagai barang dagangan seperti komoditas lainnya. Adanya profesi pedagang *valuta asing* membuktikan hal tersebut. Uang yang biasa terlihat sebagai lembaran-lembaran kertas, di tangan lembaga keuangan saat ini berkembang menjadi bentuk yang lebih canggih seperti *bonds*, *stocks*, *comercial notes* dan lain sebagainya. Sehingga dapat dibayangkan betapa rumitnya perputaran uang di dunia ini.

Perkembangan kapitalisme yang semakin mengglobal tadi mendorong terjadinya berbagai kondisi baru seperti:

- (1) Terciptanya berbagai inovasi yang memunculkan produk-produk baru. Kondisi ini menyebabkan melimpahnya produk dengan harga yang relatif lebih murah, sehingga meningkatkan persaingan.
- (2) Terjadinya *relokasi* perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keunggulan komparatif suatu negara, agar dapat memenangkan persaingan tersebut. Misalnya saja, *relokasi* atas industri padat karya untuk mendapatkan pekerja dengan upah yang lebih murah. Dalam proses ini muncullah berbagai perusahaan *multinasional*, yaitu perusahaan yang mempunyai cabang di berbagai negara.
- (3) Terjadinya perputaran modal yang sangat cepat yang menembus batas waktu dan ruang. Modal yang berputar tersebut bergerak tidak hanya di sektor yang produktif tetapi juga yang spekulatif.
- (4) Terbentuknya tatanan dunia baru yang dimotori lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, WTO dan sebagainya. Secara serentak lembaga internasional tersebut mengkampanyekan perdagangan bebas diseluruh dunia. Aturan-aturan *liberalisasi*, *deregulasi* dan *privatisasi* merebak di segala penjuru dunia.
- (5) Investasi asing, terbukti menguras sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang. Manfaat paling besar justru tidak dinikmati oleh negara berkembang melainkan negara maju. Harus diakui pula, bahwa penanaman modal asing bermanfaat dalam alih teknologi, manajemen dan pemasaran. Di samping itu, tentu saja bisa menciptakan lapangan kerja.

b. Kapitalisme di Indonesia

Apakah kapitalisme sesuai untuk diterapkan di Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu merujuk UUD 1945. Pasal 33 tidak berubah sehingga masih dapat dirujuk, yaitu:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UUD 1945 mengenal pembedaan antara barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan yang tidak. Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Paham kapitalisme yang kita harapkan hendaknya disertai persyaratan bahwa semuanya harus berfungsi sosial. Di negara-negara lain yang sangat kapitalis, kapital memang selalu dibuat berfungsi sosial melalui perpajakan, distribusi pendapatan, jaminan sosial, sistem perburuhan dan perlindungan bagi yang lemah.

Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

c. Kemandirian Ekonomi Indonesia

Saat ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki kapitalisme global. Dalam masa sebelum krisis peran penanaman modal asing (PMA) cenderung meningkat. Hal ini diindikasikan oleh nilai persetujuan PMA yang meningkat dari US\$8,2 miliar pada tahun 1993 menjadi US\$39,9 miliar pada tahun 1995. Meskipun angka itu menurun di tahun 1996, jumlahnya masih lebih besar yaitu US\$29,9 miliar di tahun 2002.

Persoalan besar dari hadirnya modal asing di Indonesia adalah apakah manfaat seluruhnya yang diperoleh pemodal asing di Indonesia dibagi secara adil antara pemodal asing dan bangsa Indonesia. Selalu dikatakan bahwa modal asing membawa masuk modal, transfer teknologi, transfer kemampuan manajemen dan membuka lapangan kerja. Secara teoritis memang benar, tetapi sebenarnya belum pernah ada yang menghitung secara kuantitatif apakah semuanya yang dikemukakan memang menjadi kenyataan.

Sebaliknya, yang kita alami dalam bentuk penderitaan yang cukup dahsyat adalah bahwa keterbukaan dalam arus modal telah membawa konsekuensi Indonesia masuk ke dalam krisis. Aliran masuk modal swasta yang terus meningkat seperti disebutkan tadi, tiba-tiba berbalik menjadi arus keluar secara besar-besaran. Pada triwulan IV tahun 1997, arus modal swasta (bersih) tercatat minus US\$8,6 miliar dan menurun lebih jauh menjadi minus US\$13,8 miliar pada tahun 1998. Hal ini mengakibatkan merosotnya nilai rupiah dan menyebabkan Indonesia memasuki krisis (Kwik Kian Gie, 2003:11).

Berbagai kenyataan di atas memberikan pelajaran pada kita bahwa, kapitalisme global membuka peluang untuk mengembangkan perekonomian. Namun demikian, kapitalisme global juga dapat merusak perekonomian Indonesia. Bahkan juga menghilangkan kemandirian kita.

Beberapa dampak yang harus ditanggung Indonesia:

- (1) Indonesia yang kaya akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa sendiri. Negara yang dikarunia hutan yang begitu lebat dan luas sehingga menjadikan negara produsen kayu terbesar di dunia, dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang sama sekali tidak mencukupi untuk menghutankan kembali pada taraf yang minimal saja. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan para kroninya yang tidak bertanggung jawab. Rakyat yang merupakan pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

- (2) Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 miliar dollar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 miliar dollar AS.
- (3) Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda. Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI, sambil dimintai pertanggung jawaban tentang bagaimana dirinya mengurus Indonesia. Anehnya setiap tahun kita merasa bangga bila utang yang kita peroleh bertambah. Utang dipicu terus tanpa kendali, sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok, dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang.
- (4) Bank-bank kita digerogoti oleh pemiliknya sendiri. Bank yang kalah clearing dan harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia dengan menciptakan apa yang dinamakan *fasilitas diskonto*. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk pembentukan *konglomerat* sambil melakukan *mark up*.
- (5) Pada tahun 1998 kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah menurun drastis. Rupiah melemah dari Rp.2.400 per dollar menjadi Rp.16.000 per dollar. Dalam kondisi yang seperti ini Indonesia yang anggota IMF dan patuh membayar iurannya menggunakan haknya untuk minta bantuan. Paket bantuan IMF disertai dengan syarat yang isinya demikian tidak masuk akal dan demikian menekan serta merugikan Indonesia.
- (6) Bagaimana mengakhiri kondisi kita yang sudah kehilangan kemandirian dan kedaulatan menentukan nasib bangsa kita sendiri. Tidak lain modal utamanya adalah kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai pemahaman yang jelas bahwa kita sudah tidak mandiri, dan mempunyai tekad untuk merebut kembali kemandirian kita (Kwik Kian Gie, 2003:14).

Untuk menghadapi kapitalisme global pemerintah perlu untuk mengusahakan hal-hal berikut:

- (1) Perlunya segera dilakukan pemberantasan KKN secara bersungguh-sungguh. Pengurangan KKN hingga kondisi yang sangat minim merupakan modal yang besar untuk menghadapi era kapitalisme global.
- (2) Diperlukan pemerintahan yang baik dan bersih. Pengalaman kita menunjukkan, bahwa ketiadaan pemerintahan yang baik dan bersih menyebabkan kesejahteraan rakyat sulit ditingkatkan.
- (3) Mengupayakan agar perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung secara bertahap, sehingga memberikan waktu bagi pelaku ekonomi yang bergerak di industri yang tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kompetitif.

Tingkat kemajuan dan kemakmuran di negara-negara penggagas globalisasi yang relatif baik, apalagi didukung kemampuannya melakukan lobi-lobi internasional, membuat bangsa-bangsa dunia ketiga tertarik untuk menerima tawarannya. Indonesia tidak lepas dari rangkaian proses tersebut. Itulah sebabnya, maka kita membuka diri dari produk-produk luar negeri, menerima investasi, televisi, mesin cuci, magic jar, dan lain-lain. Sementara itu anak-anak kita menjadi tidak kenal lagi makanan tradisional seperti getuk, tiwul, lentuk, cemplon, dan lain-lain.



Makanan Tradisional Indonesia lezat da bergizi
Sumber: <http://www.trulyjogja.com/modules>



*Restoran KFC tersebar di kota-kota Indonesia
Sebuah contoh globalisasi ekonomi
Sumber: Jakartadailyphoto.com/wp-content/uploads/2006...*

3. Pengaruh Globalisasi terhadap Sosial Budaya Indonesia

Pengaruh globalisasi telah masuk di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan desa kita, maupun kehidupan kota-kota seantero Indonesia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di negara maju cepat sekali ditiru oleh Saudara-saudara kita di pelosok desa hingga kota.

Kaum muda kita lupa akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Lihatlah, di kota-kota kecil saja kita akan melihat remaja-remaja perempuan kita mengenakan dandanan ala selebritis. Mereka mengenakan rok atau celana yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Mereka membiarkan bagian perut atau pinggang terbuka dipadu dengan atasan super ketat. Rambut asli disembunyikan diganti dengan berbagai rambut palsu atau dicat beraneka warna.

Sementara itu remaja pria juga tidak mau ketinggalan. Mereka mengenakan pakaian yang aneh-aneh. Ada yang bercelana super ketat, namun ada pula yang

super longgar, rambut dicat, dibentuk beraneka model, disertai asesoris yang beraneka rupa pula. Pendek kata, kini orang lebih suka menjadi orang lain dengan cara menutupi identitas dirinya yang asli.

Di bidang seni budaya, tumbuh pesat cabang-cabang seni modern yang dapat menggeser cabang-cabang seni tradisional seperti band, film, dan lain-lain. Tempat hiburan, seperti sanggar seni modern, diskotik, kafe, galeri. Di samping itu berkembang pula model fashion show, kontes ratu kecantikan dan lain-lain. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lahir penemuan-penemuan baru yang kemudian dilempar di pasaran. Akibatnya menggeser produk-produk lama, seperti alat-alat rumah tangga dari bambu diganti dari plastik. Dari tanah liat diganti dengan aluminium. Alat transportasi atau komunikasi seperti gerobak, andong atau dokar diganti bus, pesawat terbang, kentongan diganti handphone, dan lain-lain.



Globalisasi membuat budaya negara maju mengalir deras ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia

Sumber: Jakartadailyphoto.com/wp-content/uploads/2006...

4. Pengaruh Globalisasi terhadap Hankam Indonesia

Globalisasi, mampu membuka cakrawala berpikir masyarakat ini secara global. Apa yang terjadi di luar negeri dan dianggap baik bisa mengilhami masyarakat untuk diterapkan Indonesia. Bila ini terjadi, maka bisa melahirkan

berbagai permasalahan. Jika aspirasi itu dipenuhi, belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Akan tetapi bila tidak dipenuhi, bisa dianggap pemerintah tidak aspiratif sehingga mereka bisa bertindak anarkis.

Dampak globalisasi di bidang Hankam yang lainnya adalah, munculnya kejahatan lintas negara. Contohnya terorisme, sindikat narkoba, penjualan senjata gelap, perompakan di laut, mafia pencucian uang, serta kejahatan melalui internet.

Proses globalisasi ternyata tidak hanya mendorong terwujudnya penyatuan ekonomi dan sosial budaya pada tingkat global, tetapi sekaligus mendorong perluasan jaringan kejahatan. Berbagai jenis kejahatan akhirnya menjadi kejahatan transnasional.

Berbagai negara di dunia mengakui, bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional jauh lebih rumit ketimbang ancaman kekuatan militer. Jangkauan kejahatan transnasional dengan cepat meluas, karena pengaruh globalisasi.

Indonesia sudah merasakan betapa dahsyatnya kejahatan tersebut. Aksi teroris telah banyak merenggut nyawa, menghancurkan sarana dan prasarana, merusak perekonomian, menebar konflik dan memperburuk citra Indonesia di mata internasional.





*Gambar ledakan bom Bali I dengan korban ratusan jiwa
di era globalisasi terorisme berskala internasional
Sumber: swaramuslim.net/.../html/bali/BaliBomb11.jpg*



*Kelaparan di Papua,
begitu berita dimuat di surat kabar, perhatian pemerintah dan masyarakat menjadi sangat besar
Sumber: swaramuslim.net/.../html/bali/BaliBomb11.jpg*

Rangkuman

- Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai ancaman dan yang kedua sebagai peluang.
- Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif seperti merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme, sekularisme, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya.
- Hal-hal positif itu yang merupakan peluang, misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme, kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan dan sebagainya.
- Dampak positif globalisasi di bidang politik antara lain pemerintahan dijalankan secara transparan, demokratis dan bertanggungjawab.
- Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut:
 - a. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi suatu negara.
 - b. Mendorong kita untuk memproduksi barang yang berkualitas tinggi.
 - c. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi.
 - d. Dimungkinkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara.

- Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya antara lain kita dapat mengambil pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Nilai-nilai yang baik tersebut misalnya etos kerja yang tinggi, disiplin, memiliki jiwa kemandirian yang kuat, suka membaca, meneliti dan menulis, rasional, sportif, biasa bekerja secara terprogram, dan sebagainya,
- Aspek negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya antara lain sebagai berikut:
 1. Semakin ketatnya persaingan antar individu, yang dapat membuat orang semakin individualis.
 2. Munculnya sifat *hedonisme*, yakni ingin menikmati sepuas-puasnya kenikmatan duniawi. Dampaknya akan berkembang pola hidup konsumerisme dan materialisme.
 3. Sifat *individualisme* yang berlebihan berdampak semakin menipisnya sifat kekeluargaan.
 4. Kesenjangan yang semakin tajam antara kelompok kaya dan miskin.

Latihan

a. Tugas Individu

Kerjakan di Buku Tulismu!

1. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi di bidang ekonomi bagi Indonesia?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi di bidang politik bagi Indonesia?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi di bidang sosial budaya bagi Indonesia?

4. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi di bidang hankam bagi Indonesia?
5. Jelaskan menurutmu, apa saja yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi globalisasi tersebut!
6. Apa saja sisi positif dan sisi negatif dari globalisasi bagi bangsa Indonesia?
7. Jelaskan bahwa globalisasi itu merupakan tantangan tetapi sesungguhnya juga merupakan peluang bagi bangsa Indonesia!
8. Jelaskan mengapa kemampuan untuk berkompetisi di segala bidang bagi suatu bangsa sangat penting pada era globalisasi sekarang ini!

b. Tugas Kelompok:

Diskusikan dengan teman dan gurumu tentang bagaimana sebaiknya posisi yang harus diambil bangsa Indonesia agar dapat mengambil keuntungan serta menghindari kerugian yang diakibatkan oleh globalisasi?

D. Menyikapi Dampak Globalisasi

1. Bagaimana Sebaiknya Sikap Kita di Tengah Dunia yang Gemerlap?

Dunia pada saat ini seolah menjadi satu padu, batas wilayah antar negara menjadi semakin kabur. Di belahan dunia yang satu seseorang, dapat dengan mudah berbicara lewat telepon dengan Saudaranya yang tengah berada di belahan dunia lain. Kita bisa menyaksikan Olimpiade Atlanta di Amerika Serikat lewat siaran langsung TV. Kita dapat mengikuti siaran langsung tersebut persis seperti yang disaksikan oleh orang-orang di tempat kejadian. Kita juga bisa mengirim berita lewat tulisan melalui email di internet.

Dengan alat komunikasi canggih tersebut, *keglamouran* dan kehidupan para artis di *Hollywood* Amerika Serikat bisa kita saksikan dari sini. Begitu juga

penderitaan yang terjadi akibat bencana di negara lain yang jauh juga bisa kita saksikan dari sini, lewat siaran televisi.

Globalisasi memungkinkan pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya yang beraneka ragam di seluruh dunia. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan pertukaran kebudayaan. Setiap hari TV menghadirkan dunia ke kamar kita. Kita akan menerima suguhan berita, adegan, peristiwa, yang luar biasa banyaknya. Sudah barang tentu akan terjadi gesekan, tabrakan, dan kebingungan dalam diri kita.

Bagaimana dan apa yang terjadi jika kita menyaksikan semua acara yang ada di TV (jika perlu seluruh saluran). Belum lagi jika kita pergi ke Mall atau pusat perbelanjaan. Kita akan menyaksikan mode pakaian serta beragam jenis makanan, adalah contoh lain dari dampak globalisasi. Barang-barang yang dipajang di Mall di Indonesia sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan di negara-negara maju. Sebaliknya di Mall kita akan sulit sekali untuk menyaksikan orang Jawa memakai blangkon, dan ibu-ibu memakai kebaya, kecuali mereka sedang menjadi penerima tamu dalam acara perkawinan. Dari sekian contoh itu, yang paling menonjol adalah nilai dan peran materialisme. Hampir semuanya akan diukur dengan seberapa tebal kantong kita, ketika kita berada di situasi seperti itu.

Menyikapi kondisi yang demikian ini kita harus bijak. Kita ambil yang baik darimanapun datangnya. Kita buang yang buruk dari manapun asalnya. Selanjutnya kita ciptakan sesuatu yang baru, yang sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan falsafah bangsa, dan sesuai dengan budaya bangsa.

2. Bagaimana Sebaiknya Sikap Kita Terhadap Derasnya Informasi?

Pada saat Indonesia memutuskan untuk memiliki sistem komunikasi satelit domestik Palapa di tahun 1974. Sebenarnya Indonesia telah membuka diri memasuki era globalisasi. Apalagi dengan hadirnya satelit Palapa, Indonesia segera mengadopsi kebijakan angkasa terbuka. Tidaklah mengherankan, apabila kemudian, siaran TV negara Malaysia, Singapura dan Filipina dapat diterima oleh masyarakat di tempat-tempat tertentu di Indonesia. Pada saat itu orang mulai membandingkan antara siaran TVRI dengan TV asing. Apalagi setelah pemilikan

parabola diijinkan kesempatan untuk menikmati TV asing menjadi sangat terbuka. Dengan diijinkannya TV swasta nasional beroperasi, maka kemudahan untuk menikmati tayangan asing lewat TV domestik juga menjadi terbuka.

Proses globalisasi melalui siaran TV membuka peluang bagi masyarakat Indonesia, untuk mengetahui berbagai tayangan TV dunia. Kita semua tahu bahwa, pemasok tayangan TV yang terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Frekuensi penyaksian tayangan asing yang tinggi memungkinkan terjadinya proses sosialisasi dan adopsi nilai-nilai Barat atau negara maju ke negara berkembang.

Menyikapi hal ini, kita harus selektif di dalam memilih tayangan dan berita. Ada baiknya orang tua mendampingi putra-putrinya dalam menonton TV.



*Pesawat televisi hampir ada di setiap rumah tangga
Sumber: Dokumen pribadi*

Menyikapi Globalisasi sebagai Tantangan bagi Indonesia

Dengan alat komunikasi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD dan internet kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan parabola dan internet, kita dapat menyaksikan berbagai kejadian dunia, dari kamar tidur kita. Kita dapat terpengaruh oleh segala macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak kita dapat terpengaruh oleh segala macam *film karton* dan film-film yang tidak

seharusnya dilihat. Kita dapat dengan mudah terpengaruh oleh gaya hidup seperti yang terjadi di sinetron. Lewat TV juga ditayangkan program-program mimbar agama, ceramah, diskusi dan berita yang mengandung nilai-nilai positif, bahkan juga agamis. Namun biasanya hal-hal yang seronok, porno, aneh dan lucu, bandel, justru lebih berkesan dibandingkan dengan hal-hal yang datar, serius dan penuh nilai etika atau agama. Adegan kekerasan akan lebih berkesan di benak anak-anak dibandingkan dengan petuah agama.

Di kalangan tertentu ada anggota masyarakat yang merasa naik gengsinya jika mengikuti gaya hidup global. Untuk kalangan seperti ini, globalisasi merupakan gaya hidup, yang berarti mentalitasnya sudah terasuki oleh gaya hidup global. Contohnya ada gaya pergaulan kelompok menengah, kelompok ABG gedongan, kelompok eksekutif, kelompok anak muda sukses, kelompok anak orang kaya, dan masih banyak lagi kelompok yang dibangun atas dasar gengsi. Biasanya kelompok ini mempunyai gaya tersendiri dalam mendefinisikan keperluan sehari-hari. Kemana harus menonton, kemana harus jalan-jalan, kemana harus makan dan sebagainya.

Dalam kondisi seperti ini, banyak ancaman budaya berupa kebebasan yang datang dari dunia Barat. Dan ketika kebebasan itu berlebihan, maka nilai-nilai dan norma budaya lokal serta nasional, terlebih lagi nilai agama, akan terancam olehnya. Tentu kebebasan disini bukan dalam pengertian positif, seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat demi kontrol sosial, dan sejenisnya. Namun, kebebasan yang menjurus pada kepuasan lahiriah, *egoisme*, dan *hedonisme*. Akibat negatif dari kebebasan seperti inilah yang kemudian berupa kebebasan penyalahgunaan narkoba, kebebasan seks, kebebasan makan minum barang haram, dan sejenisnya.

Tugas

Tuliskan pendapatmu terhadap pernyataan di bawah ini dengan memilih, pernah atau tidak pernah. Jangan lupa berikan alasannya.

No	Pernyataan	Pernah	Tdk Pernah	Alasan
1	Menggunakan komputer			
2	Menggunakan hand phone			
3	Menggunakan internet			
4	Berkirim surat dengan e-mail			
5	Bepergian ke luar negeri			
6	Bepergian dengan pesawat terbang			
7	Mengunjungi supermarket			
8	Makan di restoran cepat saji			
9	Makan mie instant			
10	Mendengarkan musik barat			

Menyikapi Globalisasi sebagai Peluang bagi Indonesia

Di pihak lain, jika globalisasi memberi pengaruh hal-hal, nilai dan praktek yang positif, maka seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyerapnya. Terutama yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal atau nasional, terutama sekali nilai-nilai agama. Dengan demikian, bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di Barat, dapat masuk Indonesia dan dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat kita.

Adapun budaya positif tersebut misalnya, budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, *egalitarianisme*, kompetisi, kerja keras, menghargai waktu, penghargaan terhadap orang lain, terpanggil untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, demokrasi, dan sebagainya. Di sinilah seharusnya agama dan Pancasila mampu memberi bimbingan ke arah yang terang itu. Tidak ada jeleknya kita meniru Barat dalam hal-hal yang positif, dan membuang budaya jauh-jauh yang tidak baik meskipun itu budaya sendiri. Apa ukuran baik dan buruk itu? Ukurnya adalah agama yang kita anut, kepribadian dan budaya bangsa kita.

5. Menyikapi Kerasnya Kompetisi di Era Globalisasi

Kompetisi adalah kata kunci dalam globalisasi. Kompetisi akan terjadi pada berbagai bidang kehidupan. Kompetisi kualitas sumber daya manusia, kompetisi penguasaan Iptek, kompetisi pencarian sumber daya alam, kompetisi produksi barang, maupun kompetisi pasar. Jika sebelumnya, tuntutan kompetisi kurang mengemuka, maka kini akan sangat menonjol. Bahkan kompetisi bukan hanya pada tingkat lokal, regional maupun nasional, akan tetapi akan mengglobal, mendunia.

Jika selama ini sebuah negara akan dengan mudah membuat aturan main yang dapat pula dijadikan sebagai perisai untuk mencegah serangan kompetisi dari luar. Maka kini sudah tidak dapat lagi dilakukan. Oleh karena itu, untuk memenangkan kompetisi, yang harus dilakukan adalah persiapan diri. Ini meliputi kesiapan mental untuk berkompetisi, kesiapan untuk berprestasi dan kesiapan untuk berinovasi dan berefisiensi. Perdagangan bebas sudah dicanangkan di Asia Tenggara, yakni AFTA, yang telah dimulai sejak tahun 2003. Berlakunya AFTA berarti telah diberlakukannya persaingan bebas perdagangan barang maupun jasa di kawasan Asia Tenggara. Tidak terkecuali juga terjadi kompetisi SDM, termasuk penyediaan tenaga profesional, di kawasan ini. Kalau dulu Indonesia dapat mencegah tenaga luar dan memberi prioritas penuh kepada tenaga dari dalam negeri sendiri, kini hal itu sudah tidak mudah lagi dilakukan.

Sebaiknya Kamu tahu

Beberapa Dampak Negatif Globalisasi

- a. Batas-batas politik antar negara menjadi semakin kabur;
- b. Batas-batas ekonomi antar negara menjadi tidak jelas;
- c. Hubungan antar negara menjadi semakin transparan;
- d. Terjadinya Pasar bebas, yang hanya menguntungkan negara maju;
- e. Jati diri suatu bangsa menjadi terancam.

6. Pancasila sebagai Filter Globalisasi

Benturan dan gesekan antar budaya dan peradaban tidak bisa dihindarkan di era yang disebut globalisasi seperti saat ini. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan saja harus mampu bertahan, namun juga harus mampu berperan aktif. Kalau peran “bertahan” ada kemungkinan akan menimbulkan isolasi, ketertutupan dan *inferiority*. Peran “aktif” akan menghasilkan keterbukaan dan *superiority*. Setidaknya kemungkinan ketiga, yaitu *akomodatif*, yakni penyesuaian dan penerimaan akan hal-hal yang datang dari luar sejauh bisa ditolerir. Oleh karena itu, persiapan intern baik tentang pemahaman maupun sikap dan mentalitas bangsa harus dibenahi terlebih dahulu.

Bangsa Indonesia hendaknya mampu menyelamatkan bangsanya dari dampak negatif globalisasi. Lebih lanjut bagaimana Indonesia dengan falsafat Pancasila, mampu menangkal setiap yang negatif dari globalisasi, dan mengambil yang baik darinya.

Pergaulan global sudah tidak dapat lagi dihindari oleh seseorang ataupun suatu bangsa, kecuali ia sengaja mengurung diri dengan menjauhi interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Ketika seseorang masih membaca koran, menonton TV, menggunakan alat komunikasi, apalagi internet, ia akan tetap terperangkap dalam proses dan model pergaulan global.

Istilah globalisasi yang sangat populer itu, dapat berarti “alat” dan dapat pula berarti “ideologi”. Alat, oleh karena merupakan wujud keberhasilan ilmu dan teknologi, terutama sekali di bidang komunikasi. Ketika globalisasi berarti alat, maka globalisasi sangat netral. Artinya, ia mengandung hal-hal positif, ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik.

Sebaliknya, ia dapat berakibat negatif, ketika hanyut ke dalam hal-hal negatif. Dengan demikian, globalisasi, akan tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa serta tujuan kemana ia dipergunakan. Jadi, sebagai alat dapat bermanfaat dan dapat pula mengakibatkan bencana. Terobosan teknologi informasi dapat dijadikan alat untuk hal-hal positif, dalam waktu bersamaan dapat pula menjadi penyebab hal-hal negatif.

Ketika globalisasi sebagai ideologi, sudah mempunyai arti tersendiri dan netralitasnya sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya. Sebab, tidak sedikit akan terjadi benturan nilai, antara nilai yang dianggap sebagai ideologi globalisasi dan nilai nilai yang dianut oleh suatu bangsa.

Sebaiknya Kamu Tahu

Dampak Positif Globalisasi:

- a. Hubungan antar negara menjadi sangat lancar;
- b. Pasar bebas menjadi tak terelakkan;
- c. Pertukaran informasi antar negara sangat lancar;
- d. Harga barang menjadi lebih murah karena persaingan yang ketat;
- e. Produktivitas barang menjadi tinggi;
- f. Efisiensi menjadi tinggi.

7. Kiat Indonesia Menghadapi Globalisasi

Pengaruh globalisasi yang semakin kuat perlu disikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia mutlak harus dipertahankan dan diimplementasikan secara benar. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai semua aspek kehidupan bangsa, sehingga tetap pada arah yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Di bidang politik, Indonesia harus melakukan proses demokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia hendaknya diarahkan pada pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia perlu melaksanakan pasal 33 UUD 1945. Caranya dengan membangun kerja sama pelaku ekonomi yang terdiri dari:

koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Potensi daerah harus diberdayakan agar mampu menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang dapat diangkat menjadi produk unggulan nasional. Dengan demikian daya saing bangsa yang sangat diperlukan dalam era pasar bebas dapat tercipta.

Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar budaya bangsa sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju.

8. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Globalisasi Bidang Ekonomi

a. Dampak Globalisasi Ekonomi

Tujuan utama globalisasi ekonomi adalah liberalisasi ekonomi serta perdagangan bebas. Dengan liberalisasi ekonomi, mereka dapat menguasai bahkan menjarah berbagai aset dan sumber daya dunia untuk kepentingan mereka. Alat yang dipergunakan untuk menguasai aset negara-berkembang antara lain perusahaan multinasional, lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia), serta berbagai perjanjian multilateral. Dampaknya kebanyakan negara miskin akan menjadi semakin tergantung pada negara maju. Sumber-sumber alam negara miskin semakin jatuh dan dikuasai oleh kapitalis-kapitalis yang tidak lain adalah dari negara kaya. Adapun bentuk-bentuk intervensi yang biasa dilakukan negara maju terhadap negara berkembang sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam ekonomi harus diminimalisir, karena dianggap mendistorsi pasar.
2. Privatisasi BUMN.
3. Penghapusan berbagai bentuk proteksi terhadap produksi barang.
4. Mempermudah masuknya investasi asing dengan berbagai kemudahan.
5. Penghapusan berbagai subsidi.

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi dan moneter 1997/1998 Indonesia mengundang IMF sebagai konsultan dan pemberi kredit. Indonesia telah menjalankan semua program yang dibuat oleh IMF bahkan telah menyetujui paket utang luar negeri yang jumlahnya sangat besar. Akan tetapi apa yang disarankan

ternyata tidak terbukti. Bahkan sebaliknya yang terjadi justru pengangguran yang semakin meningkat, harga-harga yang naik, pajak naik, BBM naik, subsidi orang miskin dihapus, negara semakin tidak melayani rakyat karena BUMN di swastakan, sementara utang menumpuk.

Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus selektif dalam menanggapi isu dunia. Sebagai bangsa kita harus berani menentukan sikap, dan menjatuhkan pilihan yang cerdas dan tepat dalam menghadapi arus globalisasi ekonomiyang begitu dahsyat. Beberapa kiatnya antara lain:

1. Industrialisasi harus berdasarkan ketersediaan bahan baku setempat.
2. Pertanian dijadikan prioritas, karena bangsa ini adalah bangsa agraris yang memiliki wilayah luas dan cukup subur.
3. Jangan mengadopsi sistem pasar bebas secara penuh, mengingat kesiapan kita masih minim.
4. Memilih sistem ekonomi yang mendahulukan sector domestik.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan, mengutamakan kesejahteraan rakyat.
6. Tidak boleh terlalu tergantung pada utang luar negeri.

Menjalin kerjasama dengan sesama negara berkembang dengan semangat saling menguntungkan.

b. Ekonomi Pancasila Sebagai Solusi

Sistem ekonomi Pancasila ditopang oleh lima pilar yang membentuk satu kesatuan sistem yang bersifat holistik. *Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan* adalah dasar (landasan) sistemnya, *sila Persatuan dan Kerakyatan* merupakan cara (operasionalisasinya), dan *sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia* merupakan tujuan yang hendak dicapainya. Mengacu pada rumusan ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto maka dapat dikemukakan pilar sistem ekonomi Pancasila meliputi *ekonomika etik dan ekonomika humanistic* (dasar), *nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi* (cara/metode operasionalisasi), dan *ekonomi berkeadilan sosial* (sebagai tujuan). Berikut lima pilar Ekonomi Pancasila tersebut.

1. Ekonomika Etik (Ketuhanan)

Pilar pertama Sistem Ekonomi Pancasila yaitu moral agama, yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”. Pada awalnya para pendiri negara kita merumuskan politik kemakmuran, keadilan sosial, dan pembangunan karakter bangsa yang dilandasi semangat penerapan ajaran moral dan agama. Itu artinya pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa, dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah, tidak sekedar pembangunan materiil semata.

2. Ekonomika Humanistik (Kemanusiaan)

Ekonomika humanistik berfungsi sebagai dasar ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya, pemerataan pendapatan, aset, dan kekayaan. Hal ini ditempuh melalui optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat dan pajak, serta redistribusi pendapatan lainnya.

3. Nasionalisme Ekonomi

Di era globalisasi ini jelas pentingnya ekonomi nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Pembangunan ekonomi haruslah didasarkan kekuatan lokal dan nasional untuk peningkatan martabat dan kemandirian bangsa. Oleh karena itu perhatian harus dipusatkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

4. Demokrasi Ekonomi (Kerakyatan)

Secara garis besar sasaran pokok demokrasi ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi penduduk miskin, pemerataan modal, terselenggaranya pendidikan murah (gratis), dan kesempatan mendirikan serikat-serikat ekonomi.

5. Ekonomi Berkeadilan Sosial

Tujuan keadilan sosial mencakup keadilan antar wilayah (daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing. Pengalaman pahit sentralisasi politik ekonomi Orde Baru dapat kita jadikan pelajaran untuk menyusun strategi pembangunan nasional. Inilah substansi Negara Kesatuan yang tidak membiarkan terjadinya ketimpangan sosial

ekonomi antar daerah melalui pemusatan aktivitas ekonomi oleh pemerintah pusat.

9. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Globalisasi Bidang Politik

Isu yang menonjol dalam bidang ini adalah hak asasi manusia, demokrasi, dan keterbukaan. Akan tetapi ketiga hal tersebut sebenarnya sifatnya relatif serta ukurannya tidak terlalu jelas. Yang ada selama ini adalah ukuran yang dibuat oleh negara maju khususnya Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa Barat pada umumnya. Oleh karena itu masalah ini sering dimanipulasi dan dibelokkan menurut kemauan dan kepentingan mereka.

Hak asasi manusia sebenarnya punya sifat universal, akan tetapi pengertian, criteria, maupun implementasinya di lapangan belum ada persamaan dan kesepakatan. Selama ini penafsirannya didominasi oleh Amerika Serikat. Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh suatu negara bisa dibiarkan saja oleh Amerika Serikat karena kebetulan ia sahabat dan menguntungkan kepentingannya. Akan tetapi kalau dianggap merugikan kepentingannya, negara tersebut akan diberi sanksi yang keras. Indonesia misalnya diembargo senjata akibat kasus Timor Timur. Bahkan lewat resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1316 akan dijatuhi sanksi ekonomi apabila tidak dapat menyelesaikan kasus Atambua dengan baik.

Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju di dunia ini terlanjur terbentuk opini, bahwa sistem pemerintahan terbaik dan diterima bangsa-bangsa di dunia ini adalah demokrasi. Akan tetapi demokrasi sendiri sebenarnya memiliki banyak sekali ragam. Sebenarnya demokrasi memiliki nilai universal sebagaimana HAM, namun sering disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, sehingga ada Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal, Demokrasi Rakyat yang semua itu kadang-kadang menghilangkan nilai dasar demokrasi. Selama ini yang dianggap baik adalah demokrasi ala Amerika Serikat, padahal mereka sering diskriminatif dan subyektif. Irak diserang dengan dalih pemerintahannya tidak demokratis. Kuba dijatuhi sanksi ekonomi karena dituduh tidak demokratis.

Keterbukaan adalah salah satu isu internasional yang dihembuskan oleh negara maju. Akan tetapi “keterbukaan” seperti apa sampai hari ini konsepnya juga tidak jelas. Ukuran yang dipakai selama ini menurut kaca mata Amerika Serikat dan para sekutunya. Mereka mengkampanyekan konsep “keterbukaan” ke seluruh penjuru dunia lewat media massa maupun saluran diplomatik. Memang harus diakui isu keterbukaan ini mendorong negara-negara yang dulu pemerintahannya otoriter menjadi semakin demokratis dan terbuka kepada rakyatnya.

10. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Globalisasi Bidang Sosial Budaya

Gaya hidup yang materialis, hedonis, individualis dan sekuler, yang tidak sesuai dengan Norma Timur (Norma Indonesia) sebaiknya dihindari. Salah satu ciri globalisasi adalah segala sesuatu dengan cepat bisa mendunia. Tentu saja yang baik kita ambil sedangkan yang buruk harus kita hindari. Sayangnya kebanyakan orang menganggap segala sesuatu yang datang dari negara maju dianggap modern dan baik untuk ditiru. Apalagi begitu gencarnya media dari negara maju mempengaruhi negara-negara berkembang, lewat televisi, dan internetnya. Disinilah perlunya kecerdasan anak bangsa dalam memilih dan memilah mana yang baik dan yang sampah. Tentu saja ukurannya adalah agama kita masing-masing, Pancasila, budaya, norma masyarakat dan sebagainya.

11. Sikap Selektif terhadap Pengaruh globalisasi Bidang Hankam

Isu yang sedang marak yang dikampanyekan negara maju khususnya Amerika Serikat di bidang pertahanan dan keamanan dewasa ini adalah tentang terorisme. Sementara itu belum ada kesamaan persepsi mengenai definisi terorisme, antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bahkan ketika sebuah negara menuduh kelompok tertentu sebagai teroris, kelompok itu malah menuduh balik bahwa negara yang menuduh tadi adalah sebagai teroris sejati.

Oleh karena itu perlu dirumuskan bersama pengertian terorisme, agar ada kesamaan persepsi. Dari sini akan memudahkan langkah selanjutnya. Sehingga bisa dihindari perasaan saling curiga, saling tuduh dan sejenisnya. Jangan sampai terjadi bila suatu negara ada gerakan yang kebetulan merugikan kepentingan Amerika Serikat, dengan mudahnya gerakan tersebut dituduh sebagai terorisme.

Apabila pemerintah negara itu tidak bertindak sesuai dengan keinginannya, maka akan dengan mudah dianggap melindungi terorisme yang akibatnya bisa diberi sanksi atau bahkan dapat diserang.

Dalam hal ini kita perlu bertindak cerdas dan bijaksana. Jangan sampai hanya karena ingin menyenangkan mereka, tetapi justru kita korbakan kepentingan rakyat sendiri. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan sesama negara yang selama ini merasa dirugikan dengan isu tersebut, untuk berjuang bersama menyamakan persepsi tentang terorisme, serta langkah-langkah yang harus diambil

Sebaiknya Kamu Tahu

Menutup diri terhadap pengaruh globalisasi adalah tidak tepat. Sementara menerima secara bulat-bulat semua pengaruh globalisasi tanpa menyaringnya juga tidak tepat. Yang paling tepat adalah ikut ambil bagian di dalamnya sambil tetap selektif terhadap pengaruh negatifnya.

Tugas

Tuliskan pendapatmu terhadap pernyataan di bawah ini dengan sikap setuju atau tidak setuju. Sikap terhadap sebuah pernyataan mungkin berbeda-beda, tapi berikan alasannya.

No	Pernyataan	Setuju	Tdk Setuju	Alasan
1	Globalisasi mempunyai dampak negatif. Salah satunya adalah merajalelanya perdagangan narkotika.			
2	Globalisasi juga berdampak positif. Salah satu contohnya adalah semakin murah harga barang-barang elektronik.			

No	Pernyataan	Setuju	Tdk Setuju	Alasan
3	Globalisasi harus ditolak sebab seluruhnya negatif			
4	Globalisasi harus diterima sebab semua dampaknya positif			
5	Kita sebaiknya menggunakan barang-barang dari luar negeri karena mutunya pasti baik			
6	Globalisasi telah mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Bahkan pengaruhnya hingga pelosok dunia.			
7	Lebih baik menikmati makanan siap saji setiap hari dari pada memasak sendiri			
8	Negara lain tidak boleh mencampuri urusan alam negeri Indonesia			
9	Pasar tradisional sebaiknya dimatikan saja diganti dengan supermarket			
10	Sebaiknya kita berusaha mencintai dan memakai barang produksi dalam negeri			

Rangkuman

- Dewasa ini telah terjadi banjir informasi dari negara maju ke negara berkembang, sehingga menuntut kesiapan kita untuk mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif.
- Melalui siaran TV terbuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan, mengetahui dan menikmati apa yang disajikan bagi masyarakat dunia oleh pemasok tayangan TV yang terbesar yakni Amerika Serikat. Intensitas dan frekuensi tayangan asing yang tinggi memungkinkan terjadinya proses sosialisasi nilai-nilai asing masuk Indonesia.
- Kondisi saat ini, banyak ancaman budaya berupa kebebasan yang datang dari dunia Barat. Dan ketika kebebasan itu berlebihan, maka nilai-nilai dan norma budaya lokal serta nasional, terlebih lagi nilai agama, akan terancam olehnya. Tentu kebebasan disini bukan dalam pengertian positif, seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat demi kontrol sosial, dan sejenisnya. Namun, kebebasan yang menjurus pada kepuasan lahiriah, egoisme, dan hedonisme. Akibat negatif dari kebebasan seperti inilah yang kemudian berupa kebebasan penyalahgunaan narkoba, kebebasan seks, kebebasan makan minum barang haram, dan sejenisnya.
- Di pihak lain, jika globalisasi memberi pengaruh hal-hal, nilai dan praktek yang positif, maka seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyerapnya. Dengan demikian, bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di Barat atau bahkan di belahan negara lain, dapat masuk Indonesia dan dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat kita.
- Beberapa Sisi Kelemahan globalisasi
 - a. Batas-batas politik antar negara menjadi semakin kabur.
 - b. Batas-batas ekonomi antar negara menjadi tidak jelas.
 - c. Hubungan antar negara menjadi semakin transparan.

- d. Pasar bebas, yang hanya menguntungkan negara maju, karena telah siap berkompetisi.
- e. Jati diri suatu bangsa menjadi terancam.

➤ **Beberapa Sisi Positif Globalisasi:**

- a. Hubungan antar negara menjadi sangat lancar karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi.
- b. Pasar bebas menjadi tak terelakkan.
- c. Pertukaran informasi antar negara sangat lancar.
- d. Harga barang menjadi lebih murah karena persaingan yang ketat.
- e. Produktivitas barang menjadi tinggi.
- f. Efisiensi menjadi tinggi.

➤ **Menyikapi Globalisasi dengan Filter Pancasila**

Di era globalisasi ini pergesekan dan saling mempengaruhi antar nilai-nilai budaya tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan saja harus mampu bertahan, namun juga harus mampu berperan aktif. Kalau peran “bertahan” ada kemungkinan akan menimbulkan isolasi, ketertutupan dan *inferiority*, peran “aktif” (usaha mempengaruhi) akan menghasilkan keterbukaan dan *superiority*. Setidaknya kemungkinan ketiga, yaitu akomodatif, yakni penyesuaian dan penerimaan akan hal-hal yang datang dari luar sejauh Gaya hidup yang *materialis*, *hedonis*, *individualis* dan sekuler, yang tidak sesuai dengan Norma Timur (Norma Indonesia) sebaiknya dihindari.

Latihan

a. Tugas Individu:

1. Mengapa bisa terjadi banjir informasi di tingkat dunia maupun di Indonesia?
2. Bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi dahsyatnya banjir informasi tersebut?
3. Apa sesungguhnya peran agama, Pancasila, maupun norma-norma ketimuran yang kita anggap baik itu terhadap globalisasi?
4. Jelaskan yang dimaksud globalisasi itu sebagai peluang!
5. Jelaskan yang dimaksud globalisasi itu sebagai tantangan!
6. Menurutmu bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi globalisasi bidang ekonomi?
7. Jelaskan apa saja kiat-kiat yang sebaiknya dipersiapkan Indonesia dalam menghadapi globalisasi, agar tidak terlalu jauh tertinggal!
8. Mengapa kita harus selektif dalam memilih informasi pada era globalisasi seperti dewasa ini?
9. Dampak apa yang ditimbulkan bila bangsa Indonesia membiarkan begitu saja masuknya semua budaya dan informasi dari mana saja tanpa seleksi?
10. Dalam melakukan seleksi masuknya budaya asing, rambu-rambu apa saja sebaiknya yang harus digunakan bangsa Indonesia?
11. Mengapa negara-negara berkembang tidak berdaya menghadapi dahsyatnya globalisasi?
12. Jelaskan mengapa pendidikan dan peningkatan kualitas SDM sangat penting pada era globalisasi?
13. Globalisasi yang sekarang sedang berproses, dalam perkembangannya kini menimbulkan pro dan kontra di dunia. Jelaskan bagaimana menurutmu alasan mereka masing-masing!
14. Mengapa liberalisasi ekonomi, sulit berlaku di negara yang berpaham komunis?
15. Apa hubungan revolusi industri dengan globalisasi?

b. Tugas Kelompok:

Diskusikan dengan temanmu jika kesulitan bertanyalah pada Bapak/Ibu guru dan hasilnya presentasikan di depan kelas!

1. Mengapa kita harus selektif dalam memilih informasi pada era globalisasi seperti dewasa ini.
2. Dampak apa yang ditimbulkan bila bangsa Indonesia membiarkan begitu saja masuknya semua budaya dan informasi dari mana saja tanpa seleksi.
3. Dalam melakukan seleksi masuknya budaya asing, rambu-rambu apa saja sebaiknya yang harus digunakan bangsa Indonesia.

E.Glosarium

<i>Chauvinisme</i>	: rasa kebangsaan yang berlebihan
<i>Conterfiet people</i>	: orang-orang yang identitasnya dirancang untuk menciptakan citra
<i>Delivery</i>	: pesanan
<i>Deregulasi</i>	: proses menghapuskan peraturan
<i>Diskonto</i>	: potongan bunga yang harus dibayar
<i>Etnis</i>	: suku
<i>Egalitarianisme</i>	: paham bahwa manusia itu sederajat
<i>Foke</i>	: palsu
<i>Fleksibel</i>	: luwes
<i>Globe</i>	: peta dunia berbentuk bola
<i>Global</i>	: meliputi seluruh dunia
<i>Globalisasi</i>	: proses mendunia
<i>Globalisme</i>	: paham yang menyatakan dunia ini adalah satu kesatuan
<i>Good governance</i>	: pemerintahan yang baik
<i>Hedonisme</i>	: paham yang ingin mereguk kenikmatan dunia sepuas-puasnya
<i>In concreto</i>	: dalam kenyataannya
<i>Jati diri</i>	: identitas
<i>Konglomerat</i>	: pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan

<i>Konsumerisme</i>	: boros
<i>Letter of intent</i>	: nota kesepakatan dengan lembaga keuangan dunia (IMF)
<i>Liberalisasi</i>	: usaha untuk menerapkan paham kebebasan
<i>Materialisme</i>	: paham yang mengutamakan materi di atas segala-galanya
<i>Mall</i>	: super market, toko serba ada
<i>Mark up</i>	: menaikkan anggaran dari yang semestinya
<i>Polis</i>	: negara kota
<i>Primordialisme</i>	: paham kesukuan
<i>Privatisasi</i>	: proses menjadikan milik negara menjadi milik perseorangan
<i>Pornografi</i>	: penggambaran, tulisan, lukisan secara erotis
<i>Relokasi</i>	: memindahkan ketempat lain
<i>Telepon seluler</i>	: telepon tanpa kabel
<i>Trial by press</i>	: pengadilan oleh media massa
<i>Universal</i>	
<i>Declaration of Human Rights</i>	: deklarasi umum tentang HAM PBB
<i>Valuta asing</i>	: mata uang asing
<i>Well informed</i>	: serba tahu

F. Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf di depannya

- Globalisasi ialah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan....
 - tidak dapat dibatasi oleh siapapun
 - kurang dapat dikontrol kemana arahnya
 - tidak mengenal batas wilayah
 - menuju pada suatu titik tertentu
- Latar belakang dicetuskannya perdagangan bebas yang pada hakikatnya mengawali adanya globalisasi ekonomi adalah....
 - berlimpahnya produksi sementara pemasaran terbatas di Eropa

- b. sangat kuatnya proteksi yang dilakukan negara-negara miskin
 - c. kuatnya persaingan para pengusaha di benua Eropa
 - d. politik damping di negara negara maju
3. Era global ditandai dengan derasnya arus informasi dari manca negara terutama peran media massa yang bagi bangsa Indonesia harus diterima dengan penyaring....
- a. nilai-nilai kepribadian bangsa
 - b. nilai-nilai modern
 - c. undang-undang
 - d. etika
4. Misi yang diemban globalisasi ekonomi adalah.....
- a. mewujudkan kemakmuran dunia secara bersama
 - b. meratakan jalan menuju masyarakat sama rasa sama rata
 - c. mendorong negara-negara dunia ketiga mengejar ketinggalannya
 - d. perdagangan bebas, liberlisasi ekonomi, dan integrasi ekonomi
5. Dalam rangka membantu kredit kepada Indonesia IMF mengajukan usul antara lain agar Indonesia....
- a. memperketat kebijakan proteksinya
 - b. menjual barang-barang mentah ke negara maju
 - c. memperlancar arus masuk investasi asing
 - d. membeli barang-barang jadi untuk efisiensi
6. Lembaga-lembaga internasional yang sangat berperan dalam menentukan kebijakan ekonomi global adalah.....
- a. WTO, FAO, IMF
 - b. WTO, IMF, GATT
 - c. Bank Dunia, IMF, ILO
 - d. FAO, GATT, WTO

7. Di tengah arus globalisasi, kita harus tetap berpegang pada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dengan cara...
 - a. membiarkan perubahan nilai budaya secara alami sesuai kemajuan jaman
 - b. mempelajari berbagai macam budaya dari semua bangsa di dunia
 - c. meninjau ulang kesesuaian budaya kita dengan tuntutan global
 - d. menghidupan dan melestarikan budaya daerah

8. Dalam rangka menghadapi kuatnya pengaruh globalisasi ekonomi yang selalu dipropagandakan negara-negara dunia pertama, Indonesia dapat menempuh alternatif sebagai berikut, kecuali....
 - a. sistem ekonomi hendaknya berprinsip pasar bebas
 - b. pertanian dijadikan prioritas utama perekonomian
 - c. industrialisasi berdasarkan pada bahan baku setempat
 - d. tidak tergantung pada badan-badan multilateral

9. Apabila pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya tidak dapat diseleksi atauantisipasi maka akan dapat berakibat ...
 - a. merugikan perdagangan luar negeri
 - b. mencapuri urusan dalam negeri Indonesia
 - c. hilangnya jati diri/kepribadian bangsa Indonesia
 - d. melanggar kedaulatan Indonesia

10. Pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya dapat kita seleksi dengan menggunakan sarana....
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. adat istiadat
 - d. memutus semua saluran ke luar negeri

11. Globalisasi ekonomi menyebabkan kondisi ekonomi di negara-negara berkembang mengalami krisis moneter sebab.....
- kebijakan ekonomi global berpihak pada negara-negara maju
 - utang-utang luar negeri semakin menumpuk
 - kalah bersaing dalam perdagangan internasional
 - tidak memiliki sumber daya yang memadai
12. Sarana yang sangat besar andilnya dalam menyebarkan opini dunia di era globalisasi sekarang ini adalah.....
- telepon dan radio
 - organisasi dan partai politik
 - media elektronik dan media massa
 - turis dan tenaga kerja asing
13. Salah satu pengaruh globalisasi di bidang ekonomi bagi Indonesia adalah.....
- banyaknya turis asing ke Indonesia
 - semakin banyaknya perusahaan multi nasional beroperasi di Indonesia
 - semakin demokratisnya pemerintahan Indonesia
 - semakin banyaknya TKI ke luar negeri
14. Secara teoritis, globalisasi ekonomi dianggap merupakan jalan terbaik dalam hubungan ekonomi antar negara, karena akan dapat memaksa masing-masing negara untuk....
- bersedia membuka wilayahnya bagi produksi luar negeri
 - saling tukar menukar informasi dalam perdagangan
 - pertukaran teknologi antar negara
 - perdagangan dunia yang semakin adil
15. Perdagangan bebas dunia seperti yang dipropagandakan oleh negara-negara maju, pada hakikatnya dapat....
- menghindarkan kesenjangan antara negara kaya dan miskin

- b. menimbulkan neokolonialisme ekonomi negara maju terhadap negara berkembang
 - c. memupuk solidaritas antara negara kaya dan negara miskin
 - d. meningkatkan nilai ekspor negara miskin ke negara kaya
16. Dalam rangka memberi bantuan kredit kepada Indonesia, IMF mengajukan paket kebijakan yang harus dijalankan pemerintah Indonesia sebagai berikut, kecuali....
- a. sistem ekonomi kerakyatan
 - b. swastanisasi seluas-luasnya dalam ekonomi
 - c. segala bentuk proteksi harus dihapuskan
 - d. memperlancar arus masuknya investasi asing
17. Untuk mengantisipasi dampak yang merugikan dari perdagangan bebas, dapat ditempuh antara lain dengan.....
- a. menjalankan secara serius sistem ekonomi berdikari
 - b. mengganti sistem ekonomi dengan sistem terbaru
 - c. melakukan pendekatan dengan negara maju
 - d. seleksi ketat terhadap masuknya modal asing
18. Gagasan tentang globalisasi lahir dari....
- a. negara-negara maju
 - b. negara-negara berkembang
 - c. negara maju dan negara berkembang
 - d. anggota PBB
19. Di tengah arus globalisasi, kita harus tetap berpegang pada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang beradab dan berbudaya dengan cara.....
- a. membiarkan perubahan nilai budaya secara alami sesuai kemajuan zaman
 - b. meninjau ulang kesesuaian budaya kita dengan tuntutan global
 - c. meningkatkan wawasan kita tentang perubahan nilai budaya yang terkini

- d. menghidupkan, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah
20. Dalam mengembangkan budaya, bangsa Indonesia agar sejajar dengan budaya bangsa lain, maka generasi muda wajib.....
- a. mencermati gaya hidup dan perilaku bangsa yang modern
 - b. menyerap semua unsur budaya asing menuju budaya yang modern
 - c. memanfaatkan kegunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d. melestarikan budaya daerah masing-masing
21. Agar kemajuan Iptek dapat bersifat positif maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, yaitu.....
- a. menerima dengan pasrah
 - b. menyumbangkan ilmu
 - c. berpegang pada Pancasila
 - d. menolak setiap ada masukan
22. Di era globalisasi ini Indonesia sebaiknya harus konsisten menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, gagasan ini dilontarkan oleh....
- a. Sritua Arif
 - b. Mubyarto
 - c. Thomas Meyer
 - d. Soeharto
23. Globalisasi ekonomi menyebabkan kondisi ekonomi di negara-negara berkembang mengalami krisis moneter, sebab.....
- a. tidak memiliki sumber daya yang memadai
 - b. sangat tergantung pada bantuan luar negeri
 - c. kalah bersaing dalam perdagangan internasional
 - d. kebijakan ekonomi global berpihak pada negara-negara maju

24. Kerugian akibat globalisasi, khususnya pada perilaku masyarakat kita adalah.....
- munculnya sifat hedonisme
 - menghendaki kebebasan mutlak
 - tumbuhnya rasa kedaerahan
 - kurang taat pada pimpinan
25. Perdagangan bebas dunia dapat.....
- memupuk rasa solidaritas antara negara maju dan miskin
 - meningkatkan ekspor negara miskin ke negara maju
 - memacu kemajuan negara berkembang
 - melahirkan neokolonialisme ekonomi negara maju terhadap negara berkembang
26. Prinsip kebebasan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu dipropagandakan oleh....
- anggota PBB
 - negara-negara maju
 - negara-negara miskin
 - masyarakat internasional
27. Pembentukan GATT yang dipelopori Amerika Serikat merupakan salah satu upaya negara maju untuk.....
- membantu kemajuan negara berkembang
 - membebaskan dunia dari hambatan perdagangan
 - menciptakan tata dunia baru yang lebih adil
 - memotivasi perdagangan di negara-negara berkembang
28. Berdasarkan fakta sekarang ini liberalisasi perdagangan dapat berakibat.....
- merugikan negara maju dan menguntungkan negara berkembang
 - tersedotnya kekayaan negara-negara berkembang ke negara maju

- c. kekayaan negara maju mengalir ke negara berkembang
 - d. membantu kemajuan negara berkembang
29. Melihat apa yang dilakukan negara maju terhadap negara miskin, dapat disimpulkan bahwa negara maju.....
- a. ingin membantu perekonomian negara miskin lewat perdagangan
 - b. berusaha mengalihkan usahanya ke negara berkembang
 - c. mempunyai kemauan baik untuk menolong negara miskin
 - d. bagaimanapun ingin selalu menang dan beruntung
30. Untuk menyongsong era globalisasi ekonomi, pemerintah perlu menyiapkan diri dengan menempuh langkah-langkah seperti.....
- a. menciptakan produk yang mampu bersaing dengan produk luar
 - b. membuat peraturan untuk melindungi produksi dalam negeri
 - c. melarang masuknya barang-barang dari luar negeri
 - d. mengirikan delegasi ke luar negeri setiap ada pertemuan internasional

BAB 4

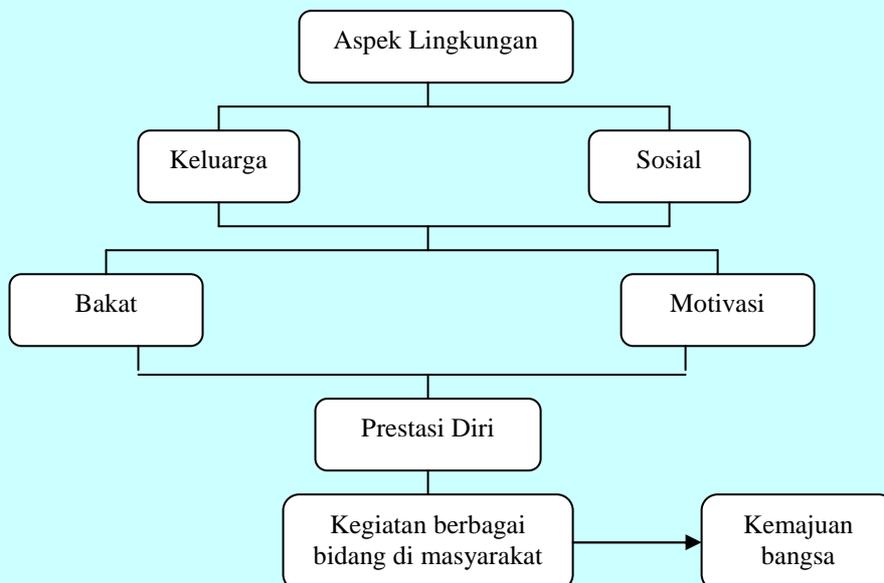
BERPRESTASI UNTUK KEUNGGULAN BANGSA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa:

1. Memahami pentingnya prestasi diri untuk keunggulan bangsa;
2. Menyadari dan mengenal potensi diri masing-masing untuk berprestasi sesuai kemampuan;
3. Mampu mewujudkan potensi yang dimiliki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi keunggulan bangsa.

Peta Konsep:



Kata kunci:

prestasi diri, potensi diri, sumber daya manusia, kompetisi, keunggulan bangsa.

Coba kamu amati barang-barang yang ada di rumahmu. Sepeda motor, mobil, televisi, hand phone, lemari es, mesin cuci dan sebagainya. Tentu kamu tahu, sebagian besar barang-barang tersebut buatan Jepang. Jepang adalah sebuah negara di Asia yang hasil industrinya dipakai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Industri Jepang telah mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Padahal pada Perang Dunia II sekitar tahun 1940-an Jepang luluh lantak, hancur lebur dikalahkan Sekutu. Sebagai negara yang kalah perang, dipaksa untuk menandatangani berbagai perjanjian yang sangat merugikan Jepang. Ekonomi Jepang mengalami kemunduran yang luar biasa.

Akan tetapi tahukah kamu? hanya dalam waktu 30 tahun Jepang bisa bangkit sebagai negara industri terkemuka di dunia. Bahkan industrinya sangat kompetitif di banding negara-negara maju lainnya. Barang-barang elektronik dan otomotif buatan Jepang membanjiri dunia. Ekonomi Jepang juga tumbuh sebagai raksasa dunia yang sangat disegani.

Pertanyaan berikutnya, mengapa dalam waktu relatif singkat Jepang bisa bangkit dari kehancuran? Rahasiannya ternyata “ada motivasi yang sangat tinggi” pada setiap rakyat Jepang untuk membangun kembali bangsanya dari kehancuran. Rahasia berikutnya ialah orang Jepang memiliki “*semangat kaizen*”. Semangat *kaizen* memiliki tiga prinsip: 1) Ambil dan tiru yang baik dari manapun datangnya, 2) Buang yang tidak baik meskipun dari negeri sendiri, 3) Ciptakan yang baru. Dengan dua rahasia itu Jepang tumbuh pesat.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita dapat membangun kembali Indonesia dari keterpurukan dan ketertinggalan kita dengan negara lain? Tentu saja semuanya akan tergantung pada kerja keras dari seluruh anak bangsa ini. Sebagai generasi muda kalian sangat diharapkan untuk dapat mengambil hikmah

dari bangsa Jepang seperti telah diuraikan di atas. Sekali lagi kalian adalah penentunya, karena masa depan adalah milik kalian semua.

Setelah membaca ilustrasi tentang keberhasilan bangsa Jepang ada baiknya kamu renungkan kata-kata bijak berikut ini:

- ✚ *Lebih baik bersiap diri untuk suatu peluang meski ternyata tidak ada peluang satupun yang muncul. Daripada memiliki peluang tetapi tidak memanfaatkannya. (Whitney Young JR).*
- ✚ *Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh (Andrew Jackson).*
- ✚ *Yang terpenting bagi seseorang adalah terus mengerjakan sebaik mungkin segala sesuatu yang dianggap benar. Apa dan bagaimana hasil akhir dari pekerjaan itu serahkan pada Tuhan. Mungkin tercapai seratus persen, setengah, mungkin juga tidak tercapai sesuai keinginanmu itu tidak penting. Engkau harus yakin bahwa telah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian engkau tidak akan menyesal. Dan percayalah bahwa setiap keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagimu (Ir. Soekarno).*

A. Mengembangkan Prestasi Diri untuk Kejayaan Bangsa

1. Prestasi Putra-Putri Bangsa

Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalnya: ada yang berbakat musik, olahraga, melukis, berorganisasi, dan lain-lain. Ada yang memiliki bakat yang lebih menonjol dari yang lain. Misalnya anak yang berbakat musik, akan cepat sekali dapat menyanyikan lagu, dengan nada dan irama yang tepat. Juga akan cepat sekali menguasai alat-alat musik. Begitu pula anak yang memiliki bakat berorganisasi akan cepat sekali dapat bergaul, dan cepat dapat mengorganisir kegiatan bersama. Kata lain dari bakat adalah potensi. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, pengertian potensi, adalah

kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal.

Potensi dapat dijadikan pembeda antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam masyarakat kita temukan berbagai ragam manusia dengan potensi yang beragam pula. Masing-masing memiliki kelebihan namun sekaligus punya kekurangan. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali potensi kita masing-masing dan selanjutnya memanfaatkan serta mengembangkannya secara maksimal menjadi sebuah prestasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan prestasi diri itu?. Prestasi seseorang ada kaitannya dengan potensi yang dimiliki. Seseorang yang memiliki potensi tinggi dalam suatu bidang, punya kemungkinan yang lebih besar untuk berprestasi tinggi dalam bidang itu. Tentu saja ada faktor lain yang ikut menentukan, misalnya motivasi, kerja keras dan sebagainya. Prestasi diri adalah potensi yang ada pada seseorang dan telah dikembangkan serta menghasilkan suatu yang bermanfaat.

Menurut Ulrich Teicher manusia masa depan harus punya persyaratan kualitas dan kemampuan sebagai berikut : (a) *fleksibel*; (b) *inovatif dan kreatif*; (c) mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu; (d) siap belajar seumur hidup; (e) mempunyai kepekaan sosial dan keterampilan komunikasi; (f) mampu bekerja dalam tim; (g) mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan kepadanya; (h) mampu menyiapkan diri dalam persaingan global; (i) cakap dan terampil dalam berbagai hal.

Era atau jaman kini (*globalisasi*), adalah era dengan pola produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang bersifat mendunia (*global*). Kita semua menyadari bahwa langkah strategis untuk mengembangkan SDM berkualitas global adalah melalui pendidikan.



*Inilah pahlawan bulu tangkis kita
Pasangan pebulu tangkis Markis Kido/Hendra Setiawan mempersembahkan medali emas
Sumber: <http://www.badmintonottawa.com/WC-2007-pic>*

Coba simak kisah sukses untuk meraih prestasi bagi ketiga anak yang masih sangat muda berikut ini:

Rona, Rani, Roni dari Asongan hingga Ekspor

(Dikutip dari Buku sukses Merambah dunia, Terbitan Kompas)

Ketiganya pantas mengundang decak kagum karena di usia yang masih belia bisa mendapatkan penghasilan lumayan dan membiayai sekolah sendiri. Lebih dari itu mereka menciptakan lapangan kerja bagi puluhan bahkan ratusan orang lainnya seperti pemuda karang taruna, dan ibu-ibu yang tidak bekerja.

Jangan bertanya bagaimana hidup prihatin kepada tiga bersaudara Rona Budiman (23), Rani Mayangsari (20), dan Roni Subagja (17). Sebab sejak masih ingusan, mereka sudah dipaksa merasakan semua itu. Kalau anak lain mengisi liburan dengan piknik, Rona yang masih duduk kelas Sekolah Dasar, harus

mengisi liburan sekolah dengan berdagang asongan di Jakarta. Dagangannya, pelbagai aksesoris seperti gantungan kunci, gelang, kalung dan sebagainya buah karya kedua adiknya yakni Rani yang masih kelas satu SD dan Roni yang belum bersekolah. Jangan Tanya kapan waktu mereka bermain karena untuk itu hampir tidak ada.

Jangan salah, ketika melakukan itu semua, hidup mereka bukannya sudah sangat menderita kendati juga bukan berarti kecukupan. Bukan pula karena mereka sudah tidak punya orang tua. Bahkan orangtuanyalah terutama ayahnya yang memang sangat keras dalam mendidik, yang mengajarkan itu semua.

Dan, orangtuanya dengan segala didikan kerasnya memang benar. Siapa sangka pelbagai pengalaman pahit yang pernah mereka alami kini berbuah dan bahkan membuat orang-orang di sekelilingnya tercengang. Bagaimana tidak, kalau sebelumnya memulai usahanya dari berdagang asongan, akhirnya mereka naik pangkat jadi pengeksportir di bawah bendera PT Atra Jaya 76.

Ketiganya pantas mengundang decak kagum karena di usia yang masih belia bisa mendapatkan penghasilan lumayan dan membiayai sekolah sendiri. Lebih dari itu mereka menciptakan lapangan kerja bagi karang taruna dan ibu-ibu yang tidak bekerja.

Sekadar ukuran sukses saat ini produk mereka yang berciri khas suku Indian, baik berupa topeng tiga dimensi, hiasan dinding, pipa perdamaian, aksesoris sampai perlengkapan perang, sudah menembus pasar Korea, Malaysia, dan Singapura. Di dalam negeri jangan ditanya lagi.

Sebelumnya, tanda-tanda sukses sebenarnya mulai terlihat saat mereka melakukan pameran tunggal saat masih duduk di bangku kelas lima SD.

Untuk semua itu total penghasilan bersih mereka sedikitnya Rp. 50 Juta per bulan. Padahal saat merintis semuanya modal mereka hanya semangat, gunting, lem, pensil dan sisa-sisa kulit pembuatan sepatu pemberian teman ayahnya di Cibaduyut, Bandung.

Membuat Produk dari Bahan Limbah

Sesungguhnya bukan itu saja yang mengundang decak kagum dari mereka melainkan bahwa semua produk itu dibuat dari limbah. Sebut saja bulu ayam, bulu sisa pembuatan boneka, sisa-sisa kulit dari industri sepatu, kayu bekas peti kemas, karung goni, dan sebagainya. Untuk keperluan ini mereka menjalin kerja sama dengan beberapa industri yang limbahnya jadi bahan baku utama usaha mereka. Industri sepatu di Cibaduyut, Bandung, perusahaan boneka, tempat pemotongan ayam serta pelabuhan atau usaha ekspedisi adalah diantar beberapa industri yang mereka manfaatkan limbahnya.

Keunggulan lainnya adalah bahwa semua produk itu lahir dari proses kreativitas yang mengandalkan imajinasi. Tentang ini, tak kurang Jerrit Technical Concept (JTC), sebuah organisasi pemerhati produk kerajinan khas yang berkedudukan di Amerika menyempatkan diri menulis surat hanya untuk menyatakan kekagumannya setelah melihat buah tangan ketiga putra-putri Yayat Efendi Brata (55) dan Tati Sri Mulyati (42) ini.

“Terus terang kami sangat mengagumi karya topeng Indian Anda. Ini betul-betul mirip Indian di Amerika. Kami kagum karena di Amerika wajah-wajah Indian seperti ini hanya dilestarikan dengan foto-foto dan Anda membuatnya dalam bentuk topeng tiga dimensi”.

Begitu antar lain inti surat JTC setelah melihat Juper I, sesosok wajah Indian berbingkai kayu, berlatar goni. Topeng Juper ini menurut penilaian JTC, garis-garis wajahnya sangat mirip aslinya. Bahkan ada orang Indian asli yang wajahnya betul-betul mirip topeng ini. Rasa kagum juga yang membuat JTC mengundang mereka ikut berpameran di Amerika kendati “dibatalkan” kerusuhan Mei 1998.

“Terus terang untuk membuat topeng Indian, saya hanya mengandalkan imajinasi saya dibantu melihat film-film atau buku-buku,” jelas Rona, jebolan jurusan Desain Grafis ITB yang berperan penting dalam proses kreativitas ini.

Kesan Indian sebagai suku pemberani dicerminkann dari garis mata. Lalu wajahnya menunjukkan orang yang tidak serakah, tenang dan baru akan bereaksi

dari marah kalau diganggu. Selain itu cirri khas juga terdapat pada hidungnya yang agak melengkung.

Berdasarkan filosofi dan proses kreativitas ini tak kurang sudah 75 jenis muka yang mereka buat. Selain itu ada 200 jenis kalung, 200 jenis gelang, kostum dan tas ada 8 jenis serta alat perang 10 jenis antara lain panah dan tombak.

Pendekatan Kekeluargaan

Tak kalah menarik adalah usaha mereka melakukan pemasaran hingga bisa mengekspor sendiri. Dikisahkan Rona setelah ketiganya tamat SD dan merasa cukup dengan berdagang asongan, dimulailah pemasaran dengan cara lain yakni mendatangi tempat-tempat wisata.

“Setiap liburan sekolah kami mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Jawa Barat dan Jakarta. Kami mencoba menawarkan buah karya kami pada wisatawan utamanya dari mancanegara. Dari situ kalau ada yang tertarik kami dekati dan menjalin pendekatan kekeluargaan,” kisah Rani, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

“Karena kita lakukan dengan pendekatan kekeluargaan, mereka memaklumi apa kekurangan kami. Misalnya tentang kerajinan kami. Saya sadar kerajinan ini tidak baku, standar kualitasnya masih sederhana. Karena kita menggunakan bahan baku dari limbah. Tapi karena hubungan kami jalin secara kekeluargaan, mereka akhirnya bisa menerima sambil memberi masukan. Kadang malah mereka membantu dengan memberi buku-buku,” papar Roni, yang sekarang duduk di SMU kelas dua.

Kepercayaan yang diberi oleh para pembeli ini membuat Rani, satu-satunya perempuan di antara mereka bertekad mengetahui seluk beluk ekspor langsung. Pengetahuan ini akhirnya diperoleh dengan bantuan BPEN.

Sukses boleh dikata telah mereka raih. Tetapi pernahkah timbul sesal dengan kenyataan masa kecil dan remaja mereka habiskan dengan bekerja dan bekerja. “Dulu waktu masih kecil memang sempat terpikir bahkan menuduh ayah kami kejam dengan segala perlakuan dan disiplinnya. Tapi kini kami sadar

maksud ayah baik dan dia benar,” ujar Rona mantap. Lalu kini apa lagikah keinginan mereka yang belum terkabul?

Ingin mengunjungi dan bertemu langsung dengan orang Indian di tempat asalnya. Rasanya tidak lucu kalau kami membuat barang-barang suku Indian tapi tidak pernah sekalipun bertemu orangnya atau ke tempatnya. Keinginan lain adalah mendaftarkan hak paten karya-karya asli mereka yang sudah lebih tiga tahun dipasarkan.

Tugas

Diskusikan dengan temanmu:

1. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah sukses ketiga anak yang masih sangat muda tersebut?
2. Apa pula yang bisa kamu tiru dari mereka bertiga?

2. Banyak Jalan Menuju Sukses

Sukses dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan di mana seseorang berhasil melewati atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Sukses belajar berarti menguasai atau menyelesaikan tugas dalam belajar.

Coba kita ingat kembali pada waktu kita belajar bersepeda. Pada awalnya kita dibimbing bagaimana caranya memegang kemudi, mengayuh pedal, menjaga keseimbangan agar tetap dapat berjalan tanpa terjatuh dan lain sebagainya. Pada awalnya orang tua akan membantu dengan cara memegang bagian dari sepeda, karena pada saat itu kita masih belum mampu mengendalikan dengan baik. Sedikit demi sedikit, bantuan akan dikurangi sehingga akhirnya dilepas sama sekali. Di tengah-tengah proses belajar bersepeda ini kita tidak jarang terjatuh. Namun kita tidak pernah jera dan berusaha untuk mencoba, mencoba dan mencoba lagi. Hingga akhirnya ketrampilan bersepeda ini dapat dikuasai dengan baik. Dapatkah kita menyebut keberhasilan belajar mengendarai sepeda ini sebagai sebuah kesuksesan?

Pendidikan yang ditempuh semenjak taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi sebetulnya adalah ajang pembelajaran meraih kesuksesan. Tetapi apakah setiap orang mampu memanfaatkan peluang untuk sukses? Bila kesuksesan itu diawali dengan belajar, apakah kita dapat menjadi seorang yang sukses? Kriteria seperti apakah yang dibutuhkan untuk menjadi seseorang yang disebut sukses? Orang sukses adalah orang yang tidak jemu-jemu untuk mempelajari sesuatu yang belum dikuasainya. Bila hal yang dipelajari itu akhirnya dapat dikuasai, maka dapat dikatakan bahwa proses belajar itu berhasil atau sukses. Nah, sesungguhnya sukses itu adalah harapan setiap orang. Apa benar demikian? Untuk menjadi orang sukses, tentu saja membutuhkan ketrampilan sukses. Apa ketrampilan sukses itu? Ketrampilan untuk sukses meliputi hal-hal berikut ini:

- a. *Living Skills*. *Living skills* adalah ketrampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketrampilan ini sangat menentukan apakah seorang siswa dapat menjadi sukses atau tidak.
- b. *Learning Skills*. *Learning skills* adalah ketrampilan yang digunakan agar kita selalu dapat mengembangkan diri melalui proses belajar yang berkelanjutan. Dengan pengenalan dan penguasaan *learning skills* yang tepat, kita dapat melakukan aktivitas belajar atau bahkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
- c. *Thinking Skills*. *Thinking skills* adalah ketrampilan yang dibutuhkan pada saat kita berpikir untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya apa saja ciri seorang yang dapat dikategorikan sebagai pembelajar sukses akan dibahas pada uraian berikut ini. Dengan demikian kita dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai arah ke mana kita hendak menuju, bagaimana teknik mencapainya serta tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebaiknya Kamu tahu

Sepuluh Sikap Positif Menuju Sukses (AA Qowiy)

- | | |
|--|--|
| <i>a. Tegar menghadapi kesulitan;</i> | <i>f. Membiasakan diri bekerja keras;</i> |
| <i>b. Mengambil hikmah dari kesulitan;</i> | <i>g. Menikmati indahnya kesulitan;</i> |
| <i>c. Gigih mencari ilmu;</i> | <i>h. Menjalain kerja sama saling menguntungkan;</i> |
| <i>d. Berani mengambil resiko;</i> | <i>i. Tekun dalam berdoa kepada Tuhan;</i> |
| <i>e. Tenang dalam bertindak;</i> | <i>j. Mengembangkan sikap tawakal.</i> |

3. Empat Resep Menuju Sukses

a. Jujur

Apa yang kamu lakukan atau katakan apabila kamu mendapatkan tugas padahal kamu tidak menyukainya? Atau ketika kamu ingin menyampaikan perasaanmu padahal kamu malu untuk mngungkapkannya? Keadaan seperti itu disebut sebagai situasi dilematis. Pernahkan kamu menghadapi situasi seperti itu? Sebagian orang akan bersikap diam atau pasif. Ini tidak jujur terhadap apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukannya. Sikap diam tersebut dimaksudkan untuk menyenangkan orang lain. Bentuk respon lain yang sering muncul adalah dengan menyakiti orang lain atau bersikap agresif. Perilaku ini bersifat spontan, jujur dan tidak dibuat-buat. Namun perilaku agresif ini hanya akan memuaskan diri sendiri, tetapi kurang menghargai orang lain.

Kejujuran pada diri sendiri merupakan suatu upaya menerima kelebihan maupun kekurangannya. Pernahkah kamu mengetahui ada orang yang belum dapat menerima kekurangannya dalam hal-hal tertentu sehingga menarik diri dari pergaulan sosial? Sementara ada juga orang yang berusaha menutupi kekurangannya dengan berpura-pura seolah tidak memiliki kekurangan. Orang yang seperti itu telah berbuat tidak jujur, seperti layaknya orang yang menggunakan topeng. Sebagus apapun topeng itu hanya berfungsi sebagai penutup.

b. Cerdas

Cerdas merupakan kemampuan untuk belajar, memahami, memutuskan dan beropini berdasarkan alasan tertentu. Orang cerdas dilukiskan sebagai sosok berikut: Pertama, orang cerdas mempunyai kemampuan belajar dari pengalaman. Sebagai manusia, orang cerdas pun pernah berbuat salah. Namun karena orang yang cerdas selalu belajar dari pengalaman, maka mereka berusaha tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan.

Kedua, sifat yang dimiliki orang cerdas adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, siswa yang cerdas tidak hanya berambisi memperoleh nilai ujian yang tinggi, namun juga mampu mengelola pekerjaan, berorganisasi, bergaul dengan orang lain, dan mampu mengelola hidup pada umumnya.

Sebaiknya Kamu tahu

IQ (*intellectual quotient*) atau kecerdasan otak bukan satu-satunya kunci kesuksesan. EQ (*emotional quotient*) atau kecerdasan emosi justru punya peranan sangat penting untuk kunci kesuksesan. Kecerdasan emosi antara lain mencakup kemampuan memahami orang lain, berkomunikasi, bekerja sama, mengendalikan diri dan sebagainya.

c. Memiliki Jiwa Kepemimpinan

Menjadi pemimpin pada dasarnya harus mampu memberi contoh bagi yang dipimpinnya. Ki Hadjar Dewantara mengajarkan *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*.

Ing Ngarsa Sung Tulada, maksudnya ketika seorang pemimpin berada di depan, ia harus dapat memberi teladan. Tanpa adanya teladan, kepemimpinan tidak akan efektif.

Unsur kedua adalah, *Ing Madya Mangun Karsa*, yang berarti seorang pemimpin harus dapat memberikan semangat ketika berada di tengah-tengah orang yang dipimpinnya. Semangat tidak hanya diberikan kepada orang lain,

tetapi yang lebih penting bagaimana seorang pemimpin mampu memberi semangat pada diri sendiri.

Unsur ketiga adalah *Tut Wuri Handayani*, yang artinya ketika seorang pemimpin berada di belakang, ia harus mampu memberikan dorongan pada orang yang dipimpinnya. Ketiga hal tersebut mengindikasikan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai empati (merasakan apa yang dirasakan orang lain) yang sangat besar. Selain itu, seorang pemimpin hendaknya tidak membuat jarak dengan orang yang dipimpinnya.

d. Mampu Melihat Jauh Kedepan

Perilaku yang berorientasi jangka panjang biasanya didasarkan pada suatu cita-cita atau angan-angan terhadap suatu hal. Sebagai contoh, impian manusia yang ingin terbang seperti burung, akhirnya menjadi kenyataan dengan ditemukannya pesawat terbang. Masih banyak contoh temuan inovatif yang pada mulanya bagi sebagian orang dianggap tidak mungkin terjadi, pada akhirnya menjadi kenyataan.

Selain impian, kita harus punya visi. Visi adalah jabaran tujuan kemana pribadi harus menuju yang dapat berupa jabaran masa depan yang lebih baik dan lebih sukses. Visi memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan impiannya.

4. SDM Berkualitas Kunci Menuju Keunggulan Bangsa

Kita telah memasuki abad XXI. Pasar bebas tingkat ASEAN (AFTA) telah dimulai tahun 2003 dan APEC akan dimulai tahun 2020, yang berarti era perdagangan bebas sebentar lagi akan dimulai. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, begitu juga kualitas SDM-nya masih sangat rendah. Langkah strategis untuk mengembangkan kualitas SDM ialah melalui pendidikan, bahkan masyarakat menaruh harapan yang sangat tinggi kepada dunia pendidikan. Maka tepatlah jika UUD 1945 memberikan prioritas yang tinggi pada pengembangan SDM. Dengan memiliki SDM yang berkualitas kita akan mampu

bersaing dengan bangsa-bangsa lain, sebab sesungguhnya dalam era pasar bebas selain penuh dengan tantangan sebenarnya juga banyak peluang.

Dalam rangka itulah, pendidikan sebagai sarana pengembangan SDM harus menetapkan strategi yang tepat, yakni bukan saja SDM itu dikembangkan, tetapi juga harus dipikirkan pemanfaatannya. Selanjutnya juga diperlukan perencanaan pendidikan yang mantap dan yang tidak boleh dilupakan pengembangan SDM harus berwawasan jauh kedepan.

Sudah bukan merupakan rahasia lagi bila kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa. Demikian juga keberhasilan kita dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN mulai tahun 2003 dan APEC mulai tahun 2020. Oleh karena itu tidak berlebihan bila Eli Ginzberg mengatakan: *“Human resources are the key to economic development”* (Warther and Davis, 1981 : 4). Untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas, dunia pendidikan khususnya pendidikan sekolah dituntut untuk lebih berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Bahkan ada harapan yang berlebih dari masyarakat bahwa kualitas manusia Indonesia di masa mendatang sangat ditentukan oleh pendidikan kita.

Kondisi SDM di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya, secara kualitas jauh lebih memprihatinkan bila dibandingkan dengan SDM di negara-negara maju. Negara-negara berkembang pada umumnya bukan saja menghadapi persoalan kualitas akan tetapi juga dihadapkan pada persoalan kuantitas. Secara kuantitatif dua pertiga penduduk dunia berada di negara-negara berkembang, dengan tingkat pertumbuhan tiap tahun empat kali lebih cepat bila dibandingkan dengan negara maju (Sadik, 1991 : 50). Beban kuantitas itu ditambah dengan kondisi kualitas SDM yang memprihatinkan. Negara-negara berkembang umumnya menghadapi masalah-masalah kemiskinan, gizi, kesehatan, pendidikan.

Era yang akan datang adalah era dengan pola produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa tidak lagi bersifat nasional tetapi akan menembus batas ruang dan waktu sehingga tenaga kerja juga berkembang ke arah kualifikasi

internasional. Kita semua menyadari bahwa langkah strategis untuk mengembangkan SDM berkualitas global adalah melalui pendidikan.

5. Potret Kualitas SDM Indonesia

Jumlah angkatan kerja pada saat ini diperkirakan lebih dari 100 juta orang. Dari jumlah tersebut 54% bekerja di sektor pertanian, 15% di sektor perdagangan eceran dan hotel, 13% di sektor jasa, 10% pada manufaktur dan 8% di sektor lain-lain. Selanjutnya setiap tahun di Indonesia ada kurang lebih 4,5 juta tenaga kerja baru memasuki dunia kerja dan harus disediakan lapangan pekerjaan. Dari jumlah itu sebagian besar hanya tamat sekolah dasar yaitu sebanyak 2,2 juta, tamat SLTP atau pernah duduk di SLTP 2,1 juta, dan jumlah angkatan kerja yang tamat SLTA dan pernah duduk di SLTA hanya 1 juta saja. Melalui program wajib belajar sembilan tahun diharapkan pendidikan terendah angkatan kerja kita untuk tahun-tahun mendatang adalah tamat SLTP (Djemari Mardapi, 1998: 5).

Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Dalam hal kualitas sumber daya manusia kita memang sangat ketinggalan, sebab menurut hasil penelitian, dari 48 negara yang diteliti, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dalam hal kualitas sumber daya manusianya, menduduki peringkat ke-42 dalam hal kemampuan manajemennya, dan menduduki peringkat 40 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya (Husaini Usman, 1997 : 12). Era pasar bebas menimbulkan masalah-masalah pendidikan, seperti bagaimana menumbuhkan kemampuan berfikir analitik dan saintifik, bagaimana menciptakan sikap inovatif dan kreatif (Tilaar, 1996). Sementara itu Unesco menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan adalah sejauh mana peran lembaga pendidikan sebagai pusat pengembang iptek, bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang profesional, bagaimana menciptakan lembaga pendidikan sebagai tempat proses belajar mengajar yang kondusif, bagaimana pula melakukan kerjasama internasional yang saling menguntungkan (Unesco, 1996).

Masalah-masalah pendidikan yang dihadapi Indonesia dalam menyongsong pasar bebas adalah masalah rendahnya kompetisi, rendahnya kerjasama, rendahnya adaptasi, rendahnya partisipasi, inovasi, dan jati diri (Husain Usman, 1997 : 13).

Rendahnya kompetisi tercermin dari rendahnya kualitas, relevansi, dan internasionalisasi pendidikan.

Rendahnya kerjasama tampak dari adanya gejala bahwa masing-masing yang terlibat dalam pendidikan masih berjalan sendiri-sendiri dengan tujuannya sendiri-sendiri pula. Rendahnya kerjasama juga tampak dari tidak menyatunya ilmu-ilmu yang diberikan kepada peserta didik, dimana ada kesan bahwa masing-masing ilmu berdiri sendiri-sendiri.

Rendahnya angka partisipasi pendidikan, khususnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia terlihat dari data berikut, angka partisipasi Indonesia 10, Thailand 16, Hongkong 18, Filipina 28, Australia 39, Korea Selatan 40, Jepang 66, Amerika Serikat 76, dan Kanada 99. Rendahnya angka partisipasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti rendahnya pendapatan masyarakat, selain itu sektor pendidikan hanya mendapat anggaran relatif kecil dari APBN kita, padahal rata-rata negara ASEAN mengalokasikan 12% APBN untuk sektor ini (UNESCO, 1996). Baru belakangan ini anggaran pendidikan di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup berarti, yakni mendekati 20% dari APBN.

Sebaiknya Kamu tahu

Era perdagangan bebas merupakan era industrialisasi, dengan tumpuan kemampuan tenaga kerja, khususnya dalam bidang teknologi. Kemampuan tenaga kerja kita dalam menyongsong era pasar bebas masih cukup memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Pada akhir tahun 1995 ada sebanyak 57.159 orang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, dan di dalamnya ada 23.407 orang tenaga yang bekerja pada tingkat operator atau teknisi menengah (Suyanto, 1996).

6. Pengembangan SDM untuk Keunggulan Bangsa

Dewasa ini telah berkembang wawasan berfikir untuk menempatkan SDM sebagai unsur sentral dalam pembangunan. Dalam bidang ekonomi juga telah terjadi pergeseran pandangan dari yang semula menempatkan modal sebagai faktor utama, kepada manusia sebagai faktor sentral.

Pendapat yang mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor sekunder, pada dasarnya dipengaruhi oleh ajaran ekonomi neoklasik, yang beranggapan bahwa barang modal merupakan faktor pokok bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan berlangsungnya globalisasi ekonomi maka sumber dana bukan lagi barang langka, karena akan didapatkan di pasar internasional. Dengan demikian maka tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Oleh karena itu pembangunan Indonesia di masa depan perlu mempunyai orientasi yaitu menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dan sentral dalam pembangunan ekonomi (Swasono dan Boediono, 1990 : 21).

Dua aspek dalam pengembangan SDM menurut UNDP adalah aspek pengembangan kemampuan serta aspek penggunaan kemampuan. Pengembangan kemampuan dan penggunaan kemampuan adalah dua hal penting dalam proses pengembangan SDM yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan. Pengembangan SDM tanpa diikuti penggunaan adalah suatu pemborosan besar. Sebaliknya penggunaan SDM tanpa diikuti pengembangan kemampuan tidak ada dinamika (UNDP, 1991 : 1).

Problem yang masih dihadapi oleh Indonesia adalah belum terlaksananya pembangunan SDM yang dipadukan dengan penggunaan SDM. Ketidak terpaduan inilah yang melahirkan kasus-kasus dimana SDM telah dikembangkan tetapi kemudian tidak digunakan. Kalaupun digunakan tidak ada kesempatan untuk dapat mengekspresikan diri secara optimal untuk bisa memberikan kontribusi yang tinggi bagi dirinya sendiri, masyarakatnya, bangsa dan negaranya (Samidjo BK, 1993 : 9).

Bagi bangsa Indonesia sudah selayaknya untuk memperhatikan strategi pengembangan SDM yang secara terpadu dikaitkan dengan penggunaannya.

Pengembangan SDM dan penggunaan SDM harus dipandang sebagai satu kasatuan dalam proses pembangunan bangsa. Keuntungan dari strategi ini adalah: (1) Menempatkan pengembangan SDM dan penggunaannya sama penting; (2) Terhindar dari kemungkinan menyia-nyiakan SDM yang telah dikembangkan, karena pengembangan tanpa penggunaan adalah pemborosan;

Sebaiknya Kamu Tahu

Strategi pengembangan SDM tidak bisa dipisahkan dari strategi pendidikan. Ada empat strategi pendidikan nasional yaitu: (1) pemerataan pendidikan, (2) peningkatan relevansi pendidikan dan pembangunan (3) peningkatan kualitas, (4) efisiensi pendidikan.

7. Pengembangan SDM Sesuai Kebutuhan Bangsa

Pada setiap negara yang perkembangannya sedang menuju tahap industrialisasi, pemerintah dan masyarakat memberikan harapan yang sangat besar kepada dunia pendidikan sebagai tempat penyiapan tenaga kerja produktif yang nantinya bekerja di lapangan industri. Harapan itu dilandasi oleh anggapan bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan dapat diajarkan di lembaga pendidikan. Selanjutnya penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan itu akan menghasilkan tenaga kerja yang produktif di dunia kerja, yang akhirnya akan meningkatkan ekonomi.

Investasi di bidang pendidikan bukannya tanpa resiko. Dengan memberikan dana untuk meningkatkan pendidikan berarti akan mengurangi kemampuan untuk membiayai pembangunan di sektor lain. Hal ini lebih terasa bagi negara-negara yang sedang berkembang yang kemampuan untuk membiayai sendiri pembangunannya masih rendah. Sementara itu, investasi pendidikan itu termasuk jenis investasi berjangka panjang, yang berarti baru dapat dinikmati hasilnya setelah puluhan tahun. Apabila hasil investasi pendidikan (dalam bentuk lulusannya) ternyata terlalu menyimpang dengan jumlah dan jenis tenaga kerja

yang diperlukan maka proses pendidikan yang telah dilaksanakan itu merupakan pemborosan dan bukannya investasi lagi.

8. Pengembangan SDM Berwawasan Masa Depan

Kehadiran asing memasuki bidang pengembangan sumber daya manusia, selain tidak bisa dicegah dalam era globalisasi, tidak perlu disesali. Melainkan harus disikapi sebagai cambuk, sekaligus tantangan bagi pengelola pendidikan. Sebab pada akhirnya ketika kita bicara soal manusia Indonesia pada abad 21, mereka adalah manusia-manusia yang harus mampu bersaing di era global yang diantaranya disumbang kehadiran lembaga pendidikan semacam itu.

Soedjatmoko (1991 : 97) menggambarkan sifat-sifat dan kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang. *Pertama*, orang harus “serba tahu”, dan harus selalu menyadari bahwa proses belajar tidak akan pernah selesai. *Kedua*, harus kreatif dalam memberikan jawaban terhadap tantangan baru. *Ketiga*, mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial. *Keempat*, memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. *Kelima*, sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dalam perubahan sosial.

Selanjutnya menurut Ulrich Teicher (1997 : 54) manusia masa depan harus punya persyaratan kualitas dan kemampuan sebagai berikut : (a) fleksibel; (b) inovatif serta kreatif; (c) mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu; (d) siap belajar seumur hidup; (e) mempunyai keterampilan komunikasi; (f) mampu bekerja dalam tim; (g) bertanggung jawab; (h) berwawasan global; (i) cakap dan profesional.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia yang ideal yang mampu menghadapi tantangan masa depan ialah mereka yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut: (a) produktif; (b) kreatif; (c) menguasai ilmu dasar yang luas; (d) mau belajar sepanjang hidup; (e) mampu menyesuaikan diri dengan zaman; (f) bermoral dan taat pada agamanya; (g) memiliki solidaritas sosial serta toleran.

Ciri-ciri di atas sebenarnya mencerminkan kepribadian manusia seutuhnya, jasmani dan rohani, yang meliputi keilmuan, keterampilan, kejelasan nilai-nilai hidup, dan moralitas yang tinggi.

Sebaiknya Kamu tahu

Organisasi Ekonomi yang Terbentuk di Era Pasar Bebas

1. *Asean Free Trade Agreement (AFTA)*;
2. *European Free Trade Agreement (EFTA)*;
3. *North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA)*;
4. *Latin American Free Trade Association (LAFTA)*;
5. *Trans Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA)*;
6. *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*;
7. *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)*;
8. *East Asia Economic Caucus (EAEC)*;
9. *African Financial Community (AFC)*;
10. *Central American Economy Union (CAEU)*;
11. *Caribbean Community (Caricom)*;
12. *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*;
13. *World Trade Organization (WTO)*.

Standar Internasional Mutu Produk Barang dan Jasa

1. *Total Quality Control (TQC)* dan *Total Quality Assurance (TQA)* untuk periode tahun 1940-an.
2. *Total Quality Management (TQM)* tahun 1950-an.
3. *Total Control System (TCS)* untuk tahun 1978.
4. Mulai tahun 1986 berubah menjadi *Internasional Standard Organization 9000 (ISO-9000)*.

Rangkuman

- ❖ Sukses dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan di mana seseorang berhasil melewati atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Sukses belajar berarti menguasai atau menyelesaikan tugas dalam belajar.
- ❖ Beberapa ketrampilan yang harus dimiliki untuk sukses:
 - a. **Living Skills.** *Living skills* adalah ketrampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketrampilan ini sangat menentukan apakah seorang siswa dapat menjadi pembelajar sukses atau tidak.
 - b. **Learning Skills.** *Learning skills* adalah ketrampilan yang digunakan agar kita selalu dapat mengembangkan diri melalui proses belajar yang berkelanjutan. Dengan pengenalan dan penguasaan *learning skills* yang tepat, kita dapat melakukan aktivitas belajar atau bahkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
 - c. **Thinking Skills.** *Thinking skills* adalah ketrampilan yang dibutuhkan pada saat kita berpikir untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketrampilan ini muncul pada saat kita mengkritisi fenomena kehidupan dan pada tataran yang lebih tinggi, ketrampilan ini digunakan untuk memecahkan masalah.
- ❖ Sepuluh Sikap Positif Menuju Sukses (AA Qowiy):
 - a. Tegar menghadapi kesulitan;
 - b. Mengambil hikmah dari kesulitan;
 - c. Gigih mencari ilmu;
 - d. Berani mengambil resiko;
 - e. Tenang dalam bertindak;
 - f. Membiasakan diri bekerja keras;
 - g. Menikmati indahnyanya kesulitan;
 - h. Menjalain kerja sama saling menguntungkan;
 - i. Tekun dalam berdoa kepada Tuhan;
 - j. Mengembangkan sikap tawakal.
- ❖ Menurut Howard Gardner dalam bukunya *Frame of Mind (1985)*, manusia mempunyai banyak kemampuan intelejensi. Ada delapan macam kecerdasan intelejensi:
 - a. Kecerdasan logis matematis;
 - b. Kecerdasan interpersonal;
 - c. Kecerdasan kinestetis;
 - d. Kecerdasan musik;
 - e. Kecerdasan interpersonal;
 - f. Kecerdasan bahasa;
 - g. Kecerdasan spasial visual;
 - h. Kecerdasan Naturalis.

- ❖ Menurut Ulrich Teicher manusia masa depan harus punya persyaratan kualitas dan kemampuan sebagai berikut : **(a) fleksibel; (b) inovatif dan kreatif;** (c) mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu; (d) siap belajar seumur hidup; (e) mempunyai kepekaan sosial dan keterampilan komunikasi; (f) mampu bekerja dalam tim; (g) mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan kepadanya; (h) mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasionalisasi; (i) cakap dalam berbagai hal dalam keterampilan.
- ❖ Era yang akan datang adalah era dengan pola produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa tidak lagi bersifat nasional tetapi akan menembus batas ruang dan waktu sehingga tenaga kerja juga berkembang ke arah kualifikasi internasional. Kita semua menyadari bahwa langkah strategis untuk mengembangkan SDM berkualitas global adalah melalui pendidikan.

Latihan

a. Tugas Individu:

1. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri apa yang dimaksud sukses itu!
2. Apa saja kiat untuk menuju sukses itu?
3. Apa bedanya living skills, learning skills, dan thinking skills itu?
4. Jelaskan 10 sikap positif menuju sukses
5. Jelaskan beberapa ciri karakter sukses!
6. Sebutkan 8 macam kecerdasan intelegensi!
7. Mengapa SDM itu penting bagi keunggulan bangsa?
8. Diskripsikan kondisi SDM Indonesia saat ini!
9. Jelaskan strategi pengembangan SDM Indonesia!
10. Mengapa perencanaan pendidikan dalam suatu negara itu penting?

b. Tugas Kelompok:

Bentuklah 4 kelompok diskusi di kelasmu, masing-masing mempresentasikan makalah di depan kelas dengan topik sebagai berikut:

1. Pentingnya SDM bagi keunggulan bangsa.
2. Kondisi SDM Indonesia saat ini.
3. Strategi pengembangan SDM Indonesia
4. Pentingnya pendidikan untuk keunggulan bangsa.

B. Mengenal Potensi Diri untuk Berprestasi**1. Potensi Diri.**

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, pengertian potensi, adalah kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Potensi dapat bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif.

Pada dasarnya potensi dapat berupa: kejujuran, ketegasan, kesucian, keimanan, kesetiaan, kerapian, kematangan, kedewasaan, kecerdasan, kebijakan, kebenaran, keramahtamahan, dan sebagainya. Menurut para ahli potensi manusia dapat diklasifikasikan kedalam tiga hal. (a) Potensi dasar misalnya intelegensi, logika, abstraksi dan lain-lain; (b) Potensi kerja contohnya ketekunan, ketelitian, etos kerja dan sebagainya; (c) Potensi kepribadian terdiri dari kejujuran, keimanan, kesetiaan, kematangan, kedewasaan, keikhlasan dan sebagainya.

Potensi dapat dijadikan pembeda antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam masyarakat kita temukan berbagai ragam manusia dengan potensi yang beragam pula. Masing-masing memiliki kelebihan namun sekaligus punya kekurangan. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali

potensi kita masing-masing dan selanjutnya memanfaatkan serta mengembangkannya secara maksimal.

Sebaiknya Kamu Tahu

Sebagai siswa, mulai sekarang kalian harus mengenali kelebihan, kekurangan serta potensi diri masing-masing. Selanjutnya kembangkanlah potensi yang ada pada dirimu secara maksimal. Dengan demikian diharapkan akan muncul prestasi yang bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia.

2. Macam-Macam Potensi

Setiap potensi sebenarnya merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh seseorang. Tidak ada manusia sempurna yang memiliki segala macam potensi. Yang terjadi biasanya seseorang memiliki potensi yang bagus dalam bidang tertentu, akan tetapi memiliki kekurangan dalam hal lainnya. Para ahli mengkalsifikasi potensi sebagai berikut:

- (a) *Spiritual Quotient* (Kecerdasan Spiritual). Jenis potensi ini merupakan kecerdasan dan kearifan jiwa yang ada pada seseorang. Kecerdasan spiritual ini nilai-nilainya bersumber dari agama.
- (b) *Emotional Quotient* (Kecerdasan Emosional), kecerdasan untuk dapat mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri dan sebagainya. Kecerdasan ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan dimana seseorang dibesarkan. Kecerdasan ini lebih terkait dengan otak kanan.
- (c) *Intellectual Quotient* (Kecerdasan intelektual), merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia terutama terkait dengan otak kiri. Kecerdasan ini berfungsi antara lain untuk menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu.

Selain tiga jenis kecerdasan tersebut masih ada yang disebut potensi fisik (*Psychomotoric*), merupakan potensi fisik manusia yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti melihat, mendengar, berjalan dan sebagainya. Ada

satu lagi yakni Potensi Keuletan (*Adversity Quotient*) berupa keuletan, daya tahan, ketangguhan dan sejenisnya.

Sebaiknya Kamu Tahu

La Rose membagi 3 golongan tentang konsep diri seseorang:

- a. Golongan yang menyerah sebelum berusaha, kalah sebelum bertanding.
- b. Golongan yang mau bekerja dan mempunyai cita-cita, tetapi tidak mau bekerja lebih keras lagi dan cenderung menyerah. Sebenarnya golongan ini tidak puas dengan apa yang diraih, tetapi tidak mau bekerja lebih keras dan menerima tanggung jawab.
- c. Golongan yang tidak pernah menyerah. Yaitu tidak membiarkan perasaan putus asa atau pesimistis, menjalani hidup optimis dan merasa kehidupan sebagai suatu tantangan, ingin berhasil dan memiliki pribadi yang berkualitas.

3. Hambatan Pengembangan Potensi Diri

Menurut Mike Woodcock dan Dave Francis, terdapat beberapa hambatan pengembangan potensi diri:

- a. *Ketidakmampuan mengatur diri*. Ciri-cirinya adalah melalaikan kesehatan fisik, hidup tidak teratur, tidak menerima suatu kegagalan, merasa diri lemah.
- b. *Nilai pribadi yang tidak jelas*. Ciri-cirinya adalah tidak memperlakukan nilai; bertindak berbeda dari nilai yang dianut; mengambil sikap pasif terhadap kehidupan; menghindari umpan balik; menghindari tanggung jawab.
- c. *Tujuan pribadi yang tidak jelas*. Cirinya tidak mempunyai tujuan pribadi; tidak mengukur kemampuan; menghindari resiko; tidak punya keseimbangan pribadi; tidak mempunyai tujuan yang jelas.

- d. *Pribadi yang kerdil*. Cirinya adalah menghindari tanggung jawab; menghindari tantangan; menyembunyikan perasaannya; menghindari umpan balik.
- e. *Kemampuan yang tidak memadai untuk memecahkan masalah*. Cirinya : memiliki masalah yang tidak terselesaikan; menggunakan teknik yang kurang tepat; pendekatan yang tidak sistematis.
- f. *Kreativitas rendah*. Ciri-cirinya: menghindari resiko; tidak belajar dari kesalahan; puas dengan kedudukan yang ada; cenderung tidak menyelesaikan tugas; tidak yakin akan kemampuan sendiri.
- g. *Wibawa rendah*. Cirinya adalah: merasa kurang dihargai, kurang bisa mengungkapkan pendapat; citra diri rendah; tidak mampu mengatur diri sendiri dan tidak mampu mengatur orang lain.
- h. *Kemampuan pemahaman manajerial rendah*. Cirinya: kurang mampu menganalisis kemampuan diri sendiri; mengikuti saja gaya kepemimpinan yang sudah umum; menciptakan suasana kerja yang negatif.
- i. *Kemampuan menyelia rendah*. Cirinya: lalai memberikan pandangan positif terhadap kerja karyawan; membiarkan hasil kerja jelek; membiarkan karyawan kerja tanpa pengawasan.
- j. *Kemampuan latih rendah*. Cirinya: tidak memandang penting aspek pelatihan; tidak tahu kebutuhan orang lain; tidak memberikan tugas yang mengandung tantangan; kurang memperhatikan potensi orang lain.
- k. *Kemampuan membina tim rendah*. Cirinya: tidak bisa bekerja dalam sebuah tim; cenderung merasa paling mampu; mengabaikan pendapat orang lain kurang menghargai orang lain.

Sebaiknya Kamu Tahu

❖ Konsep diri yang positif:

- a. Yakin terhadap kekuasaan Tuhan;
- b. Mampu mengatasi masalah;
- c. Menyadari adanya perbedaan;
- d. Mampu melihat kekurangan dan berusaha memperbaiki diri;
- e. Mampu tampil prima;
- f. Pengetahuan luas dalam bidangnya;
- g. Peka terhadap kebutuhan orang lain;
- h. Memiliki harapan realistis;
- i. Penghargaan diri yang sehat;
- j. Menerima dan memberi umpan balik secara efektif.

❖ Konsep diri yang negatif:

- a. Tidak mau memberi dan menerima umpan balik;
- b. Kaku terhadap pendapat sendiri meskipun salah;
- c. Suka mengeluh, mencela atau meremehkan pihak lain;
- d. Tidak sanggup mengungkapkan penghargaan terhadap kelebihan orang lain;
- e. Pesimis terhadap kompetisi;
- f. Menghindari dialog terbuka;
- g. Tidak mau meningkatkan potensi dirinya.

4. Mengenal Potensi Diri

Bagaimana cara kita mengenali potensi diri? Potensi diri dapat dikenali melalui, tiga hal yakni: 1) memiliki kemampuan di atas rata-rata, 2) memiliki kreativitas tinggi, 3) memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diembannya.

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan di atas rata-rata apabila mempunyai kecerdasan tinggi, kemampuan penalaran bagus, serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan kreativitas itu? Apabila dirinci, maka ciri-ciri kreativitas adalah sebagai berikut:

1. Dorongan ingin tahu besar;
2. Sering mengajukan pertanyaan yang baik;
3. Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah;
4. Bebas dalam menyatakan pendapat;
5. Mempunyai rasa keindahan;
6. Menonjol dalam salah satu bidang seni;
7. Tidak mudah terpengaruh orang lain;
8. Memiliki rasa humor tinggi;
9. Daya imajinasi kuat;
11. Dapat bekerja mandiri;
12. Senang mencoba hal-hal baru;
13. Mampu mengembangkan suatu gagasan.

Kreativitas tidak hanya penting untuk memberikan kepuasan kepada individu, tetapi juga merupakan sesuatu yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Karena dalam kenyataan bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki kreativitas tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari produk mereka berupa IPTEK yang dikonsumsi oleh hampir seluruh bangsa di dunia.

Sebaiknya Kamu Tahu

Berbagai jenis bakat yang dapat kita kenali:

1. Kemampuan intelektual
2. Kemampuan berpikir kreatif – produktif
3. Kemampuan dalam salah satu bidang seni
4. Kemampuan psikomotor atau kinestetik
5. Kemampuan psikososial, seperti bakat kepemimpinan.

Rangkuman

- ❖ Potensi adalah, kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Potensi dapat bersifat positif, tetap juga dapat bersifat negatif.
- ❖ Menurut para ahli potensi manusia dapat diklasifikasikan kedalam tiga hal.
(a) Potensi dasar misalnya intelegensi, logika, abstraksi dan lain-lain; (b) Potensi kerja contohnya ketekunan, ketelitian, etos kerja dan sebagainya; (c) Potensi kepribadian kejujuran, keimanan, kesetiaan, kematangan, kedewasaan, keikhlasan dan sebagainya.
- ❖ Klasifikasi lain menurut para ahli adalah sebagai berikut:
(c) *Spiritual Quotient* (kecerdasan spiritual). Jenis potensi ini merupakan kecerdasan dan kearifan jiwa yang ada pada seseorang. Kecerdasan spiritual ini nilai-nilainya bersumber dari agama.
(d) *Emotional Quotient* (kecerdasan emosional), kecerdasan untuk dapat mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri dan sebagainya. Kecerdasan ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan dimana seseorang dibesarkan. Kecerdasan ini lebih terkait dengan otak kanan.

(c) *Intellectual Quotient* (kecerdasan intelektual), merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia terutama terkait dengan otak kiri. Kecerdasan ini berfungsi antara lain untuk menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu.

❖ Konsep diri yang positif:

- a. Yakin terhadap kekuasaan Tuhan;
- b. Mampu mengatasi masalah;
- c. Menyadari adanya perbedaan;
- d. Mampu melihat kekurangan dan berusaha memperbaiki diri;
- e. Mampu tampil prima;
- f. Pengetahuan luas dalam bidangnya;
- g. Peka terhadap kebutuhan orang lain;
- h. Memiliki harapan realistis;
- i. Penghargaan diri yang sehat;
- j. Menerima dan memberi umpan balik secara efektif.

❖ Konsep diri yang negatif:

- a. Tidak mau memberi dan menerima umpan balik;
- b. Kaku terhadap pendapat sendiri meskipun salah;
- c. Suka mengeluh, mencela atau meremehkan pihak lain;
- d. Tidak sanggup mengungkapkan penghargaan terhadap kelebihan orang lain;
- e. Pesimis terhadap kompetisi;
- f. Menghindari dialog terbuka;
- g. Tidak mau meningkatkan potensi dirinya.

Latihan

a. Tugas Individu:

1. Jelaskan pengertian potensi diri dengan kalimatmu sendiri!
2. Apa perbedaan antara potensi dasar, potensi kerja, dan potensi kepribadian itu?
3. Apa perbedaan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual itu?
4. Sebutkan tiga konsep diri menurut La Rose!
5. Jelaskan hambatan pengembangan potensi diri menurut Mike Woodcook!
6. Apa yang dimaksud konsep diri yang positif itu?
7. Apa pula yang dimaksud konsep diri yang negatif itu?

b. Tugas Kelompok:

Bentuklah 3 kelompok diskusi di kelasmu, masing-masing mempresentasikan makalah di depan kelas dengan topik sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual
2. Kecerdasan emosional
3. Kecerdasan spiritual

C. Berprestasi untuk Keunggulan Bangsa

1. Putra-Putri Indonesia Mampu Berkompetisi di Kelas Dunia

Usaha keras selama sembilan tahun yang dilakukan Tim Olimpiade Fisika Indonesia untuk mengangkat pelajar-pelajar Indonesia membuahkan hasil gemilang. Pada Olimpiade Fisika Internasional (OFI) XXXIII di Bali, Indonesia berhasil meraih 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Ketiga medali emas masing-masing diraih Peter Sahangamu (SMU Negeri 78 Jakarta), Widagdo Setiawan (SMU Negeri Denpasar), dan Fajar Ardian

(SMU Insan Cendekia Serong). Christoper Hendriks (SMU Pelita Harapan Karawaci) mendapat medali perak, Evelyne Mintarno (SMU 1 BPK Penabur Jakarta) memperoleh medali perunggu.

Perolehan medali emas di Bali adalah merupakan yang kedua. Emas pertama Indonesia diraih dalam OFI XXX di Padova, Italia atas nama I Made Agus Wirawan yang saat ini kuliah di California Institute of Tecnology (Caltech) yang merupakan perguruan tinggi teknik terbaik di Amerika (Disarikan dari www.kompas.com).



Cabang angkat besi butuh dukungan serius pemerintah. Selama ini, cabang yang menyumbang medali selama tiga Olimpiade berturut-turut itu merasa kurang diperha-

Sumber: Tempo Juni 2008

2. Berprestasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Untuk dapat mengembangkan prestasi, seseorang perlu mengembangkan kemampuan yang sejalan dengan potensi diri yang dimiliki. Kemampuan tersebut bisa dalam mata pelajaran formal, kegiatan ekstra kulikuler, maupun berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosia-budaya, dan lain sebagainya.

Potensi diri hanya akan berkembang optimal menjadi sebuah prestasi, apabila dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, seseorang yang memiliki

bakat di bidang olah raga tertentu, maka diperlukan latihan yang tekun dan teratur agar bisa mencapai prestasi tinggi.

Upaya meningkatkan ketrampilan bisa dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berlatih dan bekerja tekun.
- b. Berkonsultasi dengan para ahli untuk memecahkan berbagai masalah yang menjadi hambatan bagi upaya meningkatkan prestasi.
- c. Melakukan tukar menukar pengalaman terutama dengan orang lain yang dinilai telah berprestasi.



Sumber: Tempo Juli 2008

Sebaiknya Kamu

Penemu Sangat Berjasa bagi Dunia

Balon Terbang	1930	Sir F. Whittle
Barometer	1643	E. Torricelli
Dinamit	1862	Alfred B. Nobel
Film Gambar Hidup	1893	Thomas A. Edison
Frequensi Modulation	1933	Edwin H. Armstrong
Helikopter	1909	Igor I. Sikorsky
Jam Bandul	1656	C. Huygens
Kamera Kodak	1888	George Eastman
Kapal Terbang	1903	Wilbur & O. Wright
Kapal Uap	1807	Robert Fulton
Korek Api	1827	John Walker
Lensa Kacamata	1760	Benjamin Franklin
Mesin Diesel	1897	Rudolf Diesel
Mesin Ketik	1868	Sholes

3. Iptek Indonesia di Titik Nadir

(Dikutip dari Harian Kompas 5 April 2006)

Wakil Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lukman Hakim, Selasa 4 April 2006, mengemukakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat ini sudah berada pada titik nadir. Padahal, bangsa ini diharapkan tidak mengulang pola pembangunan dengan paradigma lama yang hanya

mengandalkan eksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan pengembangan iptek.

“Lembaga penelitian kita terpinggirkan. Itu terlihat dari rendahnya kualitas publikasi dan keterhubungannya dengan dunia ilmu pengetahuan, “ tutur Lukman. Lukman dan sejumlah ilmuwan lain dimintai tanggapannya terkait dengan temuan buntutnya peran ilmuwan Indonesia karena keahlian mereka disia-siakan akibat tiadanya strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dukungan dana dari pemerintah.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kata Lukman tidak harus selalu memberi manfaat ekonomi. Sejumlah negara yang berhasil dalam pengembangan ipteknya justru memulai dengan investasi besar-besaran dalam bidang iptek.

Thailand, misalnya menuai reputasinya saat ini sebagai negara yang maju teknologi pangannya setelah memulai investasi di bidang itu sejak 20 tahun lalu. Pakistan berhasil mengundang kembali ilmuwan-ilmuwaninya setelah ada janji bahwa mereka akan memperoleh gaji empat kali lipat dari yang diperoleh seorang menteri. Terkadang riset tidak langsung dapat diaplikasikan kepada kebutuhan masyarakat, tetapi pada saatnya akan memberikan nilai tambah sangat besar. Berdasarkan data antara tahun 1969-2001, anggaran pemerintah untuk aktivitas keilmuan dan teknologi di Indonesia mengalami penurunan cukup tajam. Anggaran untuk riset yang dialokasikan pemerintah sejak tahun 1986 sampai tahun 2002 menurun rata-rata 0,18 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 1986 anggaran riset sekitar 0,052 persen dari PDB, tetapi pada tahun 2002 hanya mencapai 0,039 persen dari PDB. Tahun 2006 plafon anggaran untuk iptek hanya Rp 1,76 triliun, sedangkan belanja iklan di Indonesia ditargetkan mencapai 28 triliun.

Di tengah keprihatinan itu, diduga cukup banyak peserta program beasiswa bagi lulusan SMA bidang ilmu pengetahuan alam yang dibiayai pinjaman Bank dunia periode 1985-1992 mangkir dari kewajiban menjalankan ikatan dinas. Pemerintah saat ini tengah melacak keberadaan mereka, tetapi data peserta program dibawah menteri Riset dan Teknologi telah hilang. Beasiswa mereka

diperoleh melalui bantuan luar negeri, maka mereka harus memberikan ganti rugi, kata Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPPT Nadirah.



Siswa dituntut berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik seperti olah raga, seni, dan bahasa

Hal ini dimaksudkan agar siswa memperoleh keseimbangan diri

Sumber: www.permai.or.id/images

4. Merebut Peluang untuk Berprestasi

Prestasi akan berkembang dengan maksimal dalam situasi dan kondisi dimana kesempatan pengembangan bakat dipenuhi. Kesempatan itu berupa pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang dimaksud adalah memberikan pengalaman kepada setiap peserta didik sesuai dengan bakat kemampuannya. Misalnya, dengan penyelenggaraan pendidikan yang demokratis. Dalam pendidikan demokratis, guru tidak sekedar profesional tetapi juga harus memiliki kepribadian dan hubungan sosial yang memberikan peluang kepada anak didik untuk berkembang potensinya secara optimal.

Kepribadian guru dapat membantu memberikan peluang berprestasi bagi siswanya, antara lain:

- a. Bersikap terbuka terhadap hal-hal baru;
- b. Peka terhadap perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis;
- c. Mempunyai wawasan yang luas;
- d. Penuh pengertian;
- e. Mempunyai sifat toleransi;
- f. Mempunyai kreativitas yang tinggi;
- g. Bersikap ingin tahu.

Sedangkan hubungan sosial yang semestinya dimiliki oleh guru untuk dapat membantu memberikan peluang bagi berkembangnya prestasi siswa, antara lain meliputi:

- a. Suka bergaul dengan anak berbakat serta memahami kesulitan yang dihadapi anak tersebut;
- b. Dapat menyesuaikan diri;
- c. Mampu memahami dengan cepat tingkah laku orang lain.

Peluang juga bisa diberikan oleh orang tua. Misalnya, orang tua tidak bersikap otoriter, mau memberikan peluang bagi anaknya untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Orang tua juga tidak memandang terlalu rendah terhadap prestasi anaknya.

Peluang yang diberikan masyarakat dan pemerintah misalnya, memberikan iklim kebebasan untuk berkreasi, menyediakan rasa nyaman dan aman dalam kehidupan. Di dalam UUD 1945 juga menyiratkan bahwa salah satu tujuan bernegara kita adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Ini berarti bahwa, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang paling bertanggung jawab adalah negara atau pemerintah. Upaya itu baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Upaya ini merupakan sarana penting untuk mengembangkan prestasi warga negara dan sumber daya manusia Indonesia.

Dalam negara demokrasi peluang untuk berprestasi sangat besar. Sebab prinsip demokrasi menurut Robert Dahl antara lain mencakup : 1) diperbolehkannya kompetisi; 2) dilindunginya hak sipil, hak politik dan hak

asasi manusia; 3) dibukanya peluang untuk partisipasi. Dengan kata lain, demokrasi lebih memberikan peluang seseorang untuk berprestasi. Tentu saja berhasil tidaknya semua itu sangat tergantung kepada yang bersangkutan, apakah bisa memanfaatkan peluang itu secara maksimal atau tidak.

Dalam masyarakat yang otoriter, prestasi diri anak bangsa juga kurang berkembang. Sebab dalam iklim masyarakat otoriter tidak ada kebebasan untuk berekspresi dan berkreasi. Hal itu bisa digambarkan sebagai berikut: orang takut secara bebas menyatakan pendapatnya. Orang yang berprestasi tetapi tidak disenangi karena tidak sejalan dengan kemauan penguasa tidak dapat tempat untuk mengembangkan kebolehannya. Orang yang bekerja keras berusaha untuk mengembangkan usaha ekonominya, tetapi karena tidak sejalan dengan yang dikehendaki penguasa maka tidak pernah mendapat fasilitas kredit. Akibatnya usaha yang dikembangkannya tidak dapat berkembang secara optimal.

Sebaliknya banyak pengusaha tanpa kerja keras, tetapi karena dekat dengan penguasa maka usahanya dapat berkembang. Akan tetapi karena usahanya sangat tergantung dari dukungan atau fasilitas penguasa, maka ketika penguasa itu lengser karena krisis, banyak pengusaha tersebut yang gulung tikar. Tidak sampai di situ, hutang mereka (pengusaha karena dapat fasilitas dari penguasa) pada pihak ketiga, meminta kepada pemerintah memberikan talangan terlebih dahulu dan sampai sekarang hutang mereka masih meninggalkan masalah. Pengelolaan negara oleh penguasa yang tidak memperhatikan prestasi, jelas merupakan kesalahan besar. Karena kesalahan pengelolaan ini, negara kita sekarang masuk dalam deretan negara yang memiliki hutang terbesar di dunia. Oleh karena itu, untuk bisa keluar dari krisis, maka mutlak diperlukan prestasi dalam berbagai kehidupan dari semua komponen bangsa ini.

Dalam kondisi apapun, sesungguhnya dorongan paling efektif untuk berprestasi adalah bersumber dari diri kita masing-masing. Misalnya, kita jadikan “budaya berprestasi” sebagai kebutuhan. Memacu diri untuk berprestasi, sudah merupakan “budaya” bagi masyarakat di negara maju.

Sebab orang akan dihargai atau dapat menduduki posisi yang penting dalam berbagai kehidupan karena prestasinya, bukan karena keturunan.

Dalam kehidupan masyarakat kita, sesungguhnya kebutuhan untuk berprestasi telah ada, hanya belum digunakan secara optimal menjadi motor penggerak untuk berprestasi. Misalnya, orang Makasar dan Bugis dikenal sangat ulet, orang Bali punya semangat hidup yang tinggi, orang Ambon dikenal cinta kemerdekaan, orang Melayu dianggap bergairah, orang Batak, Aceh, Mandailing, dan Minang di kenal memiliki kemauan keras, orang Jawa dikenal lebih suka kehilangan uang dan penghasilan jika merasa dirinya tidak diperlakukan sesuai dengan kedudukannya.



*Para juara Teknik Mekanik Otomotif
Dalam Olympic Skill SMK Se-Malang Raya 27-29 Juli 2007, Kelompok Teknologi Industri
Sumber: www.smkpgri-sgs.sch.id/image/prestasi.JPG*

5. Menghargai Setiap Peluang

Sikap positif apa yang semestinya dikembangkan agar dapat memanfaatkan setiap peluang berprestasi? Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa peluang untuk mengembangkan prestasi bisa datang dari luar maupun dari diri sendiri. Oleh karena itu peluang untuk berprestasi senantiasa ada pada setiap saat. Terutama dengan mengembangkan bakat melalui pendidikan dan latihan-latihan secara terus-menerus. Untuk itu perlu dihindari perbuatan

yang menyia-nyaiakan peluang untuk berprestasi. Sikap-sikap yang perlu dihindari, misalnya malas, tidak sabar, lekas puas, dan pesimis.

Sedangkan sikap positif terhadap setiap peluang berprestasi, misalnya: (1) Menekuni hobi yang positif. (2) Punya keberanian untuk selalu mencoba meskipun tidak mesti selalu berhasil, serta mensikapi kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda. (3) Memiliki sikap selalu optimis untuk berhasil. (4) Memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengikuti lomba atau kompetisi.

6. Siap untuk Berkompetisi

Apa saja yang perlu disiapkan untuk berkompetisi secara sehat? *Pertama*, membiasakan diri untuk berpikir ilmiah dan rasional. *Kedua*, memperdalam dan mengasah kemampuan secara terus menerus. Hal ini penting untuk menimbulkan rasa percaya diri, bahwa akan mampu melaksanakan sesuatu dengan baik. Percaya diri merupakan modal utama untuk bersaing. Tanpa rasa percaya diri yang kuat, maka dalam berkompetisi akan canggung, ragu-ragu, sehingga akan menjadi kendala untuk mengembangkan kemampuan secara optimal.

Ketiga, menerima kritik untuk perbaikan. Keterbukaan menerima kritik, sangat penting. Sebab meskipun telah berusaha mempersiapkan dengan baik, tetapi perlu disadari kadang-kadang orang lain lebih jeli dalam melihat kelemahan kita. Untuk itu masukan dari orang lain untuk memperbaiki kelemahan, menjadi sesuatu yang sangat penting.

Keempat, melakukan sesuatu dengan optimal. Berusaha melakukan sesuatu secara tuntas, tidak setengah-setengah. Hal ini penting, karena jika berhasil akan merasa puas, sebaliknya jika masih belum berhasil tidak mudah kecewa. Karena kita menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha, Tuhan jua yang menentukan segalanya. Kita harus yakin, jika selalu berusaha secara optimal, pada akhirnya keberuntungan juga akan dinikmati. Dalam diri kita harus ada keyakinan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Dengan perkataan lain pada suatu ketika mesti apa saja yang dilakukan secara optimal akan bermanfaat.

Kelima, berkompetisi secara sportif. Kita harus berusaha untuk tidak melakukan kecurangan, manipulasi dalam bentuk apapun. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan sebagai pemenang. Keyakinan ini penting sebab menang dalam suatu kompetisi tetapi diraih dengan cara tidak jujur, tidak saja menipu diri sendiri, tetapi juga akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebab dalam kehidupan masyarakat yang sehat, dibutuhkan kejujuran dan keadilan.

Pada sisi lain, sportifitas dalam berkompetisi menunjukkan kesediaan untuk melakukan sesuatu sejalan dengan aturan main. Berkompetisi secara sportif artinya berkompetisi secara sehat. Semua orang diberi kesempatan yang sama serta diberlakukan aturan yang sama. Persaingan yang demikian, bagi siapapun baik yang keluar sebagai pemenang atau yang belum berhasil tetap dapat menjaga kebersamaan. Kebersamaan dalam masyarakat kita yang majemuk sangat penting. Apabila kebersamaan tidak dapat dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai aktivitas, maka dapat memicu konflik.

Konflik memang bukan sesuatu yang mesti buruk, karena konflik yang dapat dikelola dengan baik akan melahirkan kebersamaan yang sangat kuat. Tetapi apabila tidak mampu mengelola, maka konflik dapat melahirkan perpecahan.



*Kejuaraan Lomba baris-berbaris dalam rangka HUT TNI
Sumber: files.wordpress.com/2008/07*

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003). Salah satu prinsip pembelajaran adalah adanya motivasi. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Untuk itu kami mencoba meneliti pengaruh cerita sukses seseorang terhadap motivasi orang yang membacanya. Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tanggapan siswa terhadap tugas membaca cerita sukses sebelum memulai pelajaran. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 April – 5 Mei 2008. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas X TI 2 SMK Negeri 8 Semarang sebanyak 40 siswa.

7. Peringkat Daya Saing Ekonomi Indonesia

(Sumber Indonesia Dalam krisis, BE Julianery)

Perekonomian suatu negara dikatakan kompetitif bila kondisi ekonominya menjanjikan pertumbuhan yang tinggi untuk beberapa tahun kedepan. Merujuk kepada riwayat pertumbuhan ekonominya sampai pertengahan dasawarsa 1990-an, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand sebetulnya berpotensi besar untuk terus tumbuh. Namun, kurs mata uang negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang jatuh bebas sejak Juli 1997 menyeret macan baru Timur Jauh itu ke sumur krisis ekonomi.

Praktik korupsi dan kinerja perbankan yang buruk mempersulit Indonesia mengangkat sayapnya dari sumur krisis yang dalam. Beberapa lembaga pemeringkat dunia dalam bidang ekonomi meletakkan Indonesia pada posisi buruk. Perusahaan pemeringkat internasional *Moody's Investor Service* dari AS

menurunkan peringkat kredibilitas Indonesia untuk mendapatkan utang luar negeri. Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand menghadapi hal serupa. Lembaga yang setiap bulan mengeluarkan daftar peringkat itu menilai krisis moneter telah merapuhkan keuangan negara-negara tersebut.

Dengan menggunakan variable situasi politik, kebijakan ekonomi dan nonekonomi, serta struktur dan likuiditas ekonomi untuk membuat peringkat invesatasi di negara-negara Asia, *Economist Intelligent Unit* dari majalah berita terkemuka dunia, *The Economist*, menempatkan Indonesia pada tahun 1997 sejajar dengan RRC dan Filipina di bawah India, Malaysia, dan Thailand. Likuiditas ekonominya dinilai paling buruk bahkan dibandingkan dengan Thailand maupun Filipina.

Dengan kontraksi 13 persen di tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai negeri dengan potensi pertumbuhan dan iklim usaha terburuk sepanjang tahun itu. Hanya satu tingkat di atas Vietnam yang menjadi juru kunci. Vonis ini mengisyaratkan Indonesia akan menjadi pilihan terakhir investor asing untuk melakukan bisnis atau perluasan usaha di antara 12 negara Asia.

Untuk sampai pada kesimpulan itu, *Asia Market Intelligence Ltd.* menerima jawaban kuesioner dari 467 eksekutif bisnis perusahaan multinasional yang beroperasi di 12 negara Asia. Parameter yang digunakan dalam survei dibagi dalam dua kategori: prospek bisnis dan iklim bisnis. Yang dinilai untuk menentukan prospek bisnis adalah potensi pertumbuhan, rencana menambah pegawai, dan rencana ekspansi perusahaan di negara-negara bersangkutan. Sedangkan penilaian untuk iklim bisnis didasarkan pada sistem hukum, stabilitas politik, biaya infrastruktur dan resiko ekonomi negara-negara tersebut.

Oleh lembaga pemeringkat internasional *WEF*, yang secara berkala mengeluarkan peringkat indeks daya saing semua negara di dunia, posisi Indonesia sejak krisis ekonomi menerpa Asia terus melorot. Di tahun 1997 peringkatnya di urutan 15. Setahun kemudian jatuh drastis ke posisi 31. Daya saing itu terus anjlok ke peringkat 37 pada tahun 1999: turun sampai 22 tingkat dalam dua tahun krisis. Dibandingkan dengan negara-negara Asia yang terkena

krisis seperti Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan Filipina, kemerosotan indeks daya saing Indonesia adalah yang paling tajam.

Sepuluh besar negara-negara dunia dengan indeks daya saing tinggi sepanjang tahun 1999, menurut catatan *WEF*, berturut-turut adalah Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Taiwan, Kanada, Swiss, Luxemburg, Inggris, Belanda, dan Irlandia. Singapura merupakan satu-satunya negara Asia yang perekonomiannya paling kompetitif di dunia selama 4 tahun terakhir (1996-1999).

Lembaga pemeringkat bergengsi yang berkedudukan di Swiss, *IMD*, setiap tahun juga menerbitkan *World Competitiveness Year book*. Publikasi yang melaporkan daya saing negara-negara di dunia itu seakan-akan meneguhkan betapa buruk muka perekonomian Indonesia. Berdasarkan 4 faktor penilaian yang meliputi keadaan ekonomi, situasi politik, situasi bisnis, dan infrastruktur, Indonesia dalam empat tahun terakhir (1998-2001) selalu dalam posisi “*lima juru kunci*” di antara 47 negara yang dinilai.

7. Memiliki Etos Kerja yang Kuat dan Semangat untuk Berprestasi

Semangat berprestasi harus ada pada setiap orang. Bahkan semangat berprestasi ini merupakan tuntutan kehidupan itu sendiri. Karena dalam kehidupan perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan. Kalau tidak berarti tidak ada kemajuan. Kemajuan itu sendiri hanya akan dapat dicapai ketika kita berprestasi.

Pertanyaannya kapan dikatakan pada diri seseorang ada semangat berprestasi? Semangat berprestasi itu ada ketika: 1) seseorang tidak pernah berhenti untuk berlatih atau berkarya. 2) seseorang selalu berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya; 3) seseorang selalu memanfaatkan setiap peluang untuk mengembangkan potensi diri baik dalam bentuk partisipasi maupun kompetisi. Dalam hal ini perlu direnungkan pernyataan Edison, bahwa karya-karya unggul hanya 1 % merupakan hasil inspirasi, tetapi 99 % adalah hasil dari "berkeringat", dari usaha terus-menerus. Dengan perkataan lain kerja keras merupakan faktor penentu dalam meraih prestasi. Kerja keras merupakan sesuatu yang sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena

itu ketika semangat ini ada maka siapa saja yang bekerja keras akan dapat menuai prestasi. Tingkat prestasi yang dapat diraih tentunya sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

Bagaimana semangat berprestasi dalam masyarakat kita? Seperti yang pernah dinyatakan Koentjaraningrat ahli antropologi terkemuka Indonesia. Menurut beliau mentalitas sebagian besar masyarakat Indonesia adalah mentalitas jalan pintas. Berkembangnya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan bukti adanya mentalitas jalan pintas tersebut. Ada kecenderungan kuat dewasa ini orang untuk menjadi kaya, menduduki suatu jabatan tidak perlu bekerja keras dan berprestasi. Tetapi cukup dengan jalan pintas yakni dengan melakukan KKN.

Selanjutnya Simak Kutipan Berikut:

DARI BOS SANDIWARA KE BOS UKIR

(Dikutip dari Buku Sukses Merambah dunia, Terbitan Kompas)

Arifin memang salah satu sosok pengusaha pribumi yang mengawali suksesnya dari tangga paling bawah. Ia harus berjuang dan memeras keringat hampir 20 tahun lamanya.

Sungguh belum pernah bermimpi dan tidak pernah terlintas pada benaknya, bila dalam usianya yang ke-55 ia mampu memiliki perusahaan mebel ukir cukup besar. Sekaligus, menjadi seorang eksportir dan telah menjalin usaha dagang dengan importir terkenal dari Atlanta, Amerika Serikat.

Arifin Mubarroq pria asal Jepaten desa Mantingan Jepara ini hanya berpendidikan sampai dengan kelas V Sekolah Rakyat (SR). Tak ada pendidikan nonformal lainnya. Namun dalam hal “membaca” peluang bisnis, khususnya yang menyangkut mebel ukir, ia sangat ahli. “Saya sendiri heran, kok. Tidak ada resep khusus. Saya hanya pekerja keras yang tak mengenal lelah, sejak masih bujangan hingga setua ini,” tuturnya.

Meski sudah menjadi “bos”, latar belakang sebagai pemain sandiwara tetap melekat dalam sikapnya. Pak Arifin begitu panggilan akrabnya masih sering didaulat untuk menyanyi, berjoget, atau menjadi pembawa acara, “karena

memang hobi saya, dengan senang hati permintaan mereka saya turuti. Lho, jelek-jelek begini saya pernah ikut grup sandiwara, gambus dan dangdut. Malah selama tiga tahun (1966-1969) menjadi pemimpin, sekaligus penyanyi dan pemegang organ Orkes Melayu Irama Desa”, begitu ucapnya.

Kehidupan sehari-harinya memang nyaman dan sederhana. Rumah, mobil, dan perabotnya di desa Tahunan, tidak mencerminkan milik bos. Ruang kerjanya di Ngabul lebih tidak karuan. Saya memang tidak bisa hidup neko-neko. Jadi bos atau tidak, saya tetap tidak berubah. Ya begini-begini saja.

Perjuangannya

Arifin memang salah satu sosok pengusaha pribumi yang mengawali suksesnya dari tangga paling bawah. Ia harus berjuang dan memeras keringat hampir 20 tahun lamanya.

Sebagai anak petani yang tidak mampu, Arifin harus ikut merasakan pahit getir orang tidak berpunya. Ia tidak mampu melanjutkan sekolah. SR-nya hanya sampai kelas V. Masa kanak-kanaknya tersita untuk membantu meringankan beban orang tua. Di kemudian hari, kenyataan itu justru dianggapnya sebagai cambuk pemicu hidupnya.

Dengan hati mantap dan langkah tegar, ia memutuskan untuk bekerja di perusahaan mebel ukir milik tetangga, sebagai tukang gosok. Pada usia 15 tahun, Arifin mulai belajar sebagai tukang ukir. Kemudian, memperdalam ilmu menjadi tukang kayu.

Upah yang diterima sebagai tukang gosok, ukir, dan tukang kayu, sebagian diberikan kepada orang tuanya. Sebagian lagi disisihkan untuk dijadikan modal usaha. Akhir tahun 1959, saya sudah mampu mendirikan usaha mebel ukir kecil-kecilan. Hasil produksinya saya pasarkan keluar masuk kampung atau desa, tuturnya.

Delapan tahun kemudian, Arifin memberanikan diri mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Japara dan disetujui dengan pinjaman modal Rp. 100.000,00.

Karena usahanya cukup maju, maka pada tahun 1974, dia memperoleh fasilitas Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) masing-masing 5 juta rupiah.

Dengan guyuran modal, Arifin mulai mampu memasarkan hasil produksinya ke Bandung, Jakarta, dan sebagian wilayah Sumatera.

Sejalan merebaknya mebel ukir, mata jeli Arifin melihat peluang bisnis di bidang gergaji. Jelas tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan gergaji tradisional. Kemudian saya membeli dua unit gergaji mesin. Selain lebih cepat, lebih ekonomis, saya juga mendapat tambahan penghasilan dari pengusaha lain yang menggergajikan kayunya. Termasuk, serbuk gergaji yang dijual untuk bahan baku obat nyamuk. Sampai dengan akhir tahun 1985, jumlah gergaji mesin saya mencapai 11 unit.

Terus Mengembangkan

Perusahaannya semakin mapan dan maju, sementara Arifin tetap berusaha mengembangkan serta meningkatkannya terus. Mulai akhir tahun 1987, ia mencoba mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara tetangga.

Dalam bulan Oktober 1985, volume ekspor perusahaan Pak arifin yang bernama PT BJIF (Bumi Jepara Indo Furni), rata-rata sudah mencapai 30 container (peti kemas) ukuran 40 kaki per bulan. Volume ekspor ini ditargetkan meningkat menjadi 40 – 50 peti kemas per bulan dalam tahun 1996.

Untuk memenuhi volume ekspor yang mencapai 30 peti kemas tersebut, maka Arifin harus memperluas bengkel kerja di kompleks Perumnas Tahunan dan membangun bengkel kerja baru yang terletak delapan kilometer sebelah timur Tahunan. Kemudian, menambah anak angkat perusahaan menjadi 40. Mereka adalah pengusaha kecil yang hanya memiliki beberapa perajin ukir. Hasil produksi mereka dijual kepada saya. Dan sebagai bapak angkat, saya membantu permodalan dan bahan baku.

Kecuali menambah anak angkat, PT BJIF juga menambah 18 karyawan profesional. Sedang untuk menunjang berbagai kebutuhan ekspor tersebut, Arifin

terpaksa pinjam lagi ke BRI sebanyak Rp. 300 juta, sehingga posisi pinjaman kredit sampai saat itu mencapai Rp. 700 juta.

Arifin menjamin mampu membayar bunga dan pokok pinjaman, jumlah kredit yang lumayan besar tersebut, sesuai batas waktu yang ditetapkan pihak bank. Pokoknya tidak macetlah, karena terhitung sejak Agustus 1995, pihaknya telah sepakat untuk mengirim 20 peti kemas per bulan ke TSR Imports Inc. Atlanta (AS).

Selain menjamin mampu membayar bunga dan pokok pinjaman, Arifin juga berani menjamin prospek ekspor mebel ukir Jepara tetap cerah dan menggembirakan. Ini berdasarkan pengamatannya selama sembilan hari di AS dan setelah berdialog dengan beberapa pengusaha terkenal disana.

8. Prestasi Anak Bangsa yang cukup Memanggakan

Apabila kita menengok ke masa lalu, banyak prestasi yang telah dibuat oleh manusia Indonesia sebagai bentuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Jauh sebelum orang asing, baik dari Barat maupun dari daratan Asia ke Nusantara, manusia Indonesia telah menunjukkan prestasinya. Misalnya, manusia Indonesia di Kalimantan telah pandai membuat besi dari sumber-sumber alam lingkungan tempat mereka hidup. Di daerah Nusantara lain, manusia Indonesia telah mampu membuat logam perunggu. Manusia Indonesia juga telah mengembangkan teknologi menenun, memberi warna pada kain dari kapas, membuat kapal, baik yang dikayuh maupun yang memakai layar. Di Sumatera dan Kalimantan emas telah di dulang berabad sebelum orang Eropa tiba. Tanah air kita sejak zaman kuna telah terkenal sebagai pulau emas.

Kemudian di bidang kebudayaan, misalnya seni pertunjukkan Wayang pada tahun 2003 mendapat penghargaan dari UNESCO. Penghargaan itu didasarkan pada penilaian bahwa Wayang di nilai sebagai salah satu prestasi budaya dunia yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Wayang merupakan salah satu warisan dunia.

Diantara anak bangsa ada sejumlah orang yang patut kita banggakan. Kalau menengok sejarah kita patut bangga kepada para Pemuda atas prestasi mereka yang memberikan tonggak persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Kita patut pula bangga kepada Bung Karno dan Bung Hatta serta para pejuang perintis kemerdekaan yang lain. Karena mereka mampu memelopori perjuangan untuk merebut kemerdekaan.

Di bidang IPTEK kita mencatat prestasi berupa kemampuan membuat pesawat terbang "Nurtonio". Sejumlah siswa SMA banyak yang berhasil menjadi juara olimpiade fisika tingkat internasional. Dalam bidang olah raga terutama bulu tangkis, kita telah dikenal punya prestasi yang tidak mudah disaingi oleh negara-negara lain.

Di samping itu, kita sebagai bangsa juga menyadari masih banyak pekerjaan rumah, karena prestasi kita masih memprihatinkan. Dalam bidang ekonomi, kita dikenal sebagai negara penghutang dalam deretan teratas. Begitu pula dalam dunia industri, kita masih dominan sebagai konsumen daripada produsen. Dalam aspek moral juga masih memprihatinkan. Hal ini terlihat KKN pada era reformasi ini tidak semakin berkurang tetapi semakin meluas. Begitu pula perdagangan dan penggunaan narkoba tidak semakin berkurang. Bidang hukum pun mengalami kemerosotan. Penegakkan hukum sangat lemah. Hukum sulit menjangkau orang-orang yang berkuasa atau berpengaruh ada kekebalan hukum bagi mereka.

Apa solusinya menghadapi berbagai masalah keterpurukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tentunya kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan aktivitas agar dapat berprestasi sesuai bidang kita masing-masing. Untuk itu kita harus meningkatkan ketrampilan dan kemampuan. Ketrampilan dan kemampuan yang harus dikembangkan mencakup: ketrampilan pribadi, ketrampilan sosial, ketrampilan akademik, dan ketrampilan dalam bidang pekerjaan tertentu.

Ketrampilan pribadi, meliputi etos kerja, motivasi dan kejujuran. .
Ketrampilan sosial, mencakup kecakapan berkomunikasi, kecakapan

bekerjasama, serta kemampuan berempati. Kecakapan akademik, meliputi berbagai kemampuan di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Kecakapan akademik di kalangan masyarakat kita, termasuk di kalangan siswa cenderung masih rendah. Inilah yang menyebabkan prestasi akademik bangsa kita kurang mengembirakan. Padahal kebiasaan berpikir ilmiah atau budaya ilmiah merupakan dasar utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang berprestasi adalah bangsa yang menguasai IPTEK.

Kecakapan kejuruan, artinya ketrampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Misalnya, ketrampilan elektronik, otomotif, pertukangan kayu/bangunan, pertanian, peternakan, perikanan, administrasi, dan lain-lain.

Selanjutnya Simak Kisah Sukses Berikut:

Mbok Berek Merambah Penjuru Dunia

(Dikutip dari Buku Sukses Merambah Dunia, Penerbit Kompas 2000)

Kebesaran namanya bukan lantaran mencantumkan nama “Mbok Berek” pada namanya. Ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi taruhan. Mengandalkan nama besar itu saja tanpa dibarengi kemauan dan keuletan akan cepat terpuruk oleh arus zaman. “Panggil saja Nyonya Umi, atau kalau mau lebih lengkap Nyonya Umi Mbok Berek”, ucap pengusaha restoran kondang yang nama lengkapnya Ny. Ratna Djuwita Umiyatsih Rejeki (49), pemilik restoran ayam goreng terkenal “Mbok Berek”.

Bekas pedagang kaki lima itu kini menjadi pengusaha wanita bertangan dingin, yang memiliki delapan restoran besar dan 120 restoran *franchise* tersebar di Tanah Air. Bahkan usahanya itu telah merambah ke penjuru dunia. Restoran dengan logo khas berwarna dasar hitam, bertuliskan “Mbok Berek” berwarna kuning serta gambar ayam goreng berwarna merah kini telah terpampang di Manila, Kuala Lumpur dan Singapura. Rencananya waktu itu, dalam waktu dekat, logo itu akan hadir pula di kota Manhattan, AS. Ny. Umi bercita-cita memperkenalkan ayam “Mbok Berek” ke seluruh dunia.

Ny. Umi merupakan salah satu pengusaha restoran khas ayam goreng dari generasi ke empat “Mbok Berek”, sebuah nama yang sangat tersohor di kota kelahirannya, Yogyakarta. Tetapi, kebesaran namanya bukan lantaran mencantumkan nama “Mbok Berek” pada namanya. Ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi taruhan. Mengandalkan nama besar itu saja tanpa dibarengi kemauan dan keuletan akan cepat terpuruk oleh arus zaman. Demikian cetus ibu empat anak ini ketika ditanya tentang latar belakang kesuksesan usahanya.

Dalam 24 tahun meniti usahanya, delapan tahun pertama Ny. Umi sempat berkali-kali gulung tikar, buka tutup lantaran tak punya modal. Memulai usaha dari sebuah garasi kecil di Jalan Pegangsaan Timur 12B Jakarta, kemudian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan pernah menempati los pasar berukuran 1 x 1,5 meter di Pasar Cikini.

Tetapi di tengah derasnya *fast food* ala Barat masuk ke Indonesia, Ny. Umi justru tegar mengembangkan usahanya. Bahkan mampu mendirikan sebuah “imperium” berlantai empat di Jalan Dr. Soepomo Nomor 10, 14 dan 16, Jakarta. Tidak itu saja, usaha restoran ini didukung juga dengan sepuluh pabrik pengolahan ayam beserta bumbu di kawasan Cibitung, Bekasi. Pabrik ini akan menghasilkan 1.200 ekor ayam per hari untuk memenuhi kebutuhan ayam potong bagi restorannya. Kami telah menginvestasikan Rp 4 milyar untuk mesin pengolahan itu, jelasnya.

Sebaiknya Kamu Tahu		
Terowongan Terpanjang Dunia		
Simplon	SwissItalia	20.044 m
pennine	Italia	18.618 m
St. Gothurd	Swiss	14.990 m
Lotschberg	Swiss	14.606 m
Hokuriko	Jepang	13.870 m
Shinshimizu	Jepang	13.490 m
Coscade	Amerika	13.170 m
Gunung Cenis	Perancis-Italia	13.233 m
Kubibi	Jepang	11.360 m
Arlberg	Austria	10.270 m

Rangkuman

- ❖ Untuk dapat mengembangkan prestasi perlu mengembangkan dan melatih kemampuan yang sejalan dengan bakat yang dimiliki, baik dalam mata pelajaran formal, kegiatan ekstra kulikuler maupun berbagai kehidupan seperti politik, ekonomi, sosia-budaya.
- ❖ Bakat memerlukan pendidikan dan latihan agar dapat tampil dalam prestasi yang unggul. Misalnya, kalau berbakat dalam mata pelajaran formal seperti: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kewarganegaraan, dan mata pelajaran yang lain agar berprestasi perlu memahami konsep, teori dan latihan terus menerus untuk menguasai mata pelajaran tersebut.
- ❖ Upaya memahami dan mengasah ketrampilan bisa dipertajam dan didalami dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan kunjungan ke proyek-proyek tertentu, seperti pabrik, perusahaan, museum, dan kegiatan penelitian yang lain.
 - b. Berkonsultasi dengan psikolog atau guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan) untuk berdiskusi untuk memecahkan berbagai masalah yang menjadi hambatan bagi upaya meningkatkan prestasi.
 - c. Melakukan tukar menukar pengalaman terutama dengan orang lain yang dinilai telah berprestasi.
- ❖ Semangat berprestasi harus ada pada setiap orang. Bahkan semangat berprestasi ini merupakan tuntutan kehidupan itu sendiri. Karena dalam kehidupan perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan. Kalau tidak berarti tidak ada kemajuan. Kemajuan itu sendiri hanya akan dapat dicapai ketika kita berprestasi.

- ❖ Semangat berprestasi itu ada ketika: 1) seseorang tidak pernah berhenti untuk berlatih atau berkarya. 2) seseorang selalu berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya; 3) seseorang selalu memanfaatkan setiap peluang untuk mengembangkan potensi diri baik dari diri sendiri.
- ❖ Dalam hal ini perlu direnungkan pernyataan Edison, bahwa karya-karya unggul hanya 1 % merupakan hasil inspirasi, tetapi 99 % adalah hasil dari "berkeringat", dari usaha terus-menerus. Dengan perkataan lain kerja keras merupakan faktor penentu dalam meraih prestasi. Kerja keras merupakan sesuatu yang sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja, oleh karena itu ketika semangat ini ada maka siapa saja yang bekerja keras akan dapat menenuai prestasi.
- ❖ Menurut Koentjaraningrat mentalitas sebagian besar masyarakat Indonesia adalah mentalitas jalan pintas. Berkembangnya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan bukti adanya mentalitas jalan pintas tersebut. Ada kecenderungan kuat dewasa ini orang untuk menjadi kaya, menduduki suatu jabatan tidak perlu bekerja keras untuk berprestasi tetapi cukup dengan jalan pintas yakni dengan melakukan KKN.

Latihan

a. Tugas Individu:

1. Mengapa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia tertinggal dengan bangsa lain?
2. Mengapa peringkat daya saing ekonomi Indonesia masih rendah?
3. Apa yang dapat anda petik dari kisah keberhasilan tiga bersaudara Rona, Roni dan Reni di atas?
4. Apa yang dapat kamu petik dari kisah keberhasilan Arifin sebagai pengusaha ukir Jepara dalam bacaan di atas?
5. Bagaimana pendapat koentjaraningrat tentang mentalitas bangsa Indonesia?

b. Tugas Kelompok:

Diskusikan dengan temanmu apa saja yang bisa kalian petik dari kisah keberhasilan Mbok Berek sebagai pengusaha ayam goreng, Rona, Roni dan Reni sebagai pengrajin dari bahan limbah, dan Arifin sebagai pengusaha ukir Jepara.

D.Glosarium:

<i>Living skills</i>	: ketrampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari.
<i>Learning skills</i>	: ketrampilan yang digunakan agar kita selalu dapat mengembangkan diri melalui proses belajar yang berkelanjutan.
<i>Thinking skills</i>	: ketrampilan yang dibutuhkan pada saat kita berpikir untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Kecerdasan logis matematis	: kecerdasan logika dan matematika
Kecerdasan interpersonal	: kecerdasan untuk berhubungan dengan orang lain
Kecerdasan kinestetis	: kecerdasan gerak
<i>Asean Free Trade Agreement (AFTA)</i>	: kawasan perdagangan bebas negara-negara ASEAN
<i>European Free Trade Agreement (EFTA)</i>	: kawasan perdagangan bebas Eropa
<i>North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA)</i>	: kawasan perdagangan bebas negara -negara Atlantik Utara
<i>Latin American Free Trade Association (LAFTA)</i>	: kawasan perdagangan bebas negara -negara Amerika Latin
<i>Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)</i>	: kawasan perdagangan bebas negara -negara Asia Pasifik
<i>Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)</i>	: organisasi negara-negara pengekspor minyak
<i>East Asia Economic Caucus (EAEC)</i>	: kerjasama ekonomi negara-negara Asia Timur
<i>General Agreement on Tariff and Trade (GATT)</i>	: persetujuan internasional tentang tarif dan perdagangan
<i>World Trade Organization (WTO)</i>	: organisasi perdagangan dunia

E. Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf di depannya!

1. Setiap manusia oleh Tuhan telah diberi potensi diri berupa tiga kecerdasan, yaitu....
 - a. otak (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ)
 - b. rasa, karsa. Dan karya
 - c. batiniah, lahiriah, dan ubudiyah
 - d. keterampilan, akademi dan sosial.

2. Kata potensi mengandung arti antara lain berikut ini, kecuali.....
 - a. kekuatan
 - b. kemampuan
 - c. dorongan untuk berprestasi
 - d. daya yang belum terwujud.

3. Tingkat intelegensia, logika, dan daya tangkap merupakan unsur-unsur potensi yang termasuk dalam klasifikasi.....
 - a. kemampuan dasar
 - b. sosial emosional
 - c. sikap kerja
 - d. ketahanan dalam kesulitan.

4. Potensi manusia yang berupa ambisi atau keinginan dalam mencapai suatu tujuan, yaitu potensi.....
 - a. rasio
 - b. hati
 - c. jiwa
 - d. jasmani

5. Kepribadian manusia yang terbentuk berdasarkan bawaan atau bakat disebut:
 - a. *nature*
 - b. alamaiah
 - c. watak
 - d. karakter

6. Orang yang sukses di bidang tertentu karena memiliki berbagai kelebihan disebut....
 - a. berkarir
 - b. berkarya

- c. berprestasi
 - d. berpotensi
7. Salah satu ciri yang menonjol dari seseorang yang sukses atau berprestasi adalah.....
- a. Tidak putus asa dan akan membiarkan jiwanya selalu bertualang.
 - b. Selalu optimis dan memimpikan hal-hal yang kadang tidak masuk akal.
 - c. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang penting dapat untung.
 - d. Berani mengambil resiko dan tidak akan membiarkan perasaan putus asa.
8. Agar hidup kita kelak dapat berprestasi dengan baik, maka sejak dini haruslah.....
- a. Direncanakan dengan sistematis dan proporsional.
 - b. Selalu ikut serta dalam bergagai kompetisi.
 - c. Dilatih berbagai ketrampilan yang disukainya.
 - d. Belajar sesuai anjuran guru.
9. Kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai, selain ditentukan kekayaan alam, juga ditentukan.....
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Besar kecilnya jumlah penduduk. | c. Besarnya bantuan dari negara |
| b. Sumber manusia yang cerdas dan berkualitas. | d. Kewibawaan pemerintah. |
10. Kemampuan untuk menghadapi masalah hidup dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara produktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya disebut:
- | | |
|--------------------|----------------------|
| a. pegangan hidup, | c. kecakapan hidup, |
| b. faksafah hidup, | d. keberanian hidup. |
11. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, manusia telah dilengkapi dengan berbagai potensi yang berbeda dengan makhluk lainnya. Potensi yang ada dan paling utama pada diri manusia di antaranya berupa.....

- a. intuisi, akal, dan naluri
 b. mata, telinga, dan perasaan
 c. akal, pikiran, dan perasaan
 d. naluri, pikiran, dan perasaan.
12. Berikut ini merupakan sikap atau perilaku yang dapat menghambat pengembangan potensi diri yang berasal dari individu itu sendiri, kecuali.....
- a. berprasangka negatif
 b. tidak memiliki tujuan yang jelas
 c. enggan mengenal diri sendiri
 d. tingkat pendidikan.
13. Orang yang sukses di bidang tertentu karena memiliki berbagai kelebihan disebut...
- a. berkarir
 b. berkarya
 c. berprestasi
 d. berpotensi
14. Salah satu ciri yang menonjol dari seseorang yang sukses adalah.....
- a. berani mengambil resiko dan tidak mudah putus asa
 b. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang penting dapat untung
 c. selalu optimis dan memimpikan hal-hal yang kadang tidak masuk akal
 d. berani berpetualang.
15. Kemakmuran suatu bangsa selain ditentukan oleh sumber daya alam, juga ditentukan oleh.....
- a. jumlah penduduk
 b. sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas
 c. kewibawaan pemerintah
 d. bantuan negara lain

Daftar Pustaka

- Abdul, Wahab Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta: BumiAksara.
- Achmadi, Zainal Arifin. 1993. "Agenda Strategi Pendidikan Nasional dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kemiskinan di Indonesia dan Peran Lembaga Pendidikan dalam Pengentasannya, IKIP Malang.
- Agus Wirahadikusumah. (1999). "Reformasi TNI", Dalam Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Agus Wirahadikusumah. (1999). "TNI Menghadapi Tantangan Masa Depan", Dalam Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Arif Yulianto. 2002. *Hubungan Sipil militer di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT Grafindo.
- Astrid S. Susanto. 1995. *Globalisasi dan Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Blaug, Mark. 1980. *Common Assumptions about Education and Employment dalam John Simmon, The Educational Dillema*. New York: Pergamon Press.
- Bonnie Setiawan. 2001. *Menggugat Globalisasi*. Jakarta: INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) dan dan IGJ (Intstitut for Global Justice).
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress
- Daniel Dhakidae. (1999). "Orde Baru dan Peluang Demokrasi", Dalam ABRI dan Kekerasan. Yogyakarta: Dian interfidei-Kompas dan Forum Wacana Muda.

- Edy Suandi Hamid dkk. 2000. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium II*. Yogyakarta: UII Press.
- Ensiklopedi Politik dan Pembangunan*. 1990. Jakarta: Gramedia
- Hans Kohn. 1989. *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya (Terjemahan)* Jakarta: Gramedia.
- Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indria Samego. (1999). *Bila ABRI Menghendaki*. Bandung: Penerbit Mizan .
- Ishadi, S.K. 2001. “*Sumbangan Media Massa Elektronik Menuju Indonesia Baru*”, dalam P. Swantoro. 2001. *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Khor, Martin. 2003. *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Koswara, E. 1999. *Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan “Magister Ilmu Pemerintahan” Departemen Dalam Negeri.
- Kwik Kian Gie. 2003. *Membangun Kemandirian Ekonomi Bangsa di Tengah Derasnya Kapitalisme Global*. Yogyakarta: Makalah seminar Nasional UPN Veteran.
- Latief, Dochak. 1997. “*Pendidikan Ekonomi dan Kualitas Manusia Indonesia pada Era Persaingan Global*”. Pidato Pengukuhan Guru Besar di FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Lemhannas.1996. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Utama
- Mardapi, Djemari. 1996. “*Penilaian Untuk Kerja Sebagai Usaha Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia*“. Pidato Dies di IKIP Yogyakarta, 1996.
- Miriam Budihardjo. 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

- Moekizat. 1996. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: CV Mandar Jaya.
- Mustafa, Bachsan. 1987. *Hukum Pers Pancasila*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene. 1990. *Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990's*. New York: Avon Books.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhadi, M.A. 1990. "Perencanaan Pendidikan Dalam Menyiapkan Tenaga Kerja Produktif dan Permasalahannya Manusia". Pidato Dies di IKIP Yogyakarta, 1990.
- Nurudin. 2003. *Pers dalam Lipatan Kekuasaan*. Malang: UMM Press.
- PPM UII. 1997. *Liberalisasi ekonomi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana bekerjasama dengan PPM UII.
- Qodri Azizy. 2003. *Melawan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ronny Gautama Hotman Bako. 1999. *Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ryamizard Riacudu. (1999). "Konsistensi dan Komitmen TNI" Dalam *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saafroedin Bahar. 1989. *Pendidikan Bela negara*. Jakarta: Intermedia.
- Sadiq, Nafis. 1991. *Keadaan Penduduk Dunia 1991*, UNFPA.
- Salim Said. (2001). *Wawancara tentang Tentara dan Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Samidjo Broto Kiswoyo. 1993. *Antisipasi Pendidikan Dalam Pengembangan SDM di Masa Datang*". Pidato Dies di IKIP Yogyakarta, 1993.
- Sinambela, Mahadi dan Azhari. 2003. *Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Soedjatmoko. 1991. *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*, Yogyakarta: Tiara Wacana..

- Subiyono dkk 1997. *Dwifungsi ABRI (Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sunarso.1997. *Pendidikan Kewiraan (Buku Pegangan Kuliah)*. Yogyakarta: Jurusan MKU, FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Sundhausen. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES.
- Sutanto, Hery, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*. Jakarta: Millenium Publisher.
- Suwarna. 1995. “*Strategi Pendidikan Nasional: Suatu Argumen Eksistensi PLS Dalam Mendukung Pendidikan Untuk Semua*”. Cakrawala Pendidikan Edisi Dies 1995, IKIP Yogyakarta.
- Suyanto W. dkk. 1995. *Kontribusi Industri terhadap STM dalam rangka Link & Match*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta 1995.
- Swasono, Judo, dan Boediono, 1990. “*Prospek Sumber Daya Manusia pada Pembangunan Jangka Panjang Indonesia*”, dalam *Demografi Indonesia*, No. 34, Pendidikan 1990.
- Teicher, Ulrich. 1997. *Enhancing Productivity : Higer Education and a Changing Job Requirement dalam Higher Education & Human Resour ce development in The Asia Pasifik for The 21 st Century; A World Congress*, 1997.
- Tilaar,H.A.R.1996. “*Pendidikan Tinggi di Indonesia Dewasa ini Menghadapi Tantangan Abad XXI*”. Makalah dalam Seminar Nasional Mempersiapkan Mutu Pendidikan Tinggi Menuju Kualitas Global.
- Tim Dosen PPKP. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan tinggi dan Umum*. Yogyakarta: PPK Press.
- Tim Dosen UGM. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.*
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara RI.*
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta:
Sinar Grafika.
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. (*UU No. 22, 25 dan 28 - 1999*)
Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001. Bandung: Penerbit Citra
Umbara.
- UNDP. 1991. *Human development Report 1991* London: Oxford University Press.
- UNESCO. 1996. *Internasional Commision on Education for the 21 st Century,*
Paris Report of Commision.
- Usman, Husaini. 1997. "*Permasalahan Pendidikan Menyongsong Pasar Bebas*".
Dalam *Cakrawala Pendidikan* No. 1 th. XVI, Februari 1997, Yogyakarta:
Penerbitan LPM IKIP Yogyakarta.
- Werther, William B. Jr., Keith Davis. 1981. *Personel Management and Human*
Resuorces. Mc Graw-Hill Book.
- Widarta, I 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah.* Yogyakarta:
LAPERA.

Indeks

A

AFTA 133, 134
APEC 199, 200
akuntabilitas 112, 114
aparatur 36, 112, 120
arogansi 112
aspirasi 67

B

bela negara 3, 6, 7, 14, 23
bebas aktif 135, 137, 138, 140

C

cultural rights 57, 250

D

desentralisasi 66, 113
dekonsentrasi 65, 66, 106, 112, 250
de facto 250, 251
de jure 57, 250
demografis 250, 251
diplomasi 119, 250

E

EFTA 241, 250
etnis 128, 178, 250
egalitarian 119, 123, 158, 164, 250
ekstern 10, 57, 250
eksekutif 62, 91, 95, 112, 113, 163

F

fiskal 165, 69, 12, 113, 250
foke 178, 250
fleksibel 178, 190, 205, 208, 250

G

geografi 62, 250
geografis 6, 7, 57
globe 120, 128, 178, 250
globalisasi 119 - 127, 130, 144 - 147,
153 - 177, 179, 181 - 185

globalisme 156, 167
good governance 160.170

H

hedonisme 119, 163, 185
historis 6
hibah 112

I

informasi 36, 37, 107, 250
intern 10,166
intervensi 18, 168
invasi 18, 19
infiltrasi 17, 18
infrastruktur 112, 229, 230
instansi vertikal 121, 250
vertikal 112

J

jati diri 126, 154, 181, 183, 202

K

keunggulan bangsa 6, 15, 35, 60, 63, 67
kewajiban 188, 199, 208, 209
komunikasi 166, 190, 205, 235
konglomerat 152
konsumerisme 119
kompetisi 95, 164, 165, 219, 250
kebijakan publik 84, 85, 86, 87, 88, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

L

LAFTA 241, 250
legislasi 112
learning skill 196
living skill 196

M

materialisme 119, 161

mall 161

mark up 152

monopoli 8, 10, 58

moneter 9, 112, 112, 114, 168, 182, 184
229

N

negara 2, 3, 6, 7, 8

O

Otonomi 65, 67, 68, 69, 70, 71, 78

P

partisipasi 3, 7, 35, 43, 44, 45, 59, 60

personal 148

prestasi diri 84, 187

political rights 57, 251

potensi diri 209, 211, 213, 218, 228

primordialisme 179, 251

privatisasi 149, 168

pornografi 89, 120

politik luar negeri 3, 19, 113, 114, 130, 134

R

relokasi 149, 179

S

Sishankamrata 30, 31, 32, 33, 45, 46

seluler 144, 148

subversi 17, 18

sumber daya manusia 165, 168, 200, 201, 203

T

teknologi 39, 43, 44, 119, 120, 123, 124, 144

W

warga negara 6, 7, 9, 10, 15, 32,
34, 35,